



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



2023



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948

Email : kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan laporan tahun keempat untuk periode 2020 - 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada segenap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Laporan kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik untuk penyempurnaan laporan kinerja yang lebih baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, dan penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.



Banjarmasin, Januari 2024
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. SUSUNAN ORGANISASI	5
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. PERENCANAAN KINERJA	12
B. PERJANJIAN KINERJA	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	96
IV. PENUTUP	101
A. KESIMPULAN	101
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	102
V. LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	
KERTAS KERJA CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR	
ANALISA SMART INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional (JF)	8
Tabel 2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Pelaksana (JP)	9
Tabel 3	Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 -2024.....	14
Tabel 4	Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024	14
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahunan 2023	15
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 7	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2022 dan 2023	18
Tabel 9	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020-2023	94
Tabel 10	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan	95
Tabel 11	Laporan Posisi Barang Milik Negara	95
Tabel 12	Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Jenis Belanja	96
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Klasifikasi Capaian Rincian Output Kegiatan / Rincian Output	97
Tabel 14	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan	99

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Distrbusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	7
Grafik 2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	9
Grafik 3	Distibusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	9
Grafik 4	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	21
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2022 dan 2023	22
Grafik 6	Perbandingan Realisasi Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara / Pelabuhan/PLBDN dengan Target RAK	23
Grafik 7	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	24
Grafik 8	Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	32
Grafik 9	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun Tahun 2020 s.d 2023	34
Grafik 10	Perbandingan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target RAK	35
Grafik 11	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	36

Grafik 12	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	46
Grafik 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2022 dan 2023	46
Grafik 14	Perbandingan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Target RAK	48
Grafik 15	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	49
Grafik 16	Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran	54
Grafik 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 s.d 2023	55
Grafik 18	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target RAK	56
Grafik 19	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Nilai Kinerja Anggaran	57
Grafik 20	Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	62
Grafik 21	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 s.d 2023	63
Grafik 22	Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target RAK	65
Grafik 23	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	66
Grafik 24	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker	71
Grafik 25	Perbandingan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d 2023	72
Grafik 26	Perbandingan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker dengan Target RAK ...	73
Grafik 27	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Kinerja Implementasi WBK Satker	75

Grafik 28	Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya.....	80
Grafik 29	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d 2023	81
Grafik 30	Perbandingan Realisasi Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya dengan Target RAK.....	82
Grafik 31	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Persentase ASN Yang ditingkatkan Kompetensinya	83
Grafik 32	Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran	87
Grafik 33	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d 2023	88
Grafik 34	Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran dengan Target RAK.....	89
Grafik 35	Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Persentase Realisasi Anggaran	90
Grafik 36	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2023.....	94
Grafik 37	Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2023.....	97



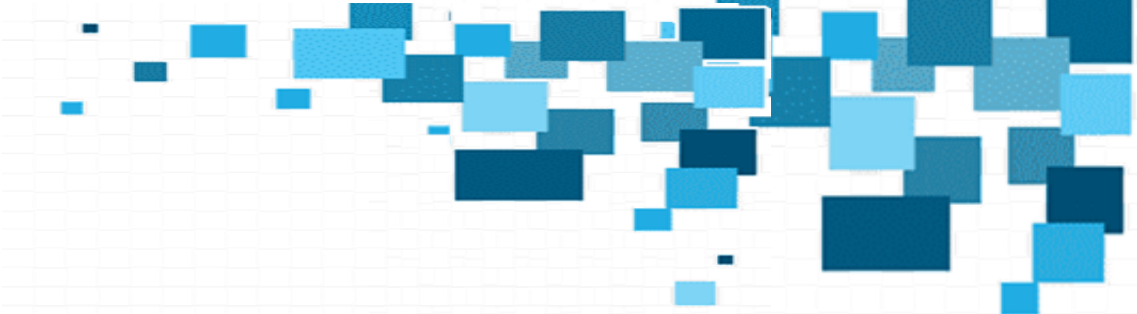
RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai *SDGs (Sustainable Development Goals)* tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya antara lain dengan memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga terbit Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Terbitnya undang-undang kesehatan ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan, dimana Kementerian Kesehatan berupaya dengan memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan dengan melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup 6 jenis transformasi, seperti : transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Dalam upaya mendukung penerapan transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan yang termasuk dalam pilar ketiga yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik ditengah ancaman kesehatan global. Apabila dilihat lebih jauh, cakupan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan yang terkait langsung dengan fungsi kekarantinaan kesehatan yaitu : Memperkuat ketahanan tanggap darurat dengan melakukan jejaring nasional surveilans berbasis Ia, mempersiapkan tenaga cadangan tanggap darurat, dan melakukan *Table Top Exercise* kesiapsiagaan krisis.

Untuk memperkuat pelaksanaan pilar ketiga transformasi kesehatan didukung dengan adanya Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mengatur tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan serta amanat *International Health Regulation (IHR) Tahun 2005*.



Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan terutama terkait koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (*PHEIC*) di pintu masuk negara dengan semua *stake holder* di pelabuhan dan bandara dan instansi terkait lainnya dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang baik pada level global, nasional maupun lokal daerah.

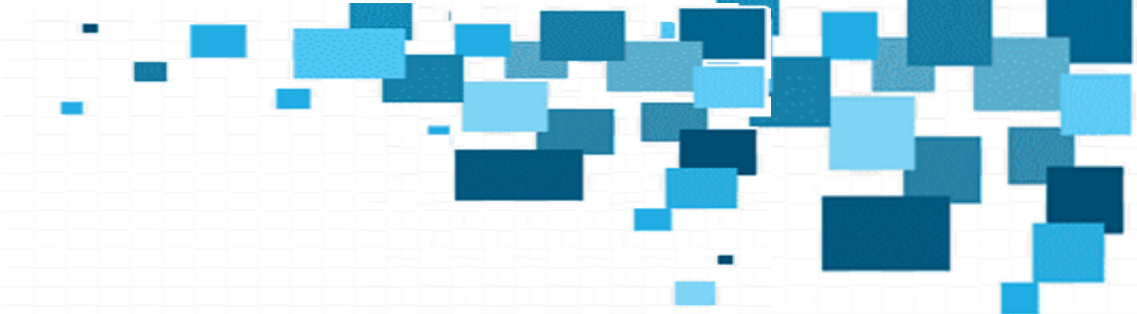
Untuk menghadapi kondisi tersebut di atas, telah ditetapkan kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dijanjikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dengan Direktur Jenderal P2P dan rata-rata tercapai lebih dari 100%, yaitu untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, dengan hasil indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN telah tercapai 0,99 dari target 0,96, sehingga capaian kinerjanya 103,13%.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah tercapai 100% sesuai target, sehingga capaian kinerja 100%.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara telah tercapai 1 sesuai target, sehingga capaian kinerjanya 100%.

Sedangkan sasaran kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan hasil indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja anggaran telah tercapai 95 dari target 88, sehingga capaian kinerjanya 107,95%.
2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran telah tercapai 96,30 dari target 93, sehingga capaian kinerjanya 103,55%.
3. Kinerja implementasi WBK satker telah tercapai 84,22 dari target 75, sehingga capaian kinerjanya 112,29%.
4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah tercapai 98,72% dari target 85%, sehingga capaian kinerjanya 116,14%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian ini antara lain kegiatan dan anggaran dilakukan secara lebih terintegrasi dan optimalisasi kegiatan untuk peningkatan capaian output serta adanya perluasan target cakupan kegiatan di pelabuhan dan bandara dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp21.963.488.803,00 atau 99,65% dari pagu anggaran sebesar Rp22.040.147.000,00.



Untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja Tahun 2023 yang merupakan tahap keempat dari masa 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Periode 2020 – 2024, maka diperlukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Penguatan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM terutama baik keahlian sesuai jabatan maupun dalam penguasaan teknologi dan informasi.
3. Peningkatan dan penguatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.
4. Penguatan dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi berbasis digital, untuk mempercepat *update* informasi dan pengelolaan program.
5. Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan lintas sektor dan lintas program.
6. Penguatan Jejaring Kemitraan dan Koordinasi dengan instansi di wilayah pelabuhan dan bandara untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan kekarantina kesehatan.

Selain itu, diperlukan pengembangan program kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang agar dapat lebih selaras dengan perkembangan penetapan dan upaya pencapaian indikator kinerja program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I

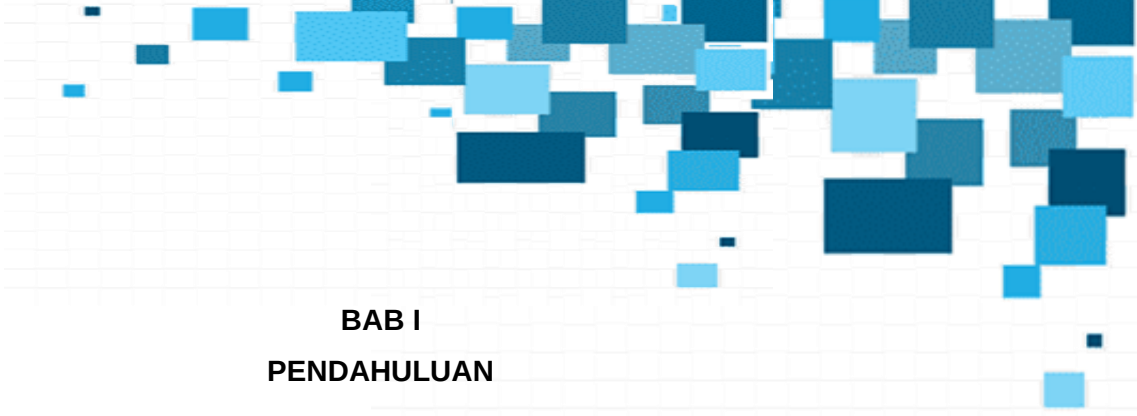
PENDAHULUAN



KKP

Kelas II Banjarmasin

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional secara optimal dapat tercapai apabila pembangunan kesehatan dapat terwujud. Hubungan keduanya sangat jelas dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena masyarakat yang sehat dapat memiliki pendidikan yang lebih baik, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, pendapatan dan tabungan yang lebih baik, perilaku dan kondisi hidup yang lebih sehat, serta stabilitas sosial yang lebih stabil. Pembangunan kesehatan di Indonesia harus menjadi prioritas agar pembangunan nasional berhasil. Pembangunan nasional yang tidak memperhatikan pembangunan kesehatan, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan nasional yang memperhatikan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan di Indonesia yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024 menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam kondisi kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu cermin indikator utama keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal ini mengingat Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai *SDGs (Sustainable Development Goals)*.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai *SDGs (Sustainable Development Goals)* tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya antara lain dengan memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga terbit Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Terbitnya undang-undang kesehatan ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan, dimana Kementerian Kesehatan berupaya dengan memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan dengan melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup 6 jenis transformasi, seperti : transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Dalam upaya mendukung penerapan transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas dan fungsi kekarantina kesehatan yang termasuk dalam pilar ketiga yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik ditengah ancaman kesehatan global. Apabila dilihat lebih jauh, cakupan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan yang terkait langsung dengan fungsi kekarantina kesehatan yaitu : Memperkuat ketahanan tanggap darurat dengan melakukan jejaring nasional surveilans berbasis laboratorium, mempersiapkan tenaga cadangan tanggap darurat, dan melakukan Table Top Exercise kesiapsiagaan krisis.

Untuk memperkuat pelaksanaan pilar ketiga transformasi kesehatan didukung dengan adanya Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mengatur tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan serta amanat *International Health Regulation (IHR) Tahun 2005*.

Salah satu fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang kesehatan yang meliputi perubahan *mind-set* dan *culture-set* aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, dan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah digunakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Peraturan Presiden tersebut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah semakin menguatkan bahwa sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur sebagai salah satu persyaratan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan laporan kinerja perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang baik pada level global, nasional maupun lokal daerah, antara lain :

1. Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait vaksin meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jemaah yang akan melakukan umrah, namun faktor risiko di luar negara Arab Saudi masih sangat potensial perlu adanya kewaspadaan bagi pelaku perjalanan terutama yang memiliki riwayat penyakit *komorbid*.
2. Perkembangan penyakit Monkeypox di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2023, Indonesia kembali melaporkan 1 kasus tanpa ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit (transmisi lokal) yang memerlukan peningkatan kewaspadaan dini terhadap pelaku perjalanan yang keluar masuk di pelabuhan/bandara.
3. Dampak perubahan iklim global (*climate change*) yang dapat mempengaruhi kesehatan setiap orang di seluruh dunia dan mengalami peningkatan sepanjang abad ini serta tidak adanya upaya pencegahan yang bisa dilakukan kecuali kesiapsiagaan agar bisa menjaga kesehatan lebih saat terjadi perubahan iklim.
4. Pembangunan Sistem Ketahanan Kesehatan Global, harmonisasi standar protokol kesehatan global; serta pengembangan pusat studi dan manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang.
5. Kebijakan transformasi kesehatan yang terdiri dari 6 pilar merupakan upaya perbaikan sistem kesehatan, untuk mengatasi ketimpangan kesehatan, baik di dalam negeri, maupun ketimpangan kesehatan antar negara.
6. Pelabuhan dan Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*).

- 
7. Perkembangan teknologi dan pasar global mengakibatkan intensitas lalu lintas alat angkut yang semakin tinggi dan cepat, membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global. Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negative dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, social budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.
 8. Berbagai fenomena di wilayah Kalimantan Selatan antara lain : peningkatan lalu lintas orang yang melakukan perjalanan international atau ibadah umrah, tingginya volume lalu lintas kapal dalam karantina atau dari luar negeri, dan adanya pertumbuhan industri dan tambang di kawasan Kalimantan Selatan yang mengakibatkan lalu lintas para ekspatriat dan para pekerja asing melalui bandara serta kemungkinan perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara baru di Wilayah Kalimantan Timur.

Berbagai isu strategis yang terjadi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Kementerian Kesehatan dalam upaya cegah tangkal penyakit menular dan potensial wabah di pintu masuk Negara.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkantor di daerah atau Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Klasifikasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. KKP secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin termasuk klasifikasi KKP Kelas II.

2. Tugas

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya

penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

C. SUSUNAN ORGANISASI

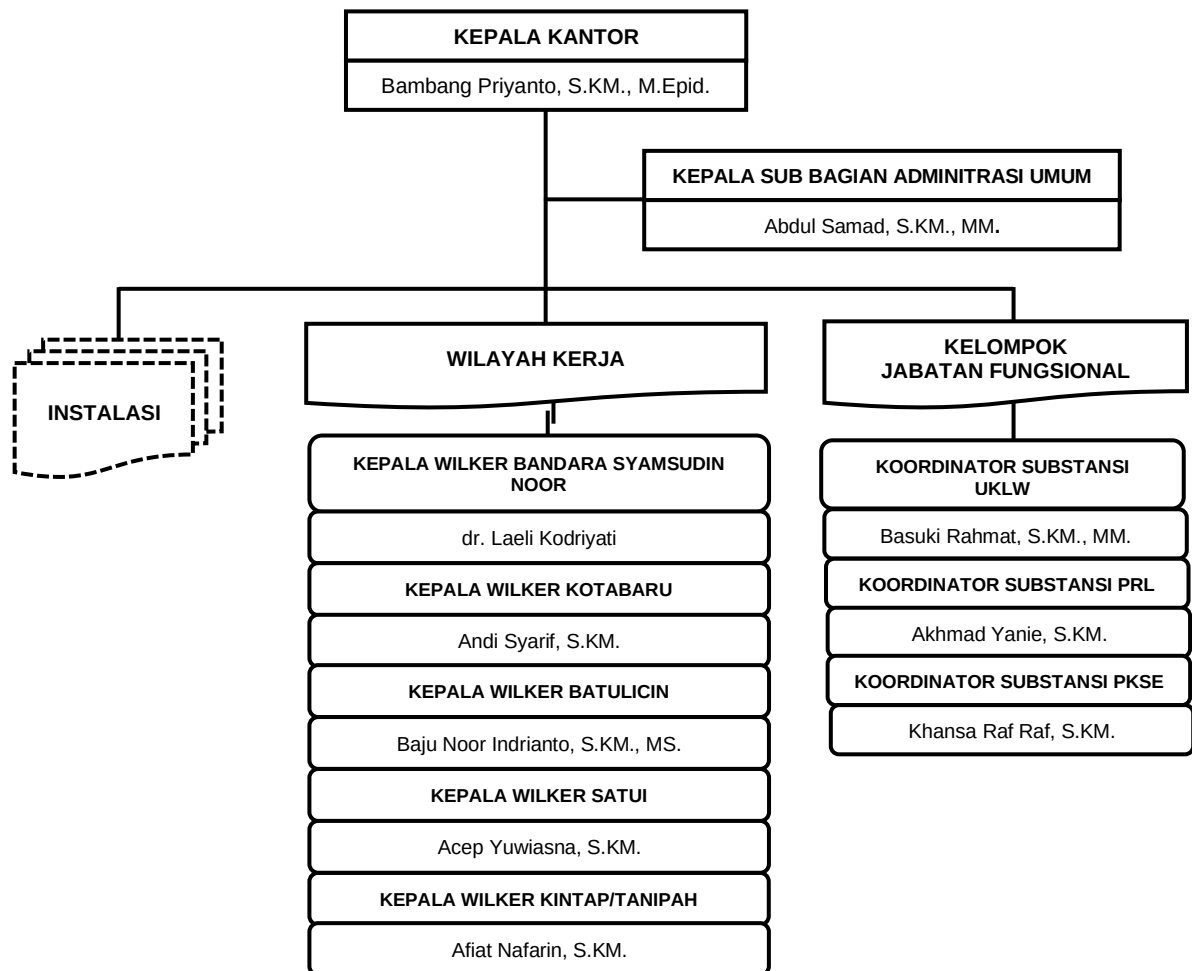
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan pelabuhan, dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sehingga struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melakukan Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, Pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan Masyarakat, pengelolaan data dan informasi, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, Persuratan, dan kerumahtanggaan.

2. Instalasi
Merupakan unit pelayanan nonstruktural.
3. Wilayah Kerja
Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, dapat dibentuk Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN



D. SUMBER DAYA MANUSIA

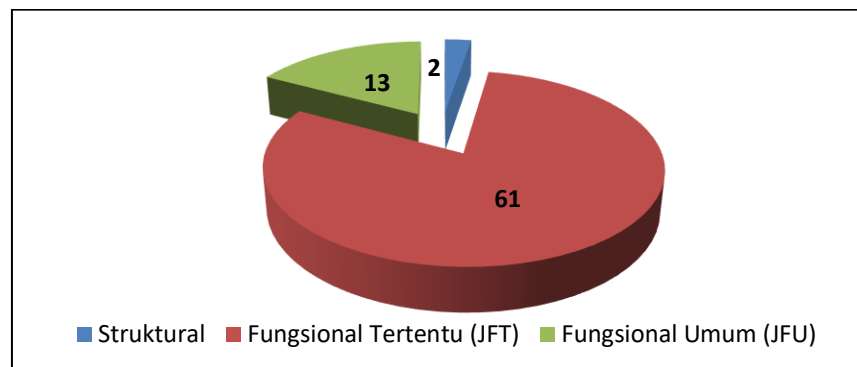
Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan Bulan Desember 2023 di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 73 orang, PPPK berjumlah 3 orang dan Tenaga PPNP berjumlah 31 orang.

Keadaan ini apabila dibandingkan dengan volume kegiatan dan beban kerja masih sangat kurang, sehingga masih diperlukan penambahan pegawai melalui mekanisme pengangkatan CPNS atau PPPK. Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang kekuatan personil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai berikut :

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Berdasarkan kelompok jabatan, dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Jabatan Struktural
- 2) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
- 3) Jabatan Fungsional Umum (JFU)



Grafik 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Dari grafik 1 menunjukkan bahwa pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin untuk Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional (JF) sebanyak 61 orang, dan Jabatan Pelaksana (JP) sebanyak 13 orang.

1) Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yaitu Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan Pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

2) Jabatan Fungsional (JF)

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari 61 orang dengan Jabatan Fungsional (JF) terdiri atas :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter Muda	2
2	Dokter Pertama	3
3	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	7
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3
6	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	2
7	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2
8	Epidemiolog Kesehatan Terampil	2
9	Sanitarian Ahli Madya	1
10	Sanitarian Ahli Muda	3
11	Sanitarian Ahli Pertama	2
12	Sanitarian Penyelia	2
13	Sanitarian Mahir	1
14	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
15	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2
16	Entomolog Kesehatan Mahir	2
17	Entomolog Kesehatan Terampil	1
18	Perawat Ahli Pertama	1
19	Perawat Penyelia	1
19	Perawat Mahir	2
20	Perawat Terampil	4
21	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1
22	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2
23	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1
24	Perencana Ahli Pertama	1
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
26	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
27	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
28	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
29	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Total		61

3) Jabatan Pelaksana (JP)

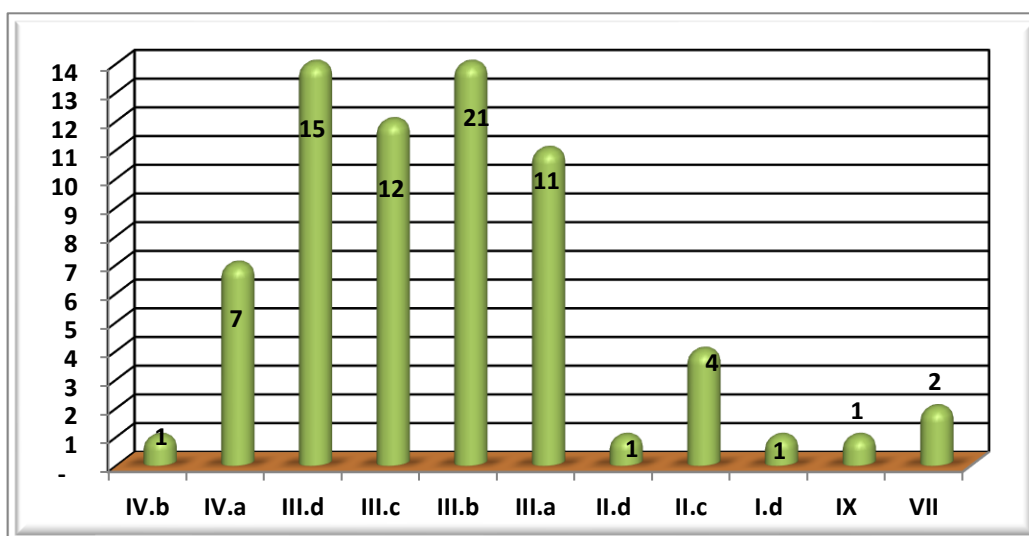
Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 13 orang dengan Jabatan Pelaksana (JP) terdiri atas :

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Pelaksana

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter	1
2	Perawat	1
3	Sanitarian Ahli	4
4	Sanitarian	1
5	Perencana	2
6	Analisis Keuangan	1
7	Pengelola BMN	1
8	Arsiparis	1
9	Pengemudi	1
	Total	13

b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

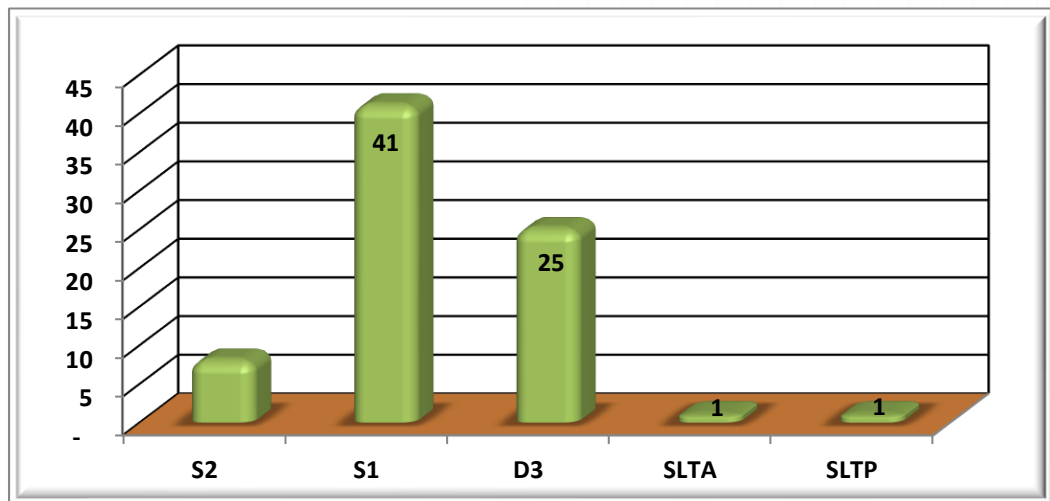
Golongan Ruang Pegawai yang terdapat pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin yang tertinggi Golongan IV.a dan terendah I.d. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada grafik 2 berikut ini :



Grafik 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

c. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin memiliki jenjang pendidikan tertinggi Pasca Sarjana (S2) dan terendah SMP. Untuk lebih jelasnya, data pegawai tersebut dapat dilihat pada grafik 3 berikut:



Grafik 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja secara optimal diperlukan semboyan atau **Motto Kerja** yang merupakan rangkaian kata yang memberi gambaran tentang prinsip kerja yang akan menjadi budaya kerja bagi seluruh ASN dan Non ASN dilingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin yaitu :



Tatap Bunglas

Bersih-Unggul-Netral-Gigih-Akuntabel-Sigap

B	<i>Bersih</i>	Pelayanan yang Bebas dari Pungli, Gratifikasi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
U	<i>Unggul</i>	Pelayanan Terbaik dengan SDM yang Unggul dan Profesional
N	<i>Netral</i>	Pelayanan yang tidak Memihak
G	<i>Gigih</i>	Pelayanan yang Tangguh dan Prima
A	<i>Akuntabel</i>	Pelayanan Paripurna yang dapat dipertanggungjawabkan
S	<i>Sigap</i>	Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Akurat

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada

Peraturan Pemerintah Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah yang memuat pencapaian program kegiatan dalam pencapaian tujuan kegiatan dengan segala faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai **maksud dan tujuan** sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menyelaraskan maksud dan tujuan penyusunan laporan ini, maka diperlukan Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yang disusun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2461 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan yang terdiri dari :

1. Bab I (Pendahuluan)
Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)
Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2023.
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)
Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2023, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja.
4. Bab IV (Penutup)
Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

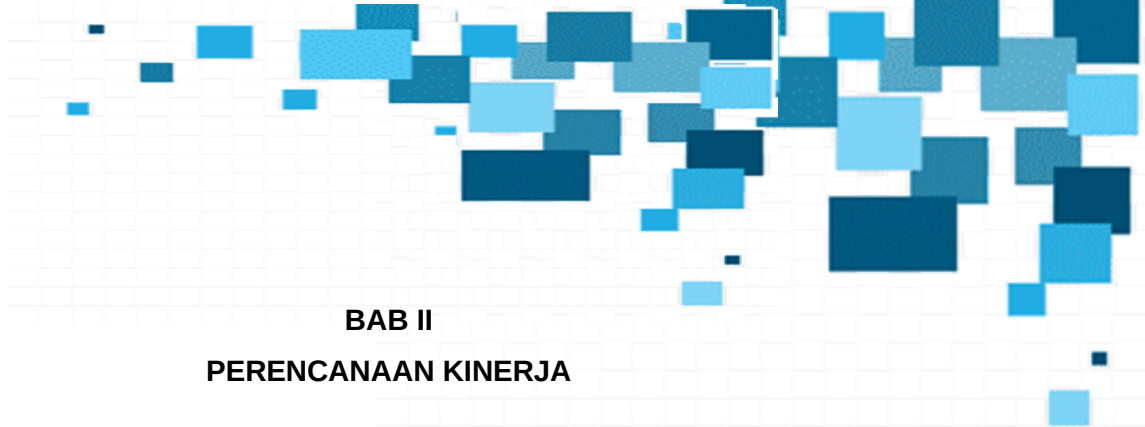
BAB II

PERENCANAAN KINERJA



KKP Kelas II Banjarmasin

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam penyusunan perencanaan kinerja terdiri atas tiga instrumen yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

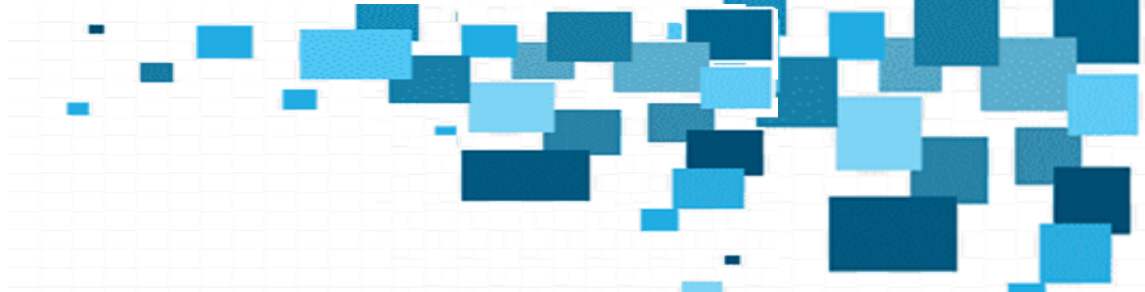
Perencanaan Kinerja terdapat perjanjian kinerja yang merupakan tekad dan janji; rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran berbagai upaya untuk mencapai Visi, Misi, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi agar mencapai target kinerja pada tahun terakhir masa pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 – 2024 di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 - 2024

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis dengan didukung terlaksananya Rencana Strategis, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana / prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result*



oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mengacu pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020 - 2024 dan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang diambil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yaitu sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 -2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong”, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan.

Sebagai wujud kesinambungan, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi di bidang kesehatan yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”, dengan meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”, melalui Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit.

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni “Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko”, dengan meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk Negara, meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit melaksanakan berbagai upaya yang bersifat preventif dan promotif dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara.

Berbagai kegiatan yang dilakukan agar lebih jelas, fokus dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan Sasaran Kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan terkait indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui penambahan indikator kinerja kegiatan yang baru pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor : PR.03.02/C.I/1142/2023 Tanggal 02

Februari 2023 perihal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan indikator direktif dari Menteri Kesehatan yaitu Persentase Realisasi Anggaran 95% yang diharapkan untuk lebih memudahkan dalam monitoring evaluasi atas realisasi anggaran di tahun berjalan, sehingga revisi target dan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 -2024

No	Sasaran	Sebelum			Menjadi		
		No	Indikator	Target	No	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	0,96	1	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	0,96
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,81	3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	1
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	84	4	Nilai kinerja anggaran	88
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75	6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
					8	Persentase Realisasi Anggaran	95%

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai hingga Tahun 2024 sesuai target kinerja setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 4. Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 -2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Meningkatkan Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah						
1	Jumlah pemeriksaan orang alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.001.644	1.808.639	1,998,906	-	-
	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	-	-	0,95	0,96	0,97
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	99%	100%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	80	90	0,80	1	1

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						
4	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	83	88	88
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian lapora keuangan	80%	-	-	-	-
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	93	90	93	94
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	60%	80%	85%	90%
8	Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	95%	95%

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil pencapaian kegiatan Tahun 2022 yang relevan dengan indikator kinerja kegiatan Tahun 2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2020-2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	0,96	3.074.613.000
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	556.658.000
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	1	365.180.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	88	451.380.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	17.022.954.000
		Kinerja implementasi WBK satker	75	350.562.000
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	154.720.000
		Persentase Realisasi Anggaran	95%	64.080.000

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sampai akhir Tahun 2023. Perjanjian Kinerja merupakan penetapan atas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahunnya mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2024 dan telah mendapat persetujuan anggaran. Adapun sasaran kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	0,96	3.996.451.000
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	1	
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	88	18.043.696.000
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	
		Kinerja implementasi WBK satker	75	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	
		Persentase Realisasi Anggaran	95%	



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



KKP Kelas II Banjarmasin

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja organisasi adalah melalui mekanisme Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang tingkat capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang pada tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan terkait indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui penambahan indikator kinerja kegiatan yang baru sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor : PR.03.02/C.I/1142/2023 Tanggal 02 Februari 2023 perihal Penambahan Indikator dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan indikator direktif dari Menteri Kesehatan yaitu Persentase Realisasi Anggaran 95% yang diharapkan untuk lebih memudahkan dalam monitoring evaluasi atas realisasi anggaran di tahun berjalan sehingga mengakibatkan penyesuaian juga pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 2020 - 2024. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	0,96	0,99	103,13
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	1	1	100
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	88	95	107,95
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	96,30	103,55
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75	84,22	112,29
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	98,72%	116,14
		8	Persentase Realisasi Anggaran	95%	99,65%	104,89
	Rata-rata Capaian Kinerja					106,00

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada bulan Januari – Desember 2023 terlihat dari hasil pencapaian masing-masing indikator dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,99%. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian Kinerja (%)		Selisih Capaian Kinerja
				2022	2023	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	100	103,13	3,13
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	101,01	100	(1,01)
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	125	100	(25)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Capaian Kinerja (%)		Selisih Capaian Kinerja	
				2022	2023		
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	106,40	107,95	1,55	
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	103,99	103,55	(0,44)	
		6	Kinerja implementasi WBK satker	103,73	112,29	8,56	
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	105,52	116,14	10,62	
		8	Persentase Realisasi Anggaran	0	104,89	104,89	
		Rata-rata Capaian Kinerja			106,52	106,15	

Meskipun pada tahun 2023 capaian kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, namun secara rata-rata sebanding dengan tahun 2022, meskipun terdapat perbedaan sebesar 0,37.%, karena adanya penetapan kenaikan target dibandingkan tahun sebelumnya dan penambahan jumlah indikator yang semula 7 indikator menjadi 8 indikator, sehingga nilai pembagi menjadi lebih besar. Selain itu, terdapat 2 target indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan pada nilai maksimal dan tidak memungkinkan untuk mencapai > 100%. Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dapat dipertahankan.

Untuk lebih jelasnya terkait hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan per sasaran kegiatan mulai dari pengertian, definisi operasional, rumus / cara perhitungan, capaian indikator, Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RAK sampai dengan Tahun 2023, Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja Lain, Perbandingan Capaian Kinerja Secara Nasional, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Indikator Pertama :

Indeks Deteksi Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Adalah ukuran untuk menilai seberapa besar upaya deteksi faktor risiko penyakit yang telah dilakukan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.

b. Definisi Operasional

Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar (Bobot dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*); Rumus indeks adalah nilai empiris (*score/S*) dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal) :

$$indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$$

Adapun data capaian 4 parameter hasil pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang sesuai standar kekarantina kesehatan selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	% Capaian
Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai Standar	2,900,000	3,984,233	137,39
Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar	62,750	72,171	115,01
Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar	245	317	129,39
Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar	1,180	1,668	141,35

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator ini selanjutnya dilakukan perhitungan berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut :

Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Max	Cov Max	Score Max	Min	Score Min
1	2	3	4= (3/6*100)	5=2*4	6	7	8=2*7	9	10=2*9
Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600	100	120	600		
Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	115	115,0	575	100	120	600		
Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120,0	360	100	120	360		
Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600	100	120	600		
Total				2,135			2,160		0
				0.988426					

Hasil perhitungan metode USG adalah sebesar 0.946759259 atau 0.95. Sedangkan capaian indeks adalah perbandingan realisasi dan target nilai indeks yang telah ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Nilai indeks yang dihasilkan

B = Nilai indeks yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian nilai indeks yang dihasilkan

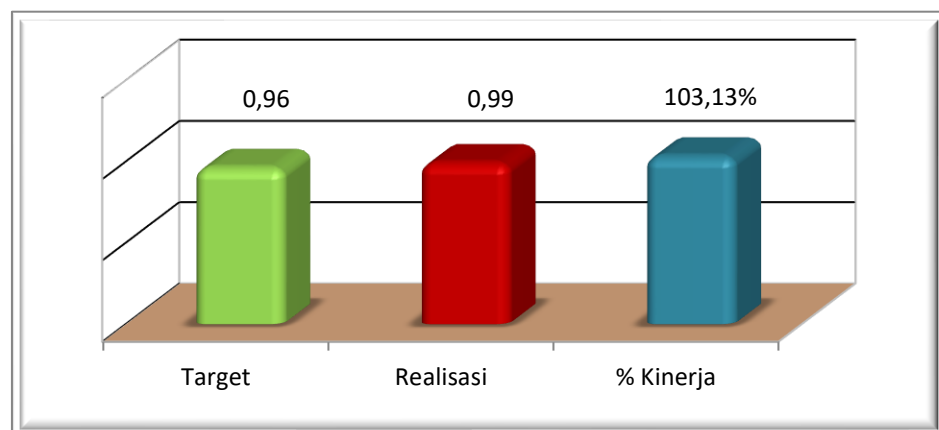
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN selama Tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{0.99}{0.96} \times 100\% = 103,13 \%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



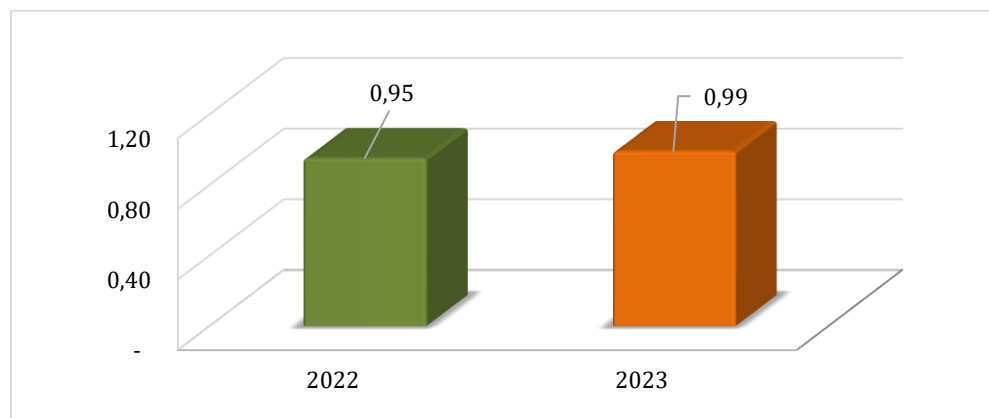
Grafik 4. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Dari grafik 4 menunjukan bahwa capaian indikator Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat tercapai sebesar 0.99 atau 103,13%

dari target yang ditetapkan atau dengan kata lain semua parameter telah dilakukan deteksi faktor risiko penyakit baik di bandara/pelabuhan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN ini merupakan hasil revisi atau penyesuaian indikator pada Tahun 2022, dimana terdapat perubahan nomenklatur indikator karena ada perubahan Renstra Kemenkes dan Hasil Reviu SAKIP Ditjen P2P terkait nomenklatur indikator kinerja yang memerlukan perubahan agar memenuhi kriteria SMART, sehingga capaian kinerja hanya dapat dibandingkan dengan Tahun 2022 karena baru berlaku sejak Juli 2022 dengan hasil perbandingan realisasi Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :



Grafik 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2022 dan 2023

Dari grafik 5 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya peningkatan jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan pasca pandemi Covid-19.

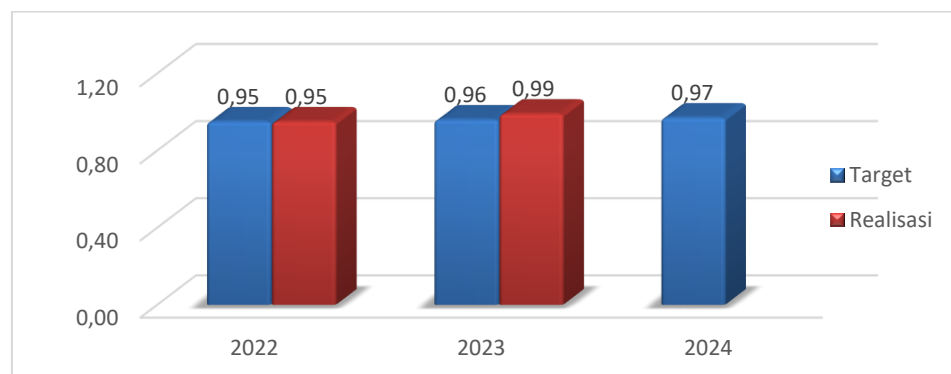
Namun apabila dilihat dari data sasaran kegiatan dapat dilakukan perbandingan antara Tahun 2020 s.d 2023. Pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan sasaran kegiatan orang, alat angkut dan barang, karena status pandemic Covid-19 yang sudah dicabut oleh Presiden pada Bulan Juni 2023 sehingga lalu lintas orang, alat angkut, dan barang juga meningkat karena hal ini diimbangi oleh kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan atau transaksi antar daerah atau antara Negara. Cakupan sasaran lingkungan juga mengalami peningkatan karena adanya penambahan dan penyesuaian titik lokasi pengawasan. Untuk lebih jelasnya data perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Kegiatan	Hasil Pemeriksaan			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Orang yang Diperiksa Sesuai Standar	1,987,384	2,215,359	3,416,210	3,984,233
Jumlah Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar	99,424	115,124	93,640	72,171
Jumlah Barang yang Diperiksa Sesuai Standar	165	264	297	317
Jumlah Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar	1,619	1,311	1,180	1,668

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan jumlah orang, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai standar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena sudah tidak ada lagi pemeriksaan kapal dalam karantina yang datang dari dalam negeri. Hal ini dikarenakan adanya penetapan status pandemi Covid-19 telah berakhir dan mengubah status faktual Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024, baru dapat dibandingkan mulai Tahun 2022, karena merupakan tahun kedua setelah perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan Target RAK hingga Tahun 2024 sebagai berikut :



Grafik 6. Perbandingan Realisasi Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Target RAK

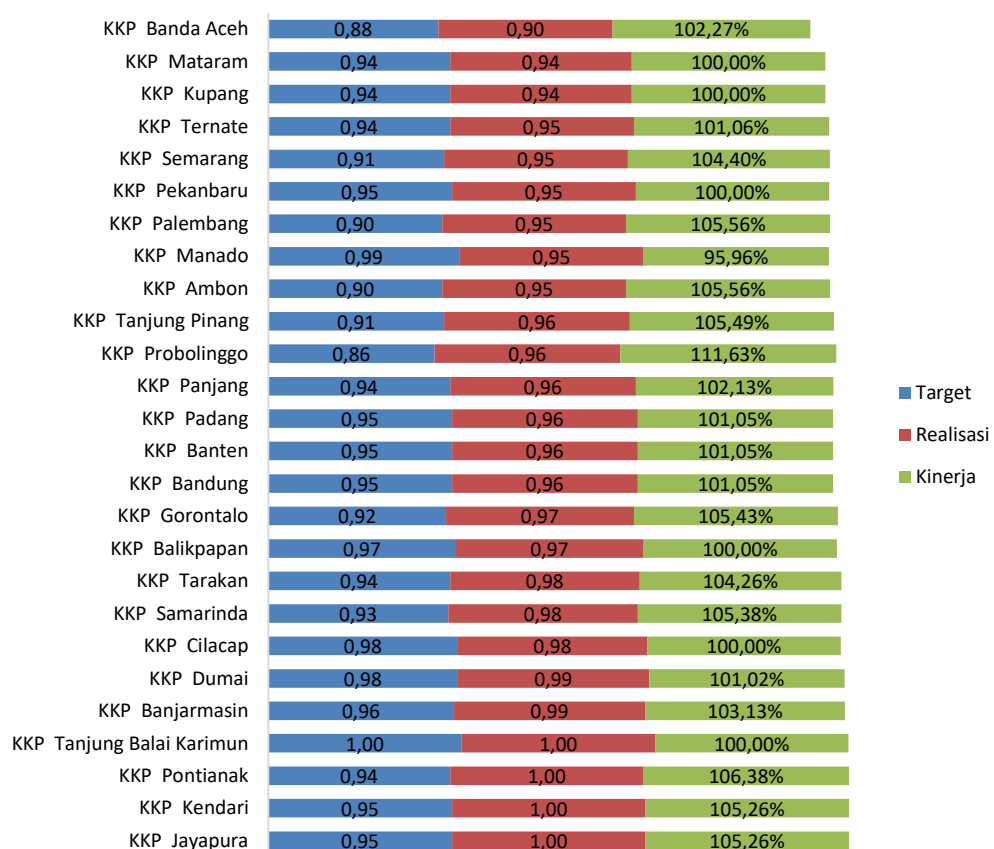
Dari grafik 6 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2023 tercapai dan sudah melampaui target 2023. Indikator kinerja tahun 2023 dan telah melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 0,97 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, sehingga proyeksi

target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya deteksi faktor risiko orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, kondisi tersebut seiring dengan peningkatan pengawasan di pintu masuk yang lebih intensif serta didukung dengan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor yang lebih baik.

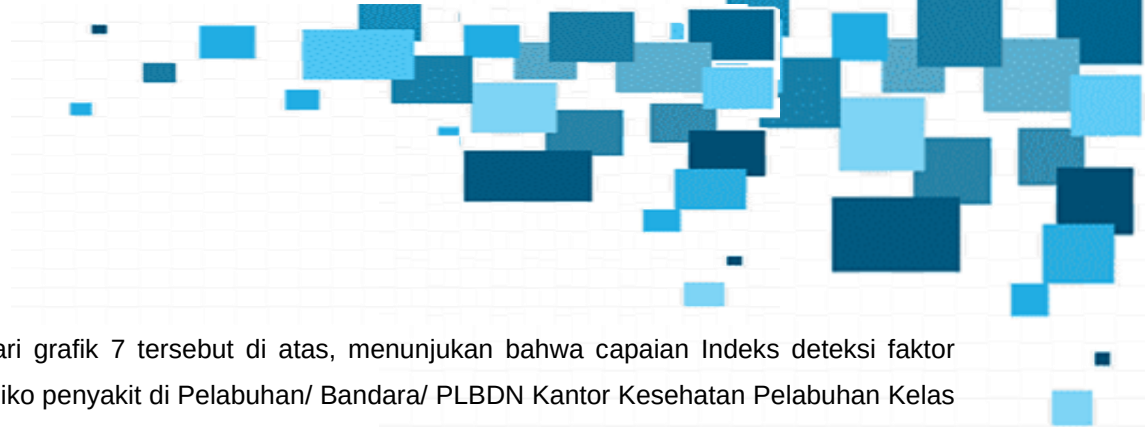
4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Namun, untuk indikator ini tidak bisa dibandingkan karena baik dalam dokume RAP maupun PK Ditjen P2P tidak terdapat indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini.

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance* Kemenkes dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut:



Grafik 7. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis
Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN



Dari grafik 7 tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan kelima dengan realisasi kinerja tertinggi untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kebijakan pencabutan status pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas orang, alat angkut dan barang serta peningkatan aktifitas masyarakat di wilayah buffer dan parameter.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat tercapai sebesar 0.99 atau 103,13% yang dipengaruhi oleh :

- 1) Peningkatan kewaspadaan melalui pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas orang dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan dan bandara;
- 2) Penetapan status pandemi Covid-19 telah berakhir dan mengubah status faktual Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023;
- 3) Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu sesuai Instruksi Dirjen P2P;
- 4) Penambahan titik lokus atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian risiko lingkungan hingga wilayah kerja;
- 5) Penetapan target volume output kegiatan telah mengikuti kebijakan perencanaan kegiatan;
- 6) Peningkatan ekspor batubara dari luar negeri pasca pandemic Covid19;
- 7) Pembangunan infrastruktur di dalam negeridan pembangunan pelabuhan - pelabuhan baru, khususnya persiapan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang terus dipacu oleh pemerintahan saat ini;
- 8) Adanya dukungan peraturan perundangan-undangan untuk pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara.
- 9) Komitmen bersama SDM pelaksana program di induk dan seluruh wilayah kerja dalam kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi:

- 1) Adanya keterbatasan SDM kekarantinaan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan belum sesuai standar dan analisis beban kerja.

- 2) Kurangnya respon dari pihak otoritas pelabuhan dan atau bandara (LPLS) dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan HIV dan TB
- 4) Adanya gangguan interkoneksi aplikasi SINKARKES baik dengan SIMPONI maupun dengan server di PUSDATIN sehingga tidak dapat mencetak dokumen hasil pemeriksaan yang berpengaruh terhadap rekap jumlah hasil pemeriksaan antara jumlah di aplikasi dengan bukti fisik pemeriksaan/rekap manual.

Pemecahan Masalah:

- 1) Mengajukan usulan CASN dan CPPK serta pengaturan penempatan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kekarantina kesehatan.
- 2) Melakukan pendekatan kepada pimpinan dan penanggungjawab operasional otoritas pelabuhan dan bandara untuk tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan.
- 3) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit HIV / TB dan potensi penularan akibat interaksi yang terjadi di lingkungan pekerjaan dan lalu lintas perjalanan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab Aplikasi SINKARKES di Direktorat SKK terkait permasalahan dan mensinkronkan jumlah hasil pemeriksaan.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)}$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 CKi : % Capaian Keluaran i
 RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$3,54 = \frac{((Rp. 3,074,613,000 \times 103,13\%) - Rp. 3,058,670,981)}{Rp. 3,074,613,000} \times 100\%$$

$$59\% = 50 \% \frac{3,54}{20} \times 50$$

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat tercapai sebesar 0,99 dengan capaian kinerja sebesar 103,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,96 dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp3.058.670.981,00 atau 99,48% dari pagu anggaran sebesar Rp3.074.613.000,00 yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,54 dengan nilai efisiensi sebesar 59% untuk capaian kinerja sebesar 103,13%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pertimbangan sasaran yang sama dan keterbatasan tenaga pelaksana, serta optimalisasi anggaran untuk peningkatan output kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN melalui kegiatan sebagai berikut :



Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker :

1) Koordinasi

Kegiatan ini Koordinasi Kekarantinaan Kesehatan di Bandara/pelabuhan merupakan kegiatan yang mendukung dalam mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit melalui kegiatan rapat kekarantinaan kesehatan dengan LP LS, koordinasi, konsultasi dan bimtek program P2P baik dari wilker ke pengelola program kantor induk maupun tingkat pusat ke Ditjen P2P sebanyak 23 kegiatan (209,09%) dari target 11 kegiatan.

2) Pelayanan Kesehatan Haji di Bandara

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang merupakan penyelenggaraan haji kedua setelah kondisi pandemik Covid-19 dengan pengurangan kuota melalui pembatasan usia Jemaah Haji, tahun ini penyelenggaraan haji Tahun 2023/1445 H dapat terlaksana dengan kuota normal bahkan ada tambahan kuota. Sejalan dengan kebijakan ini, maka kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji pada masa Embarkasi dan Debarkasi sebagai upaya pengendalian kekarantinaan kesehatan dapat berjalan secara optimal dengan melibatkan berbagai lintas sektor dan program terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pelayanan kesehatan pra embarkasi, embarkasi dan debarkasi serta pasca debarkasi dengan sasaran sebanyak 5.713 orang jamaah haji (163,23%) dari target 3.500 orang jamaah haji.

3) Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang akan melintasi pelabuhan dan bandara dapat terlayani dengan baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelayanan kesehatan situasi gawat darurat, pelayanan vaksinasi, verifikasi terhadap rumah sakit dan klinik yang mengajukan persetujuan pelayanan vaksinasi internasional, pengawasan terhadap rumah sakit dan klinik yang melaksanakan penerbitan dokumen ICV, melakukan pertemuan evaluasi LP/LS dan Klinik/RS penerbitan dokumen ICV dan pelayanan kesehatan lainnya dengan sasaran sebanyak 20,000 orang (100%).

4) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Pes

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

a) Pemetaan

Pemetaan daerah Perimeter yang menjadi tempat potensial perkembangbiakan tikus di pelabuhan/bandara. Membagi titik lokasi untuk memudahkan pengawasan / pengendalian.

b) Persiapan Bahan dan Alat

Melakukan pengadaan bahan operasional kegiatan untuk pelabuhan induk dan semua wilayah kerja berupa: umpan tikus, karung tikus, handscoon, masker, kapas, stiker, sisir rapat, dan kantong kresek.

c) Pemasangan Perangkap Tikus

Dilaksanakan dengan memasang perangkap tikus pada bangunan-bangunan di area pelabuhan induk dan semua wilayah kerja dengan target sebesar 63 layanan. Jumlah perangkap tikus disesuaikan dengan luas dan kondisi setiap pelabuhan dan bandara.

d) Identifikasi Tikus dan Pinjal

Melakukan pengadaan bahan operasional kegiatan untuk Pelabuhan induk dan semua wilayah kerja berupa alkohol dan alat tulis kantor untuk pelaksanaan administrasi kegiatan. Kegiatan identifikasi yaitu tikus yang tertangkap akan disisir untuk mendapatkan pinjalnya, selanjutnya dilakukan identifikasi jenis /spesiesnya untuk mendapatkan angka Index Pinjal yang merupakan indikator tingkat kepadatan vektor pembawa penyakit Pes di pelabuhan. Pengendalian dilakukan pada saat ditemukan hasil indeks pinjal > 1 dengan capaian kegiatan selama satu tahun sebesar 100%.

5) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit DBD

Kegiatan yang dilakukan berupa Survei larva *Aedes aegypti* yang dilakukan dengan sistem Random Sampling pada bangunan / rumah yang menjadi sampel pengamatan dengan metode inspeksi (visual) di daerah Buffer, dan pada semua bangunan di area perimeter pelabuhan induk dan wilayah kerja sebesar 102 layanan (100%). Survei ini melibatkan warga masyarakat (kader) dari daerah buffer/penyangga pelabuhan. Hasil survey yang ditemukan/positif jentik akan langsung dibubuhkan larvasida pembunuh jentik.

6) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Malaria

Kegiatan yang dilakukan berupa:

a) Survei perindukan Jentik *Anopheles*

Survey jentik *Anopheles* dilaksanakan di wilayah kerja endemis dengan kondisi geografis banyak terdapat danau / laguna yang berpotensi menjadi tempat perindukan vektor malaria (*Anopheles* sp.).

b) Survey Nyamuk *Anopheles*

Survey Nyamuk *Anopheles* dilaksanakan di wilayah kerja endemis yaitu di pelabuhan wilayah kerja Kotabaru, Batulicin, Satui, Tanipah, dan Pos Sungai Puting dengan target tercapai sebesar 12 layanan (100%).

7) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Diare

Survey vektor penyakit Diare berupa Survey Lalat dan survey kecoa. Survey lalat dilakukan dengan mengukur kepadatan populasi lalat dengan alat fly grill pada tempat – tempat yang berpotensi mengundang lalat di area perimeter pelabuhan dan bandara. Survey kecoa dilakukan dengan mengukur kepadatan kecoa yaitu dengan memasang perangkap kecoa di wilayah kerja Pelabuhan dan bandara. Target area yang dilakukan survey Tahun ini sebesar 120 layanan untuk pelabuhan induk dan wilayah kerja dan tercapai 100%.

8) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian HIV AIDS yang berkoordinasi dengan petugas dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Adapun sasaran layanan ini adalah yang memiliki potensi berisiko terkena HIV AIDS di pelabuhan/ bandara seperti TKBM di pelabuhan, perusahaan pelayaran, masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara, serta instansi pemerintah disekitar pelabuhan dan bandara sebanyak 27 layanan (686 orang) yang diperiksa atau 135% dari target 20 layanan (500 orang).

9) Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit TB

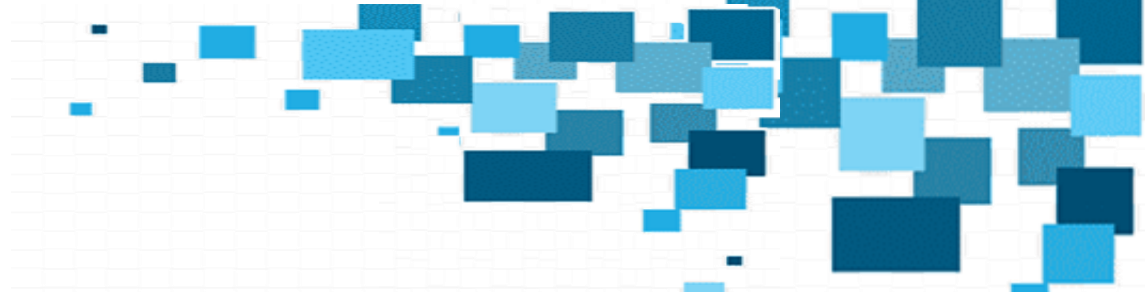
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka deteksi dini terduga TB di seluruh wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin yang berkoordinasi dengan petugas dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Adapun sasaran layanan ini adalah yang memiliki potensi berisiko terkena TB Paru di pelabuhan/ bandara seperti TKBM di pelabuhan, perusahaan pelayaran, masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara, instansi pemerintah disekitar pelabuhan dan bandara sebanyak 14 layanan (686 orang) yang diperiksa atau 140% dari target 10 layanan (500 orang).

10) Pengadaan Alat / Bahan Kekarantina Kesehatan di Pintu Masuk

Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor dan BPP, sanitasi lingkungan dan bahan/alat medis dan non medis untuk pengawasan di pintu masuk untuk penanganan faktor risiko sebanyak 4 paket (100 %).

11) Pelaksanaan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria

Pelaksanaan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria dilaksanakan di daerah yang memiliki risiko tinggi penularan Malaria, khususnya daerah yang menjadi wilayah kerja KKP Banjarmasin, yaitu Wilker Batulicin dan Wilker Kotabaru. Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan posko pelayanan kesehatan



pada saat arus mudik lebaran dan Natal / Tahun Baru pada 2 lokasi di Pelabuhan laut penumpang (Pelabuhan Kotabaru dan Pelabuhan Batulicin) dan 2 lokasi di Bandara (Bandara Bersujud Batulicin dan Bandara Sjamsir Alam Kotabaru) dengan 2 kali kegiatan (Arus Natal/Tahun Baru dan Lebaran) di masing-masing tempat. Pelayanan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan Pemeriksaan RDT Malaria, kegiatan surveilans dengan wawancara dan pembagian kuesioner, serta edukasi atau penyampaian media KIE dengan sasaran sebanyak 20 layanan atau 2,000 orang dan tercapai 100%.

Berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Pemeriksaan secara berkala lalu lintas orang, barang, alat angkut dan lingkungan pada semua pelabuhan dan bandara di seluruh wilayah kerja.
- 2) Memperkuat jejaring dengan lintas sektor dan lintas program terkait tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
- 3) Melakukan evaluasi atas permasalahan di lapangan dan segera melakukan upaya pemecahan masalah.

Indikator Kedua :

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

a. Pengertian

Adalah pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang telah dilakukan pemeriksaan di pintu masuk. Angka ini menggambarkan besaran faktor risiko yang telah ditemukan dari hasil pemeriksaan dan telah dilakukan tindakan pengendalian.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang alat angkut barang dan lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan

B = Jumlah faktor risiko yang ditemukan

% C = Persentase pencapaian faktor risiko yang dikendalikan

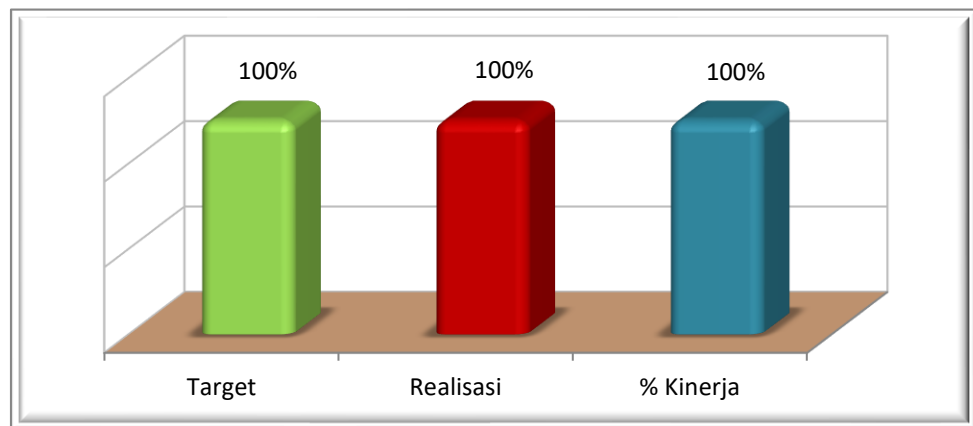
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan selama Tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 8. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Dari grafik 8 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dapat tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan atau dengan kata lain semua faktor risiko dapat dikendalikan yaitu yaitu pemeriksaan orang sebanyak 3.594

orang, pemeriksaan alat angkut sebanyak 18 kapal, pemeriksaan barang tidak ada, dan pemeriksaan lingkungan sebanyak 92 titik/lokasi.

Adapun data rincian hasil pengawasan faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Kegiatan	FR yang ditemukan	FR yang dikendalikan	% Capaian
Pemeriksaan Orang	3,594	3,594	100
Pemeriksaan Alat Angkut	18	18	100
Pemeriksaan Barang	0	0	100
Pemeriksaan Lingkungan	92	92	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dapat tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

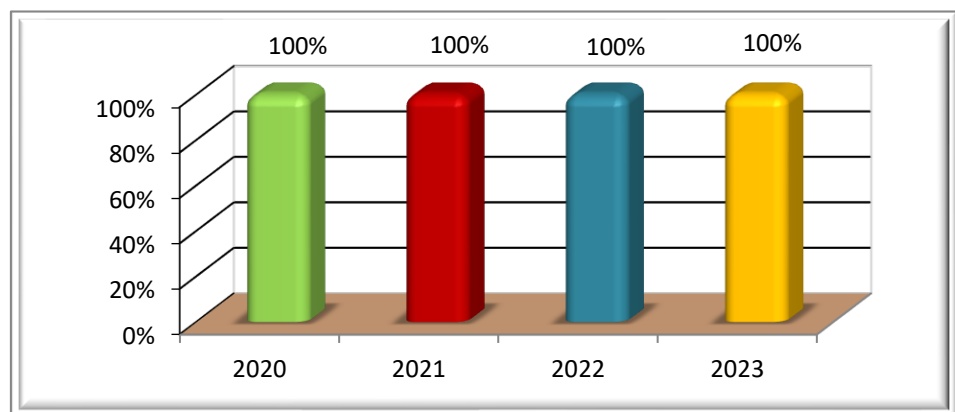
Indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2023 masih sama dengan 2020 – 2022 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya.

Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2020 - 2023 dapat tercapai 100% dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Capaian kinerja ini dapat tercapai karena adanya sinergi para pengelola program dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan faktor risiko dan upaya pengendalian yang segera dilakukan untuk semua faktor risiko yang ditemukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini.

Kegiatan	Faktor Risiko yang Ditemukan				Faktor Risiko yang Dikendalikan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pemeriksaan Orang	1,817	1,552	8,155	3,594	1,817	1,552	8,155	3,594
Pemeriksaan Alat Angkut	31	41	24	18	31	41	24	18
Pemeriksaan Barang	165	264	1	0	165	264	1	0
Pemeriksaan Lingkungan	454	460	69	92	454	460	69	92

Berdasarkan tabel di atas terlihat penurunan faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2023 berupa pemeriksaan orang, hal ini dikarenakan

adanya penetapan bahwa vaksinasi meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib untuk calon jamaah umroh. Pada faktor risiko pemeriksaan alat angkut juga mengalami penurunan karena berkurangnya juga factor risiko yang ditemukan pada alat angkut. Sedangkan factor risiko ditemukan dan dikendalikan pada pemeriksaan lingkungan meningkat karena adanya penambahan dan perluasan titik lokus pengawasan sesuai dengan meningkatnya aktifitas masyarakat. Sedangkan apabila dilihat dari persentase capaian bahwa semua faktor risiko yang ditemukan pasti akan dikendalikan dari target yang ditetapkan, maka hasil perbandingan realisasi Tahun 2020 s.d 2023 sebagai berikut :

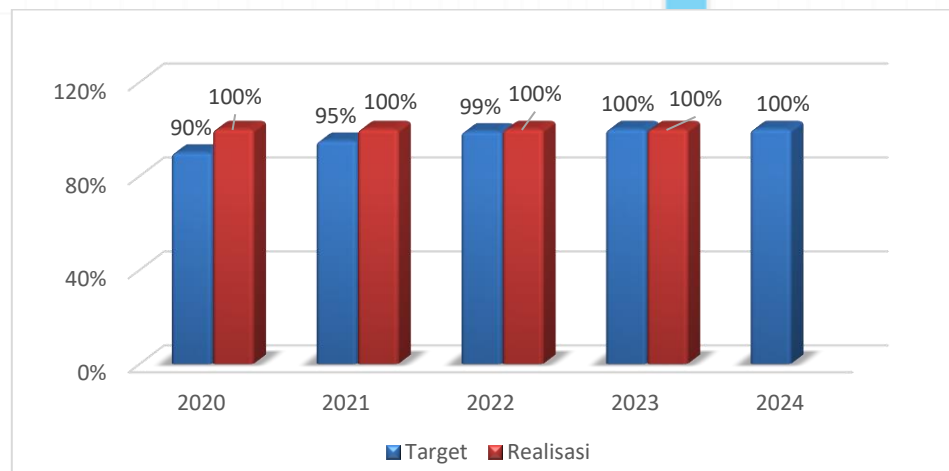


Grafik 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s.d 2023

Dari grafik 9 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2023 semua faktor risiko yang ditemukan dapat dikendalikan dengan baik dan telah dilakukan tindakan sesuai kondisi masing-masing faktor risiko.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun keempat dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan 2023 yaitu sebesar 100% sesuai target sebesar 100%.



Grafik 10. Perbandingan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target RAK

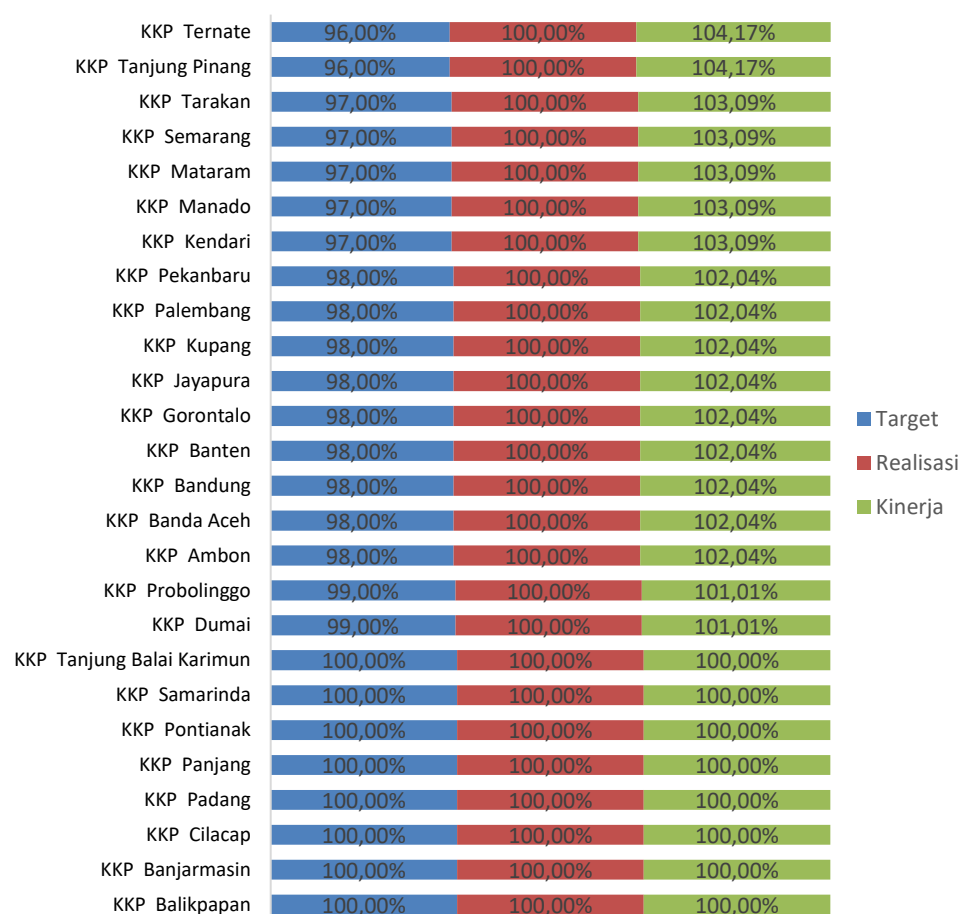
Dari grafik 10 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023 telah tercapai sesuai target jangka menengah hingga 2024 sebesar 100% yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, sehingga proyeksi target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024. karena adanya upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk yang telah dilakukan secara optimal, seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan numenklatur indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan, sedangkan indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sesuai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat nasional dengan satuan kerja Tahun 2023. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan capaian Ditjen P2P Tahun 2023 :

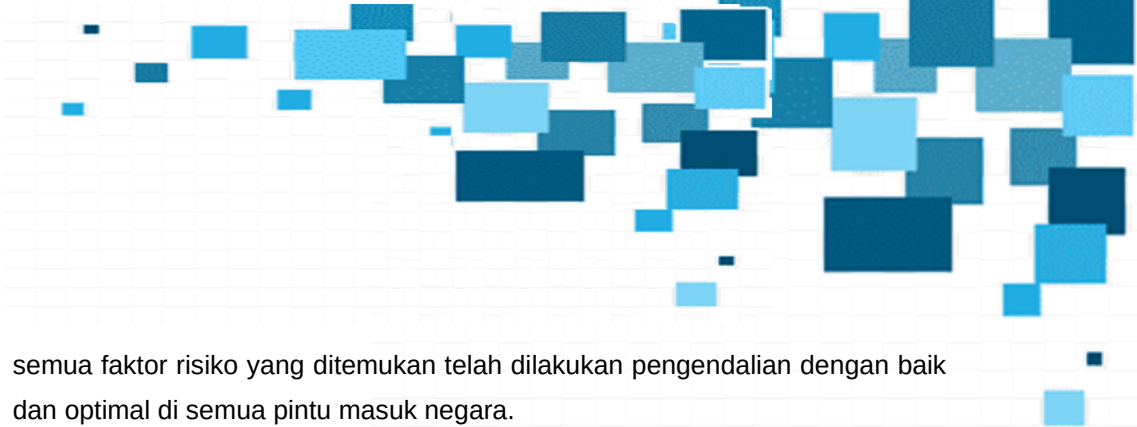
Indikator RAP / Renstra	Target	Realisasi	Indikator RAK	Target	Realisasi
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	97%	96%	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100%	100%

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja satker lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata target dan realisasi indikator RAP/Renstra, yang berarti masih terdapat faktor risiko yang ditemukan di pintu masuk yang belum dikendalikan, meskipun pencapaian telah di atas target. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance* Kemenkes dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :



Grafik 11. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Dari grafik 11 tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan kedua dengan realisasi kinerja tertinggi untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa



semua faktor risiko yang ditemukan telah dilakukan pengendalian dengan baik dan optimal di semua pintu masuk negara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dapat tercapai sebesar 100% sesuai target kinerja yang dipengaruhi oleh :

- 1) Peningkatan intensitas pengawasan lalu lintas orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- 2) Pemeriksaan orang, barang, dan alat angkut dalam karantina hanya dilakukan pada kedatangan kapal dari luar negeri.
- 3) Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu sesuai Instruksi Dirjen P2P.
- 4) Penguatan kapasitas SDM dalam penanganan KKM di Pintu masuk.
- 5) Penguatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kapasitas SDM di Pintu Masuk.
- 6) Adanya peningkatan faktor risiko lingkungan yang meliputi TPM dan vektor karena aktivitas masyarakat wilayah Pelabuhan juga meningkat pasca pandemi covid 19.
- 7) Penetapan bahwa vaksinasi meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib untuk calon jamaah umroh.
- 8) Dukungan peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di pintu masuk.

Adapun upaya pengendalian, masalah/kendala yang dihadapi, pemecahan masalah, penanggungjawab kegiatan, LP / LS yang dilibatkan dan peran LP / LS yang dilaksanakan pada masing-masing faktor risiko dapat dilihat melalui matriks berikut ini :

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
Pemeriksaan Orang	Rujukan	Pada kegiatan debarkasi haji, ada jamaah haji yang datang ke tanah air dengan indikasi rujukan akan tetapi pihak keluarga Jamaah Haji tersebut menolak untuk dirujuk. Hal ini akan berpotensi terjadi hal yang tidak diinginkan dan berdampak buruk bagi Kesehatan jamaah haji tersebut	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi	Substansi UKLW	Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi: memberikan himbauan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota agar memberikan edukasi kepada Calon Jamaah Haji terkait dengan kewajiban pelayanan Kesehatan pada saat debarkasi haji terutama permasalahan rujukan bagi Kesehatan jamaah haji
	Laik Terbang	Peraturan yang disampaikan oleh pihak maskapai kepada calon penumpang tidak sesuai dengan peraturan laik terbang yang berlaku, terutama tentang usia kehamilan yang dibolehkan untuk melakukan penerbangan	Koordinasi tentang peraturan laik terbang yang berlaku	Substansi UKLW	Maskapai	Maskapai: Menyampaikan informasi yang sesuai dengan peraturan laik terbang yang berlaku
		CJH yang diberangkatkan dari daerah kabupaten/kota ke asrama haji embarkasin Banjarmasin ada yang berstatus tidak laik terbang karena kesehatannya belum memenuhi persyaratan untuk melakukan penerbangan	Koordinasi tentang persyaratan laik terbang bagi calon jamaah haji dan memperketat pemeriksaan di daerah	Substansi UKLW	Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi: Menghimbau kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota agar memperketat pemeriksaan Kesehatan di daerah masing-masing sehingga CJH yang diberangkatkan ke asrama haji berstatus laik terbang
	Vaksinasi Meningitis	Capaian tidak mencapai target disebabkan penetapan bahwa vaksinasi meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib untuk calon jamaah umroh	Membuat konten edukasi tentang pentingnya vaksinasi meningitis bagi pelaku perjalanan ke luar negeri yang diupload di media social agar masyarakat tertarik untuk melakukan vaksinasi meningitis	Substansi UKLW	PPIU	PPIU : Memberikan informasi kepada Jamaah Umroh
	Vaksinasi Yellow Fever	Jumlah vaksin yang didistribusikan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin kurang mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap vaksin YF	Mengarahkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi ke fasilitas kesehatan yang diberikan izin untuk penerbitan ICV dan Membuat surat permohonan permintaan vaksin YF ke pusat	Substansi UKLW	Agen Pelayaran, Faskes yang mempunyai izin penerbitan ICV, Dirjen P2P	Agan pelayaran: Memberikan informasi kepada ABK Faskes: Memberikan pelayanan yang sesuai standar kes bagi ABK Dirjen P2P: Mendistribusikan vaksin YF

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
Pemeriksaan Orang	Tolak Berangkat di Bandara/ Pelabuhan	Kurangnya pengetahuan penumpang pesawat tentang persyaratan kelaikan terbang, sehingga apabila ada penumpang yang ditolak berangkat maka akan timbul permasalahan di ruang poliklinik KKP di Bandara	Menghimbau kepada maskapai dan meminta bantuan kepada pihak AVSEC Angkasa Pura untuk mendampingi petugas	Substansi UKLW	Maskapai, AVSEC PT Angkasa Pura	Maskapai: Mensosialisasikan persyaratan kelayakan terbang AVSEC PT Angkasa Pura: mendampingi agar tidak ada keributan
Pemeriksaan Alat Angkut	Tindakan Penyehatan Alat Angkut/ SSCC (Disinseksi dan fumigasi)	Pihak owner alat angkut (Kapal penumpang/komersial) yang high risk menolak dilakukan tindakan pengendalian pada kapalnya dengan alasan kapal harus segera berangkat dan terancam merugi sehingga fumigasi terlambat dilaksanakan.	Memberikan penjelasan, edukasi dan pemahaman bahwa apabila terdapat factor risiko kapal harus dilakukan tindakan penyehatan (disinseksi/ fumigasi) di pelabuhan tujuan.	Substansi PRL	Agen Pelayaran kapal yang bersangkutan , Pest Control yang ditunjuk	Agen Pelayaran: Melakukan Koordinasi antara Pihak Kapal dengan petugas dan Pest Kontrol yang ditunjuk dan Menyiapkan Sarana Transportasi Pest Kontrol: Melakukan Tindakan Penyehatan (fumigasi/desinseksi) pada kapal
	One Month Extention	Kurangnya pemahaman pihak keagenan kapal terkait pemberian One Month Extention (Sertifikat Sanitasi Kapal Perpanjangan 30 hari)	Memberikan penjelasan terkait pemberian One Month Extention (Sertifikat Sanitasi Kapal Perpanjangan 30 hari)	Substansi PRL / PKSE	Keagenan Kapal	Berkoordinasi dengan pemilik kapal dan keagenan pada pelabuhan berikutnya untuk dapat dilakukan tindakan sanitasi
Pemeriksaan Lingkungan	Spraying	Kondisi sanitasi pelabuhan atau terminal penumpang cenderung sering dijumpai kepadatan lalat Tinggi akibat pengangkutan sampah tidak dilakukan setiap hari dan sering terlambat	Memberikan rekomendasi perbaikan pada otoritas pelabuhan dan pihak pengelola sarana sanitasi dasar di wilayah pelabuhan untuk melakukan pengelolaan sampah yang tepat	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin, PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin, KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
		Masih cukup tingginya kepadatan lalat di wilayah Pelabuhan Banjarmasin	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak operator pelabuhan (PT. Pelindo III Banjarmasin) terkait perbaikan sanitasi lingkungan pelabuhan	Substansi PRL		KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	Penanggung Jawab Kegiatan	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
Pemeriksaan Lingkungan	Fogging	Fogging sebagai upaya SKD (sistem kewaspadaan dini) diperlukan dalam rangka mitigasi tingginya angka house index vektor DBD, namun warga masyarakat di salah satu lokus wilayah kerja menolak difogging selama tidak ada kasus infeksi DBD meskipun di lingkungannya kepadatan vektor /House Index > 1	Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kader kesling yang telah dilatih	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin, PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin, KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap, Kelurahan setempat, dan Puskesmas setempat	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan) : Mengelola sarpras di pelabuhan Puskesmas : memberikan data awal kasus DBD dan Membantu edukasi kader
	Rekomendasi Perbaikan Kualitas Makanan & Alat TMS	Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pelabuhan/bandara dengan alasan keterbatasan anggaran	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	Substansi PRL	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : % Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$0,88 = \frac{((Rp. 556,658,000 \times 100\%) - Rp. 551,744,108))}{Rp. 556,658,000}$$

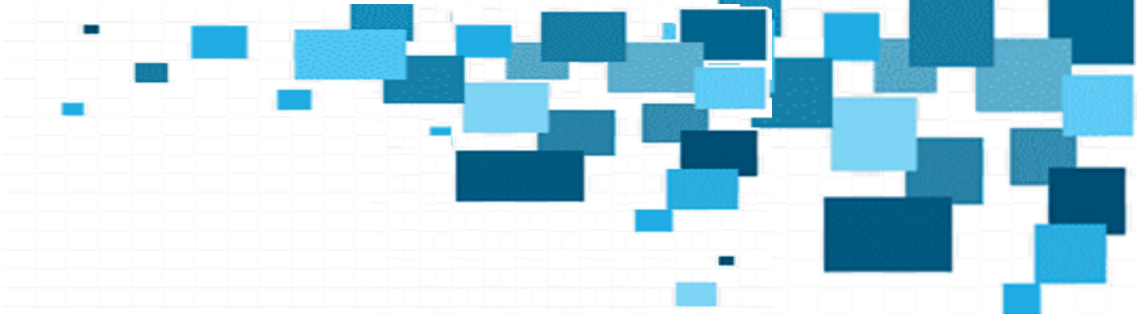
$$52\% = 50 \% \frac{0,88}{20} \times 50$$

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan 100% dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 551,744,108,- atau 99,12% dari pagu anggaran sebesar Rp. 556,658,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,88 dengan nilai efisiensi sebesar 52% untuk capaian kinerja sebesar 100%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pertimbangan sasaran yang sama dan keterbatasan tenaga pelaksana pada pengendalian faktor risiko lingkungan, bandara udara dan vektor di pelabuhan dan bandara. Hal ini berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.



Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan melalui kegiatan sebagai berikut:

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker :

1) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko lingkungan di pintu masuk dan embarkasi, antara lain : pemeriksaan kesehatan penjamah makanan TPM Pra Embarkasi, pemeriksaan dan pengendalian sanitasi lingkungan Asrama Haji, survey dan pengendalian vector dan BPP Asrama Haji, pengawasan / pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan kualitas makanan, pemeriksaan kualitas tempat-tempat umum, pemeriksaan kualitas udara dan kebisingan di pelabuhan dan bandara, pengawasan dan pengendalian limbah B3 di pelabuhan, uji resistensi insektisida, dan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sebanyak 4 paket (100 %).

2) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kekarantinaan kesehatan di bandar udara yaitu Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru, Bandara Gusti Sjaamsir Alam Kotabaru dan Bandara Bersujud Batulicin sebanyak 255 layanan KKBK (100 %).

3) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan pada situasi khusus dimana terjadi lonjakan jumlah lalu lintas orang, alat angkut dan barang pada tempat dan waktu yang bersamaan saat libur Hari Raya, Natal dan Tahun baru yang dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi di Pelabuhan laut penumpang yaitu Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Stagen Kotabaru dan Pelabuhan Batulicin dan 1 (satu) lokasi di Bandar udara yaitu Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru. Pelayanan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan surveilans faktor risiko kesehatan dalam kondisi matra, pengawasan alat angkut dan barang yang berpotensi menimbulkan faktor risiko penyakit yang dikirim menggunakan kapal atau pesawat, pelayanan kesehatan poliklinik terbatas, dan pengendalian risiko lingkungan dengan sasaran sebanyak 120 layanan (100 %).

4) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit DBD di pintu masuk Bandara/Pelabuhan berupa melaksanakan fogging (pengasapan) di area perimeter pelabuhan dan bandara dengan target seluas 38 Hektar sebagai tindakan kewaspadaan dini dan atau fogging fokus / sewaktu – waktu bila terjadi kasus DBD (kejadian luar biasa) di area buffer . Fogging pengendalian faktor risiko penyakit DBD Tahun ini terlaksana sebesar 38 layanan (100 %).

5) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit diare di pintu masuk Bandara / Pelabuhan berupa Spraying Lalat, yaitu melakukan pengendalian lalat dengan alat spray can dan insectisida cair (Solfac) bila hasil pengukuran kepadatan lalat Tinggi (> 2 ekor) tercapai sebesar 72 layanan (100 %).

Berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Pengawasan yang intensif terhadap penemuan faktor risiko lalu lintas orang, barang, alat angkut dan lingkungan pada semua pelabuhan dan bandara di seluruh wilayah kerja.
- 2) Melakukan upaya pengendalian terpadu terhadap semua faktor risiko yang ditemukan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan di pelabuhan dan bandara.
- 3) Memperkuat jejaring dengan lintas sektor dan lintas program terkait tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
- 4) Melakukan evaluasi atas permasalahan di lapangan dan segera melakukan upaya pemecahan masalah.

Indikator Ketiga :

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Adalah angka capaian pengendalian faktor risiko berdasarkan faktor risiko yang ditemukan sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di pelabuhan/bandara/PLBDN.

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Indeks dihitung dari 10 parameter yakni Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam, Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 , Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1), Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 , Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2 , Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0, Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1 , Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan, Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan, dan Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis (Bobot dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*); Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal dikurang score minimal) :
$$indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$$

Adapun data capaian 10 paramater hasil pengendalian terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang sesuai standar kekarantina kesehatan selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Target Pengendalian	Hasil Pengendalian	% Capaian
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	4	400
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	63	100
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	12	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	72	72	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2	120	120	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	66	66	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1	36	36	100
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	288	100
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	392	392	100
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	168	100

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator ini selanjutnya dilakukan perhitungan berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut :

Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Max	Cov Max	Score Max	Min	Score Min
2	3	4	5= 4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300	100	100	300		
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	100	100	400	100	100	400		
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500		
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500	100	100	500		
Total				4,400			4,400		0
					1,00				

Hasil perhitungan metode USG adalah sebesar 1,00 atau 100%. Sedangkan capaian indeks adalah perbandingan realisasi dan target nilai indeks yang telah ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Nilai indeks yang dihasilkan

B = Nilai indeks yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian nilai indeks yang dihasilkan

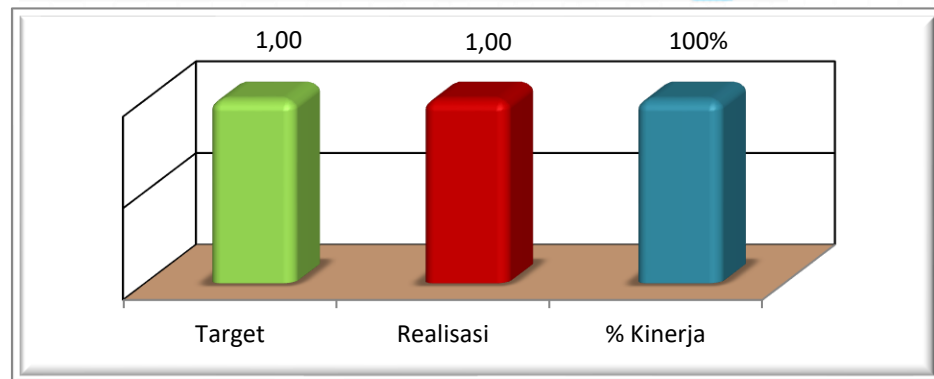
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN selama Tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

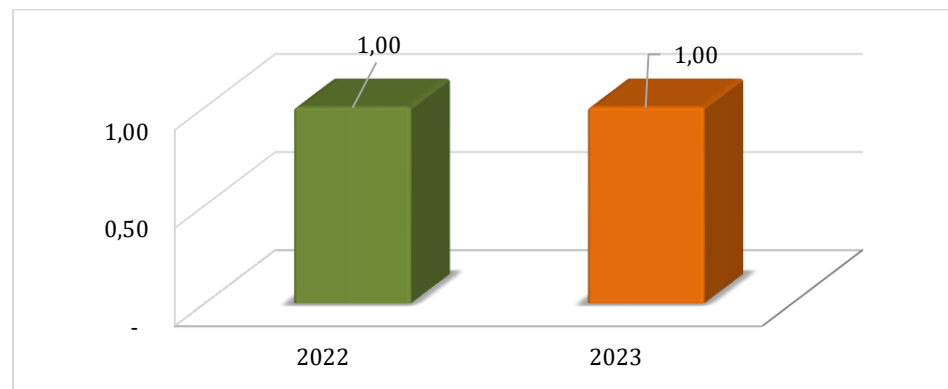


Grafik 12. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Dari grafik 12 menunjukkan bahwa capaian indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat tercapai 100% yaitu sebesar 1 dari target yang ditetapkan, dimana seluruh parameter telah dilakukan pengendalian faktor risiko.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2023 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2023 masih sama dengan dengan 2020 – 2022 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya, namun terdapat perbedaan pada metode penetapan target kinerja, sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan pada capaian kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :



Grafik 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2022 dan 2023

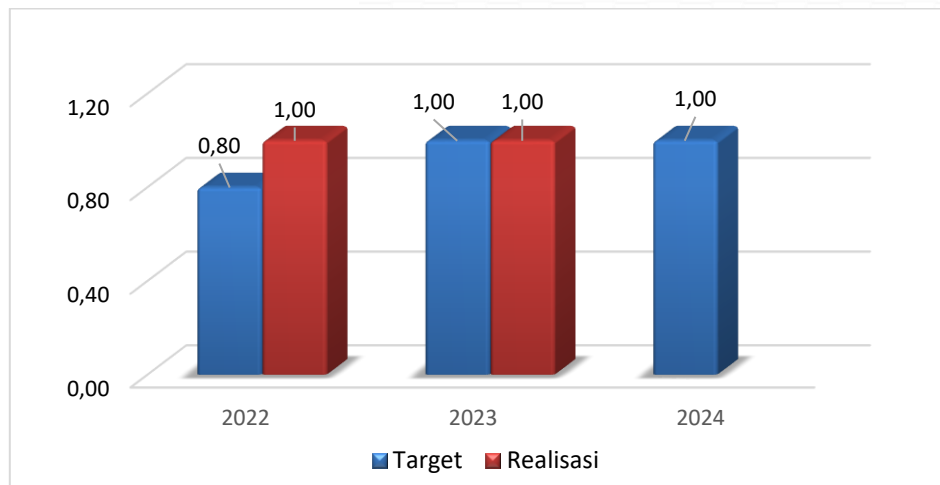
Dari grafik 13 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2022 dan 2023, tercapai 1. Meskipun terdapat perbedaan metode penetapan target kinerja, yang dapat mempengaruhi dalam perhitungan hasil kinerja, tetapi capaian kinerja dapat tercapai sesuai target telah ditetapkan secara maksimal dengan nilai indeks 1.

Namun apabila dilihat dari data rincian hasil Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN, capaian masing-masing kegiatan selama Tahun 2020 – 2023, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan parameter dimana pada Tahun 2020 s.d 2021 memiliki 11 parameter menjadi 10 parameter pada Tahun 2022 - 2023. Meskipun terdapat perbedaan parameter, tetapi sebagian besar masih relevan dengan parameter baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini data perbandingan hasil indeks pengendalian faktor risiko :

Parameter	Hasil Pengendalian			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	26	13	1	4
Jumlah Bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	65	65	63	63
Jumlah Bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	12	12	12
Jumlah Bandara/pelabuhan Indeks populasi kecoa <2	0	0	84	72
Jumlah Bandara/pelabuhan Indeks populasi lalat <2	49	49	49	120
Jumlah Bandara/pelabuhan HI perimeter = 0	90	90	50	66
Jumlah Bandara/pelabuhan HI buffer <1	0	0	40	36
Jumlah Lokus TTU memenuhi syarat dengan min 3 kali pemeriksaan	252	264	288	288
Jumlah Lokus TPM laik hygiene dengan min 2 kali pemeriksaan	432	324	312	392
Jumlah Lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan min 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	164	192	168	168

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2023 baru dapat dibandingkan mulai Tahun 2022, karena merupakan tahun kedua setelah perubahan metode penetapan target kinerja kegiatan. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan Target RAK hingga Tahun 2024 sebagai berikut :



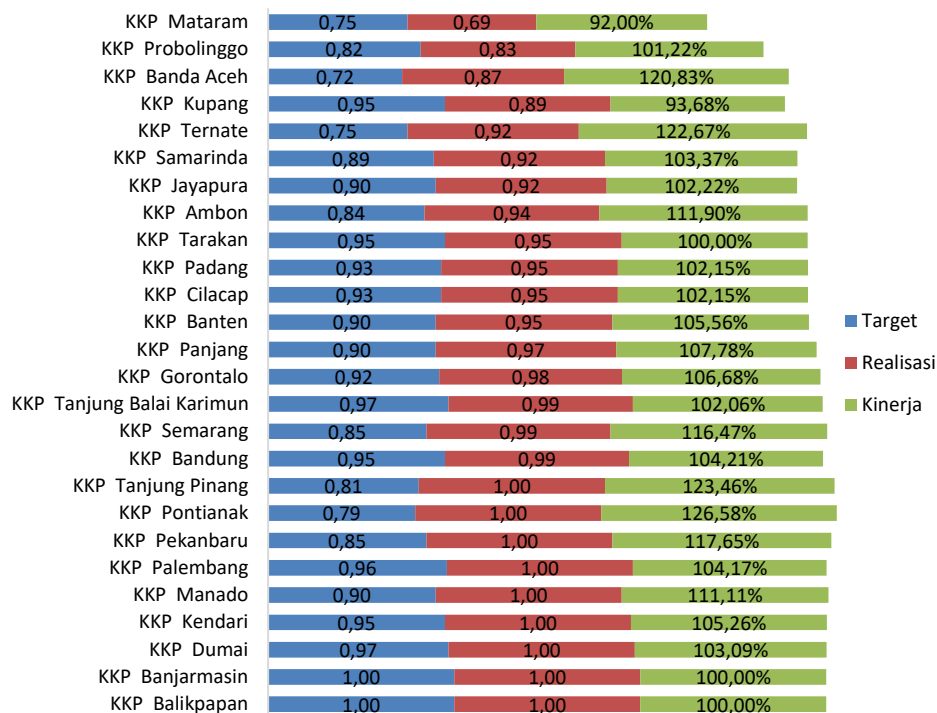
Grafik 14. Perbandingan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Target RAK

Dari grafik 14 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2022 hingga 2023 telah tercapai sesuai target jangka menengah hingga 2024 dengan nilai indeks sebesar 1 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, sehingga sehingga proyeksi target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Namun, untuk indikator ini tidak bisa dibandingkan karena baik dalam dokume RAP maupun PK Ditjen P2P tidak terdapat indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini.

Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance* Kemenkes dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut:



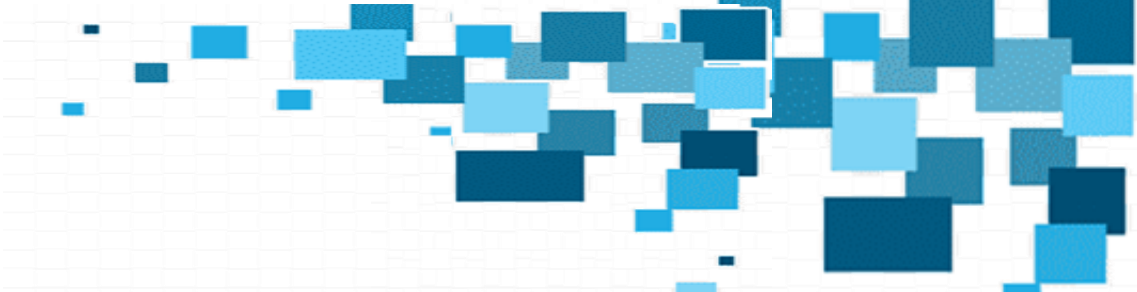
Grafik 15. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Dari grafik 15 tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan kedua dengan realisasi kinerja tertinggi untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semua faktor risiko yang ditemukan telah dilakukan pengendalian dengan baik dan optimal di semua pintu masuk negara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat tercapai sebesar 1 atau 100% dipengaruhi oleh :

- 1) Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu masuk sesuai Instruksi Dirjen P2P.
- 2) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Pes hingga wilayah kerja (Indeks Pinjal < 1).
- 3) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor



risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria hingga wilayah kerja (Indeks Anopheles < 1).

- 4) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Diare (kecoa) hingga wilayah kerja (Index populasi kecoa < 2).
- 5) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit Diare (Lalat) hingga wilayah kerja (Index populasi lalat < 2).
- 6) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit DBD hingga wilayah kerja (House Index Perimeter = 0).
- 7) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan dalam rangka Layanan survei faktor risiko penyakit DBD hingga wilayah kerja (House Index Buffer < 1).
- 8) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan.
- 9) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah TPP Laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan .
- 10) Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan hingga wilayah kerja dalam rangka mencapai jumlah lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan bakteriologis .
- 11) Peningkatan tindakan pengendalian alat angkut dan lingkungan secara berkala dalam rangka pencegahan faktor risiko di pintu masuk.
- 12) Penguatan kapasitas SDM dalam penanganan KKM di Pintu masuk.
- 13) Penguatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kapasitas SDM di Pintu Masuk.
- 14) Dukungan peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di pintu masuk.
- 15) Komitmen bersama para pelaksana program pada seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Tidak sinkronnya aturan pusat dan daerah dan terlalu sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan petugas dalam menerapkan peraturan.
- 2) Kesulitan koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan serta lintas sektor yang *slow respon* dalam memberikan *feed back*
- 3) Kurangnya jumlah SDM dalam rangka pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan di pintu masuk pelabuhan dan bandara, khususnya wilker Bandara Syamsuddin Noor.

Pemecahan Masalah :

- 1) Mengaktifkan sistem komunikasi cepat untuk melakukan update informasi dan menyeragamkan pemahaman terkait peraturan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan secara berjenjang dari level petugas hingga ke pemangku kebijakan.
- 3) Melakukan koordinasi secara virtual atau komunikasi cepat dengan lintas sektor terkait.
- 4) Menambah jumlah SDM dengan perbantuan teknis lintas program dan rekrutmen tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

CK_i : % Capaian Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$0,06 = \frac{((Rp365.180.000 \times 100\%) - Rp364.973.092)}{Rp. 365.180.000} \times 100\%$$

$$50\% = 50 \% \frac{0,06}{20} \times 50$$

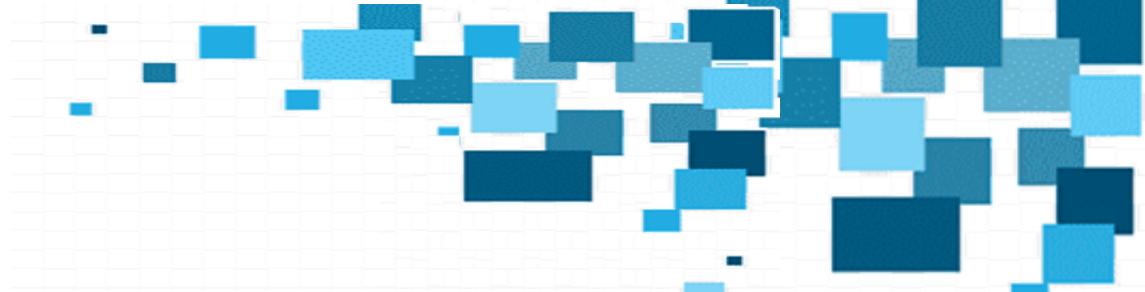
Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara dapat tercapai sebesar 1 dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp364.973.092,00 atau 99,94% dari pagu anggaran sebesar Rp365.180.000,00 yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,06 dengan nilai efisiensi sebesar 50% untuk capaian kinerja sebesar 100%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah adanya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan diinternal satker yang dapat melibatkan banyak ASN sebagai peserta dan adanya penyesuaian biaya pelatihan sehingga dapat dilakukan optimalisasi kegiatan dengan Hal ini berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator



kinerja kegiatan ini apabila berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker melalui Pelatihan Bidang Kesehatan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola program kegiatan. Adapun pelatihan yang telah diikuti sebanyak 17 orang tercapai melebihi target yaitu sebesar 11 orang (154,5%). Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas dalam melaksanakan pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Sedangkan berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Penanganan sinyal SKD KLB dan kegawatdaruratan yang direspon kurang dari 24 jam di area pelabuhan dan bandara.
- 2) Melakukan upaya pengendalian vektor terpadu pada pelabuhan dan bandara hingga mencapai standar indeks minimal faktor risiko.
- 3) Melakukan upaya pengendalian sanitasi lingkungan terpadu pada pelabuhan dan bandara hingga memenuhi syarat kesehatan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola pelabuhan dan bandara dalam upaya menciptakan pelabuhan dan bandara sehat.
- 5) Melakukan evaluasi atas permasalahan di lapangan dan segera melakukan upaya pemecahan masalah.

2. Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

**Indikator Keempat :
Nilai Kinerja Anggaran**

a. Pengertian

Adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran berdasarkan hasil perhitungan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA.

b. Definisi Operasional

Hasil capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam dokumen anggaran, dimana prosesnya melalui pengukuran, penilaian, dan

analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan, yang merupakan perbandingan antara capaian NKA dengan target yang ditetapkan.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan 5 parameter yaitu realisasi anggaran, capaian rincian output (CRO), konsistensi RPD, efisiensi CRO dan nilai efisiensi yang dikalikan masing-masing bobot.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA

B = Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA

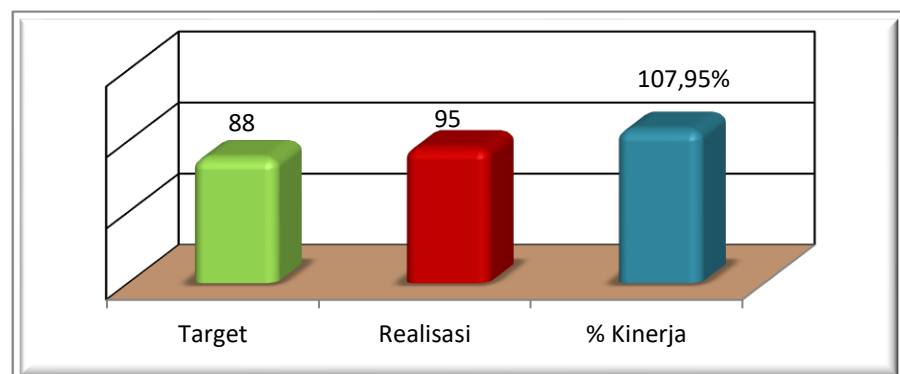
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran selama Tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{95}{88} \times 100\% = 107,95\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



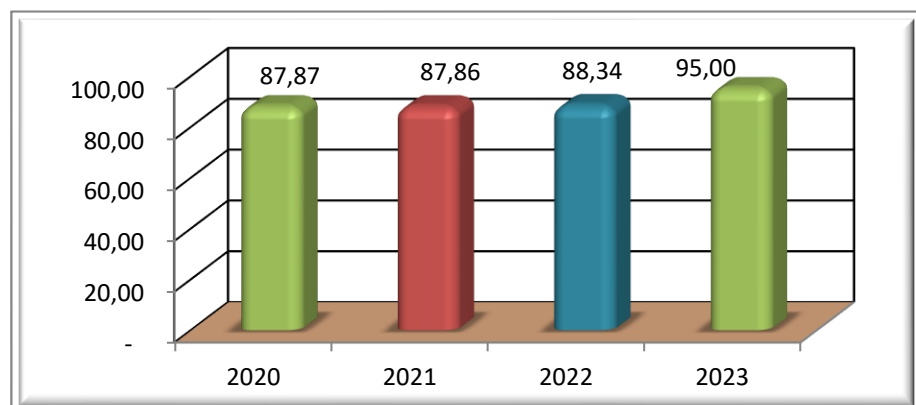
Grafik 16. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran

Dari grafik 13 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dapat tercapai > 100% yaitu

sebesar 107,95%, yang merupakan hasil perhitungan penyerapan sebesar 99,65%, konsistensi sebesar 99,97%, CRO sebesar 100%, efisiensi sebesar 13,07% dan nilai efisiensi sebesar 82,67%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 merupakan tahap keempat pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2020 s.d 2023 masih sama atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Capaian kinerja pada Tahun 2020 s.d 2022 tercapai kurang lebih sama, sedangkan Tahun 2023 terjadi peningkatan karena adanya optimalisasi kegiatan sehingga meningkatkan volumen RO. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 s.d 2023

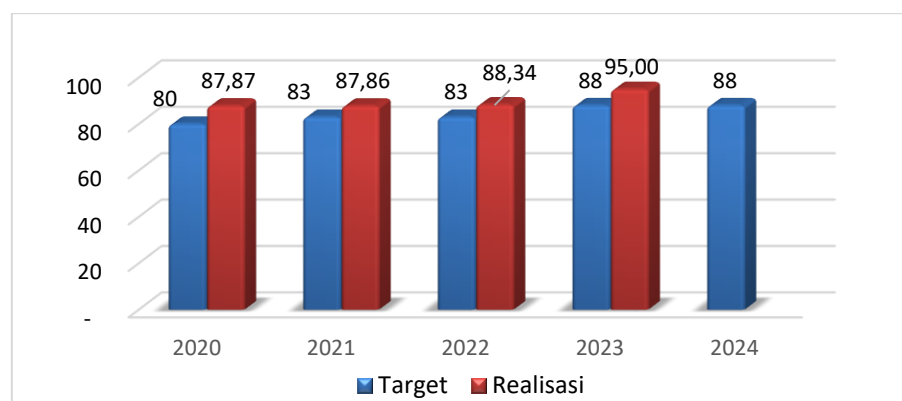
Dari grafik 17 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2023 terdapat peningkatan realisasi kinerja secara signifikan pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, rincian capaian kinerja anggaran dapat dilihat pada data berikut ini :

Parameter Penilaian	Nilai			
	2020	2021	2022	2023
Penyerapan	96,02	97,64	95,22	99,65
Konsistensi	98,40	98,27	98,30	99,97
Capaian Output (CO) / Capaian Rincian Output (CRO)	100	100	100	100
Efisiensi	3,98	3,79	4,78	13,07
Nilai Efisiensi	0	59,47	61,95	82,67
Nilai Kinerja Anggaran	87,87	87,86	88,34	95,00

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 s.d 2023 nilai kinerja anggaran dapat tercapai di atas target yang ditetapkan setiap tahunnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun keempat dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 95 atau 107,95% dari target sebesar 88.



Grafik 18. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target RAK

Dari grafik 18 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 88 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, sehingga proyeksi target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan capaian rincian output dapat tercapai secara optimal dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola program, pengelola monev dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang terlaksana dengan baik.

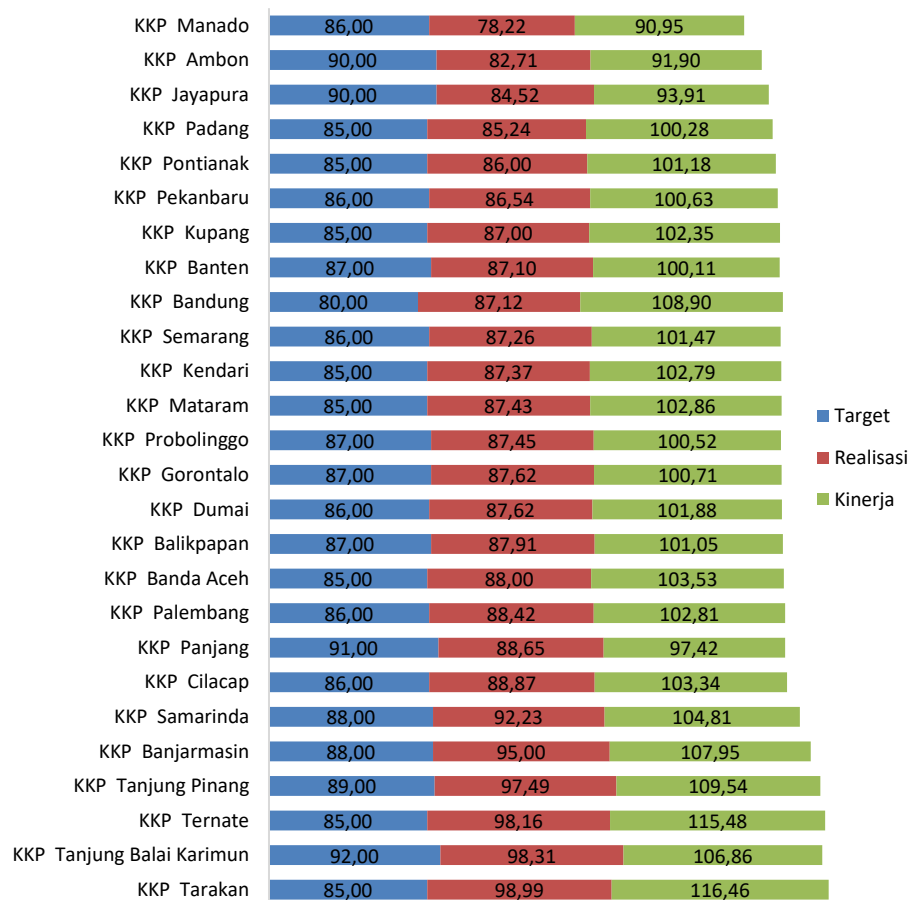
4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan numenklatur indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan, sedangkan indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sesuai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian

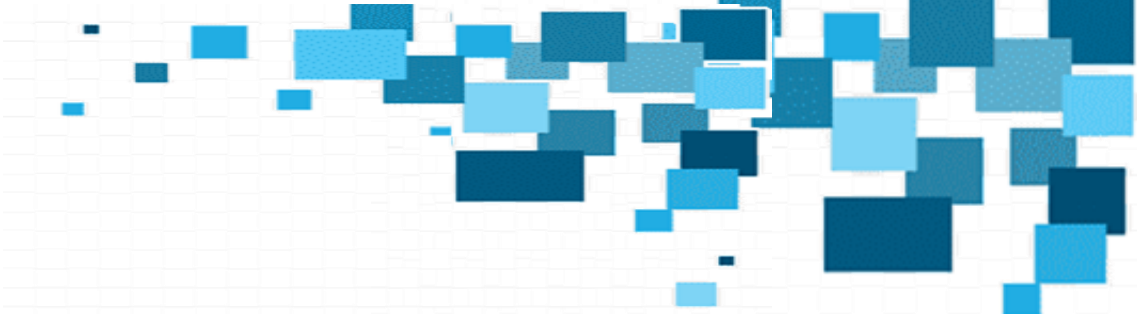
indikator kinerja kegiatan tingkat nasional dengan satuan kerja Tahun 2023. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan capaian Ditjen P2P Tahun 2023 :

Indikator Ditjen P2P / RAP	Target	Realisasi	Indikator RAK	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	93	87,97	Nilai Kinerja Anggaran	88	95

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja satker lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata target dan realisasi indikator Ditjen P2P / RAP, yang berarti masih terdapat nilai parameter perhitungan nilai kinerja anggaran pada sebagian satker Ditjen P2P yang belum optimal. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :



Grafik 19. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis Nilai Kinerja Anggaran



Dari grafik 19 menunjukkan bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan kelima dengan realisasi kinerja tertinggi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia. Hal ini dipengaruhi dengan adanya optimalisasi kegiatan sehingga meningkatkan capaian RO.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang tercapai 95 atau 107,95% dipengaruhi oleh :

- 1) Penyerapan anggaran yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.
- 2) Peningkatan konsistensi Rencana Penarikan Dana
- 3) Peningkatan capaian RO dengan adanya optimalisasi kegiatan

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Konsistensi pelaksanaan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA Efisiensi pada bulan berjalan belum menunjukkan efisiensi sesungguhnya, sehingga nilai kinerja anggaran pada bulan berjalan sering nilai fluktuatif.
- 2) Tidak tersedianya menu pilhan capaian nilai kinerja anggaran sesuai realisasi anggaran yang terkoneksi dengan data OM SPAN per bulan.
- 3) Capaian RO melebihi target dianggap sebagai data anomali.

Pemecahan Masalah :

- 1) Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Menyampaikan masukan adanya menu pilihan tambahan untuk dapat melihat rekap nilai kinerja anggaran per bulan.
- 3) Penambahan justifikasi pada menu keterangan untuk capaian RO yang melebihi target.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran

dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : % Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

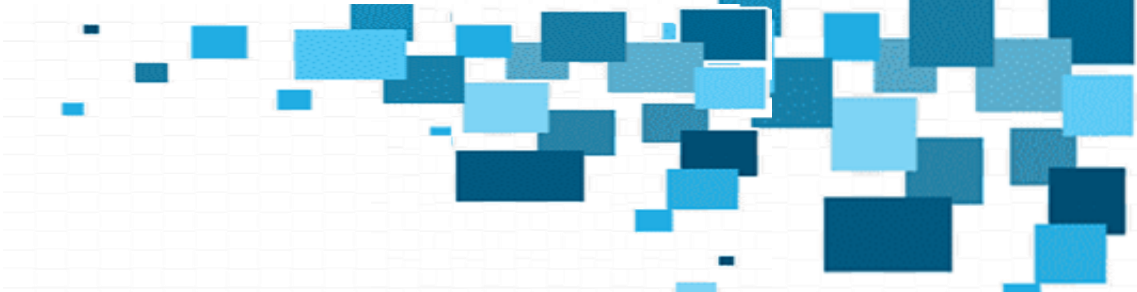
Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$7,37 = \frac{((Rp451.380.000 \times 107,95\%) - Rp451.364.249))}{Rp451.380.000} \times 100\%$$

$$68\% = 50 \% \frac{7,37}{20} \times 50$$

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran dapat tercapai sebesar 95 dengan capaian kinerja sebesar 107,95% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp451.364.249,00 atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp451.380.000,00 yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,37 dengan nilai efisiensi sebesar 68% untuk capaian kinerja sebesar 107,95%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti



koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi sebagian dilaksanakan secara *daring* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis *online* atau secara *hybrid*, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker :

1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

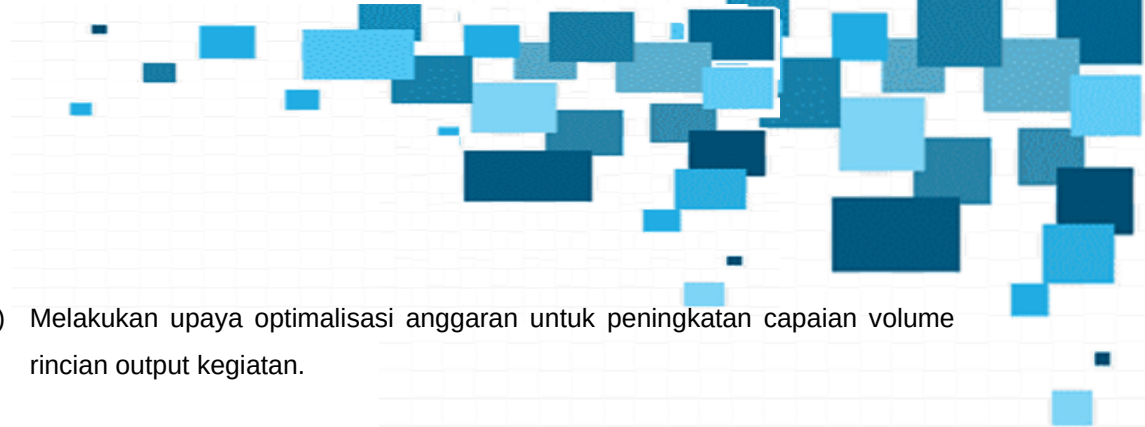
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen RKAKL Satker melalui kegiatan penyusunan e-renggar, penyusunan RKAKL, pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran serta penyusunan RAK sebanyak 7 layanan.

2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan baik melalui aplikasi SMART DJA, Monev Bappenas, Monev E-Performance, dan kompilasi laporan dalam bentuk Laporan Tahunan, Indikator Kinerja, Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja melalui kegiatan : penyusunan laporan pelaksanaan program, penyusunan laporan e-monev penganggaran, penyusunan laporan e-monev Bappenas / P 39 Tahun 2006, penyusunan laporan Tahunan satker, penyusunan laporan indikator RAK, penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja sebanyak 20 dokumen.

Berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Meningkatkan komitmen pengelola program dan pengelola APBN dalam upaya konsistensi penarikan dana pada Halaman III DIPA.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil DJPB terkait pengelolaan anggaran, revisi anggaran dan optimalisasi anggaran.

- 
- 3) Melakukan upaya optimalisasi anggaran untuk peningkatan capaian volume rincian output kegiatan.

Indikator Kelima :

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

a. Pengertian

Adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

b. Definisi Operasional

Nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan nilai total dengan nilai bobot.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di hitung berdasarkan perbandingan total akhir dibagi dengan nilai bobot berdasarkan hasil formulasi perhitungan 3 kriteria yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran dengan 2 parameter yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan 5 parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan 1 parameter yaitu capaian output.

Sedangkan capaian kinerja adalah perbandingan capaian nilai IKPA dengan target yang ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Capaian Nilai IKPA

B = Nilai IKPA yang ditargetkan

% C = Persentase Capaian Nilai IKPA

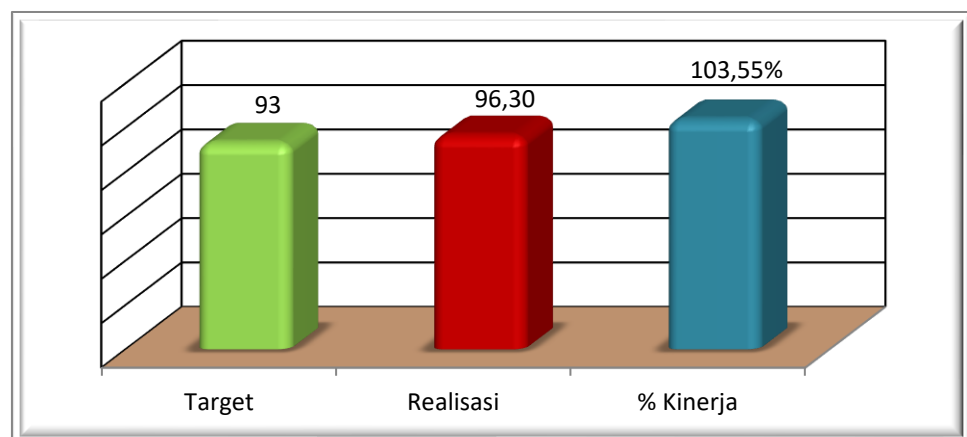
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{96,30}{93} \times 100\% = 103,55\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



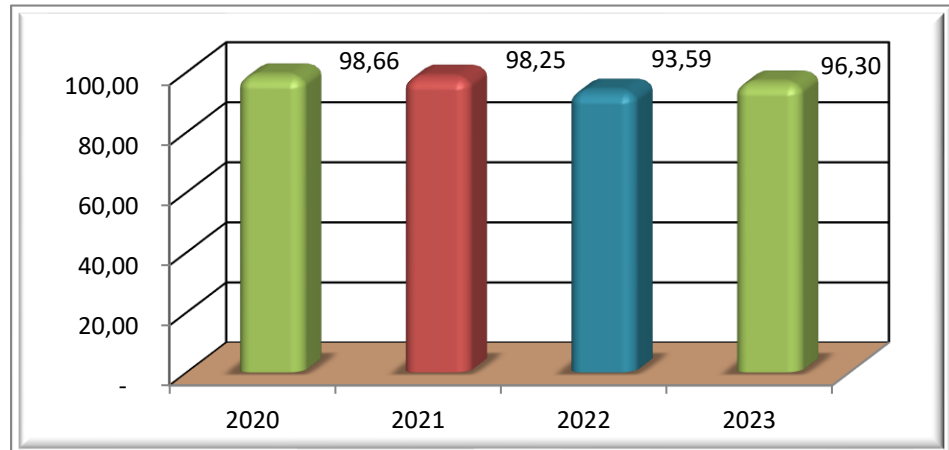
Grafik 20. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dari grafik 20 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 103,55%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 merupakan tahap keempat pelaksanaan

pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan ini Tahun 2020 dengan 4 kriteria penilaian dan awalnya 11 parameter menjadi 13 parameter penilaian tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan karena adanya kebijakan relaksasi penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan hingga triwulan III dan kebijakan Ditjen P2P melakukan perubahan indikator menjadi Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan akibat pandemi covid-19. Namun hasil penilaian IKPA masih dapat terlihat pada aplikasi Monev Anggaran DJA karena pada triwulan IV telah dilakukan penilaian IKPA kembali, dimana indikator ini tercapai 98.66. Tahun 2021 indikator ini kembali ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan dengan 4 kriteria penilaian dan 13 parameter penilaian dan tercapai 98.25 dari target yang ditetapkan. Sedangkan Tahun 2022 terdapat perubahan menjadi 3 kriteria penilaian dan 8 parameter dengan capaian kinerja 93,59 dan Tahun 2023 tercapai 96,30 dari target yang ditetapkan. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 s.d 2023

Dari grafik 21 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja Tahun 2020 s.d 2023 mengalami fluktuasi karena adanya perbedaan kriteria penilaian dan parameter. Untuk lebih jelasnya, rincian capaian kinerja anggaran dapat dilihat pada data berikut ini :

Kriteria dan Parameter Penilaian	Nilai	
	2020	2021
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	97,67	96,56
Revisi DIPA	100	100
Deviasi Halaman III DIPA	93,02	89,68
Pagu Minus	100	100
Kepatuhan Terhadap Regulasi	97,22	100
Data Kontrak	100	100
Pengelolaan UP dan TUP	88,89	100
LPJ Bendahara	100	100
Dispensasi SPM	100	100
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	100	99,34
Penyerapan Anggaran	100	97,36
Penyelesaian Tagihan	100	100
Capaian Output	100	100
Retur SP2D	100	100
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	95	85
Renkas	0	0
Kesalahan SPM	95	85
Nilai IKPA	98,66	98,25

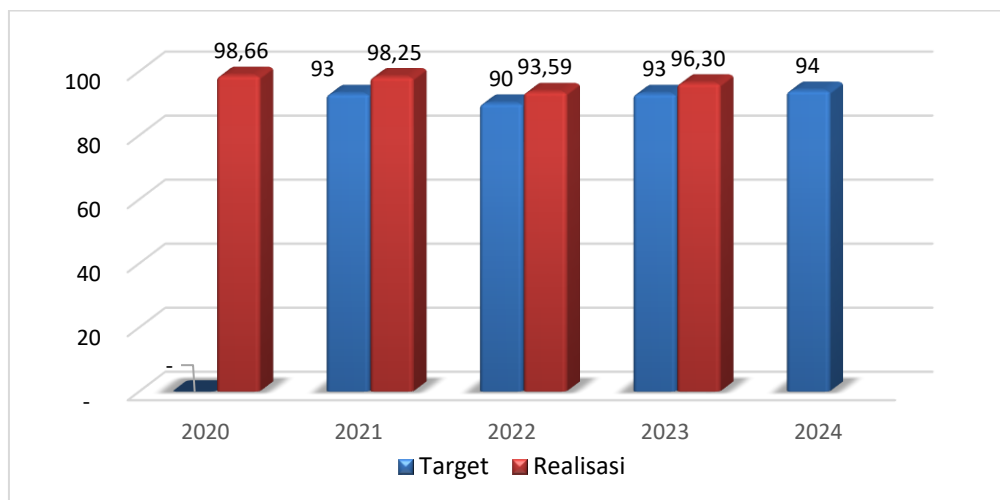
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 nilai IKPA lebih tinggi 0.41 point dibandingkan Tahun 2021. Sedangkan Tahun 2022 dan 2023, terdapat 3 kriteria penilaian dengan 8 parameter dapat dilihat pada data berikut ini :

No	Kriteria dan Parameter Penilaian	Nilai Akhir	
		2022	2023
A	Kualitas Perencanaan Anggaran	82,77	89,57
1	Revisi DIPA	100	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	65,53	79,14
B	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,28	97,19
1	Penyerapan Anggaran	89,01	97,90
2	Belanja Kontraktual	93	93,25
3	Penyelesaian Tagihan	100	100
4	Pengelolaan UP dan TUP	99,37	94,82
5	Dispensasi SPM	100	100
C	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100	100
1	Capaian Output	100	100
	Nilai Akhir (IKPA)	93,59	96,30

Dari data tersebut di atas, tampak jelas perbedaan kriteria penilaian dan parameter Tahun 2020/2021 dan 2022/2023. Hal ini mempengaruhi dalam penetapan target dan hasil penilaian yang diperoleh.

5) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun keempat dari jangka 5 Tahunan terjadi peningkatan karena adanya perubahan kriteria penilaian IKPA dan peningkatan beberapa nilai parameter. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan Target RAK hingga Tahun 2024 sebagai berikut :



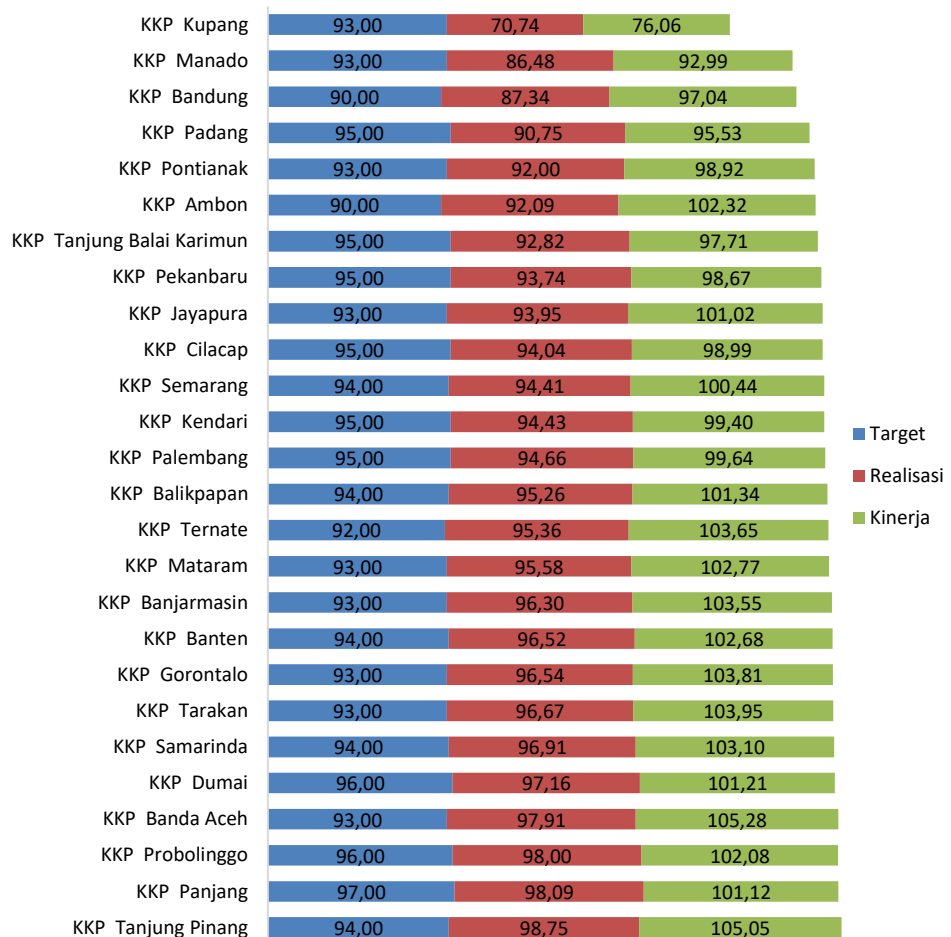
Grafik 22. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target RAK

Dari grafik 22 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023, karena adanya penyesuaian target, sehingga capaian kinerja ini telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 94 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 - 2024, sehingga proyeksi target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa 3 kriteria penilaian dan 8 parameter dapat terpenuhi dengan baik dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola keuangan dan Tim SAI, pengelola program, dan pengelola money.

6) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Namun, untuk indikator ini meskipun dalam dokumen RAP maupun PK Ditjen P2P tidak terdapat indikator kinerja pelaksanaan anggaran, tetapi target yang ditetapkan Ditjen P2P untuk nilai IKPA sebesar 80. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia, berdasarkan

hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance* Kemenkes dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :



Grafik 23. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis
 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dari grafik 23 menunjukan bahwa capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan kesepuluh dengan realisasi kinerja tertinggi untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia. Hal ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan nilai parameter deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tercapai 96,30 atau 103,55% dipengaruhi oleh :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan anggaran
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

Adanya perubahan atau metode baru dalam penilaian IKPA, mengakibatkan :

- 1) Adanya akumulasi penilaian deviasi halaman III DIPA, meskipun telah dilakukan revisi, tidak akan meningkatkan nilai parameter deviasi.
- 2) Adanya target penyerapan per periode atau triwulan, meskipun telah sesuai dengan RPD dan jadwal pelaksanaan kegiatan di satker yang tidak mungkin dilakukan percepatan.
- 3) Adanya belanja kontraktual yang dilaksanakan setelah Triwulan I, sehingga mempengaruhi nilai kontrak akselerasi.
- 4) Adanya pengembalian TUP akhir tahun.

Pemecahan Masalah :

- 1) Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai yang ditetapkan dan konsisten terhadap RPD yang telah disusun.
- 2) Melakukan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi target per periode.
- 3) Melakukan penyelesaian dan percepatan belanja kontraktual pada triwulan I.
- 4) Melakukan perhitungan TUP sesuai kebutuhan anggaran tambahan uang persediaan.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
 CK_i : % Capaian Keluaran i
 RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$3,74 = \frac{((Rp17.022.954.000 \times 103,55\%) - Rp16.968.075.008))}{Rp. 17.022.954,000} \times 100\%$$

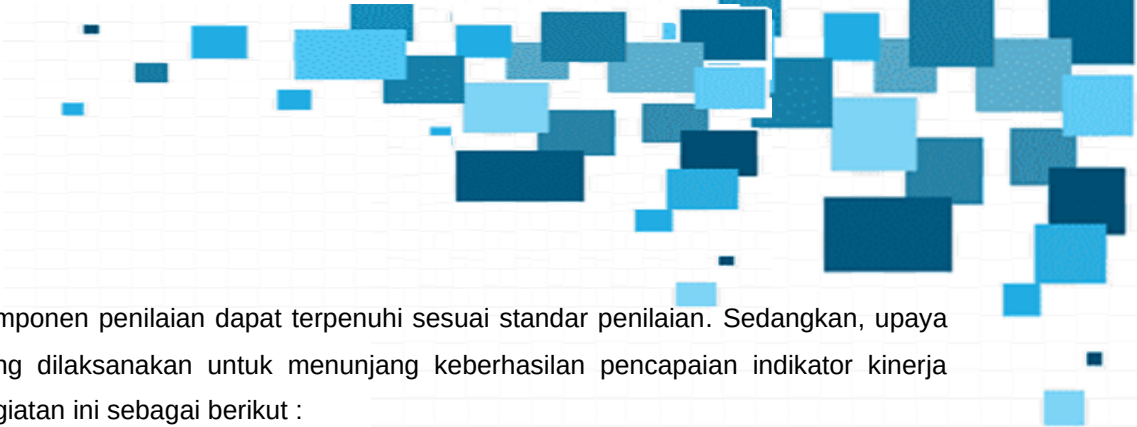
$$59\% = 50 \% \frac{3,74}{20} \times 50$$

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator kinerja kegiatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat tercapai sebesar 96,30 dengan capaian kinerja sebesar 103,55% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp16.968.075.008,00 atau 99,68% dari pagu anggaran sebesar Rp17.022.954.000,00 yang berarti terdapat optimalisasi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,74 dengan nilai efisiensi sebesar 59% untuk capaian kinerja sebesar 103,55%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan desk atau reuiu dapat dilaksanakan secara *daring* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis *online* serta secara *hybrid*. Untuk pengawasan proses pembangunan gedung Kantor Wilker Batulicin juga dapat dilakukan lebih *intens* melalui *teleconference*, serta efisiensi belanja pegawai tidak lanjut kebijakan *automatic adjusment*, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya komitmen bersama dan sinergi dari pengelola program kegiatan dengan pengelola keuangan agar semua



komponen penilaian dapat terpenuhi sesuai standar penilaian. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker :

1) Layanan BMN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan BMN, penghapusan dan pemusnahan BMN, penyelesaian masalah BMN, pengelolaan hibah BMN, dan penyusunan RKBMN sebanyak 5 layanan.

2) Layanan Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan.

3) Layanan Sarana Internal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemenuhan peralatan fasilitas Perkantoran berupa pengadaan mebelair dan pemenuhan perangkat data, survei lapangan dan pelanggan sebanyak 3 paket.

4) Layanan Prasarana Internal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembangunan gedung Kantor Wilayah Kerja Batulicin sebanyak 1 unit.

Berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 2) Melakukan monitoring target realisasi anggaran dan capaian volume rincian output per triwulan untuk meningkatkan nilai komponen penyerapan anggaran dan capaian output.
- 3) Melakukan percepatan pengadaan barang jasa dibawah 200 juta pada triwulan I untuk meningkatkan nilai komponen belanja kontraktual.
- 4) Melakukan *revolving* GUP sesuai standar waktu dan perhitungan untuk meningkatkan nilai komponen pengelolaan UP.

Indikator Keenam :
Kinerja implementasi WBK satker

a. Pengertian :

Adalah hasil penilaian kinerja atas implementasi WBK pada satker berdasarkan unsur penilaian manajemen perubahan, penataan tatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*Self Assessment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan dilakukan self assessment oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Nilai kinerja implementasi WBK

B = Nilai kinerja implementasi WBK yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian kinerja implementasi WBK

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

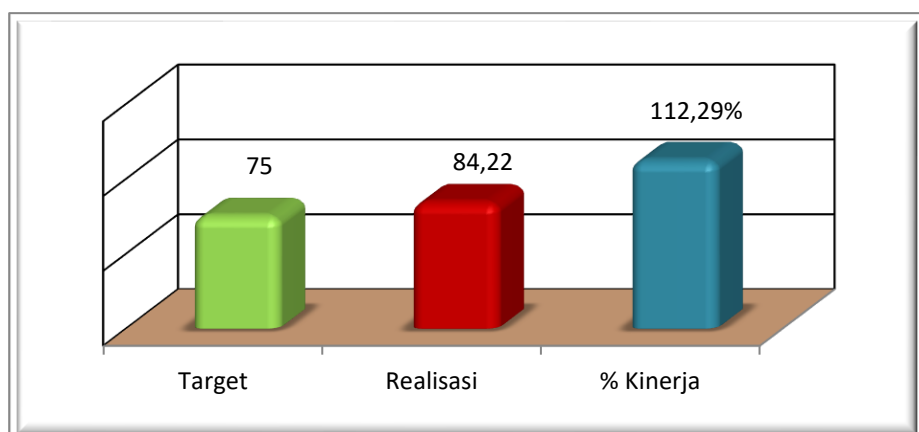
Capaian indikator kinerja kegiatan berupa kinerja implementasi WBK satker selama Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian Tim Internal Kemenkes dapat dilihat pada data berikut ini :

Komponen Penilaian	Syarat Minimal	Hasil Penilaian
A. Nilai Total (Komponen Pengungkit + Komponen Hasil)	75	84,22
B. Nilai Komponen Pengungkit		
1. Nilai Minimal Komponen Pengungkit	40	48,10
2. Bobot Nilai Minimal Per Area Pengungkit		
a. Manajemen Perubahan	60%	56,78%
b. Penataan Tatalaksana	60%	81,36%
c. Penataan Sistem Manajemen SDM	60%	61,00%
d. Penguatan Akuntabilitas	60%	85,78%
e. Penguatan Pengawasan	60%	90,80%
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60%	95,70%
B. Nilai Komponen Hasil		
1. Nilai Komponen Hasil “ Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel “	≥ 18,25	19,98
a. Nilai Sub Komponen Survei Persepsi Anti Korupsi	≥ 15,75	16,23
b. Nilai Sub Komponen “ Kinerja Lebih Baik “	≥ 2,50	3,75
2. Nilai Komponen Hasil “ Pelayanan Publik yang Prima “	≥ 14,00	16,13

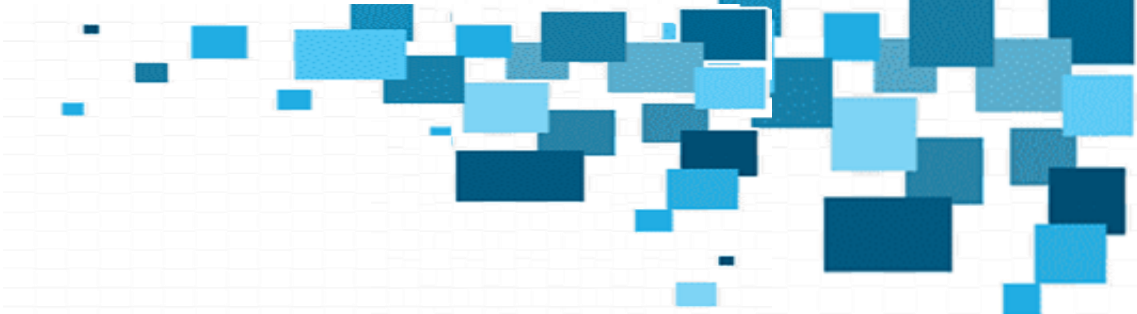
Sedangkan untuk menilai capaian kinerja sesuai hasil penilaian dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{84,22}{75} \times 100\% = 112,29\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



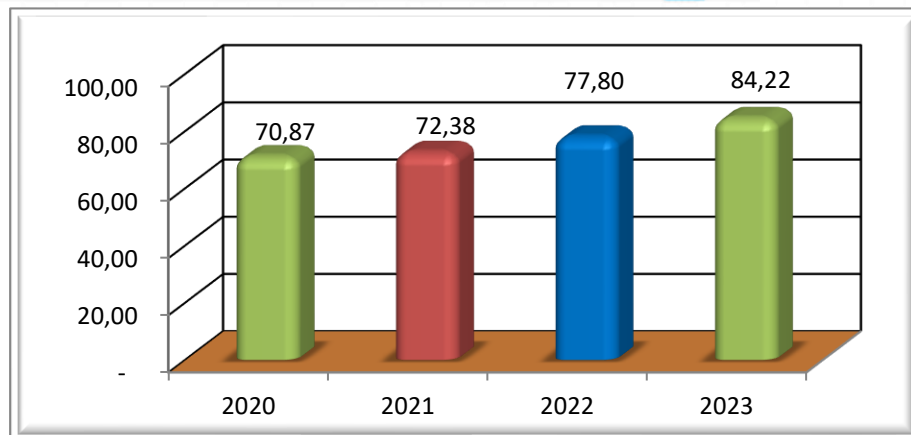
Grafik 24. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker



Dari grafik 24 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja implementasi WBK satker dapat tercapai > 100% yaitu sebesar 112,29% karena adanya pendampingan dari Tim Hukormas Ditjen P2P sehingga mempengaruhi kinerja Pokja WBK dalam memenuhi persyaratan kriteria penilaian Satker WBK. Meskipun hasil penilaian di atas target, namun penetapan Status WBK Satker Kemenkes belum memenuhi syarat minimal pada komponen pemenuhan dan reform manajemen perubahan yaitu 56,78% dan terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang sedang ditangani Tim Itjen Kemenkes.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu kinerja implementasi WBK satker Tahun 2023 merupakan tahap keempat pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2023 masih sama dengan Tahun 2020 s.d 2022 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Capaian indikator kinerja kegiatan ini hasil *Self Assessment* pada Tahun 2020 tercapai **70.87** meskipun tercapai di atas target 70 tetapi karena adanya penetapan standar minimal 75 dari Menpan RB, maka belum memenuhi syarat sebagai satker WBK, sedangkan Tahun 2021 hasil *Self Assessment* Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes pada Bulan Agustus 2021 tercapai **72.38** dan masih belum memenuhi syarat, kemudian dan hasil pendampingan oleh Tim Hukormas Ditjen P2P pada bulan November 2021 memperoleh nilai 81.73. Pada Tahun 2022, hasil pendampingan Tim Hukormas Ditjen P2P pada Bulan Mei 2022 memperoleh nilai 81,44 dan telah diusulkan untuk penilaian Satker WBK di Tingkat Kemenkes yang dilakukan *Self Assessment* pada bulan November 2022 oleh Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes dengan perolehan nilai **77.80**. Sedangkan pada Tahun 2023, hasil pendampingan Tim Hukormas Ditjen P2P pada Bulan Agustus 2023 memperoleh nilai 89,10 dan telah diusulkan untuk penilaian Satker WBK di Tingkat Kemenkes yang dilakukan *Self Assessment* pada bulan Oktober 2023 oleh Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes dengan perolehan nilai **84,22** Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

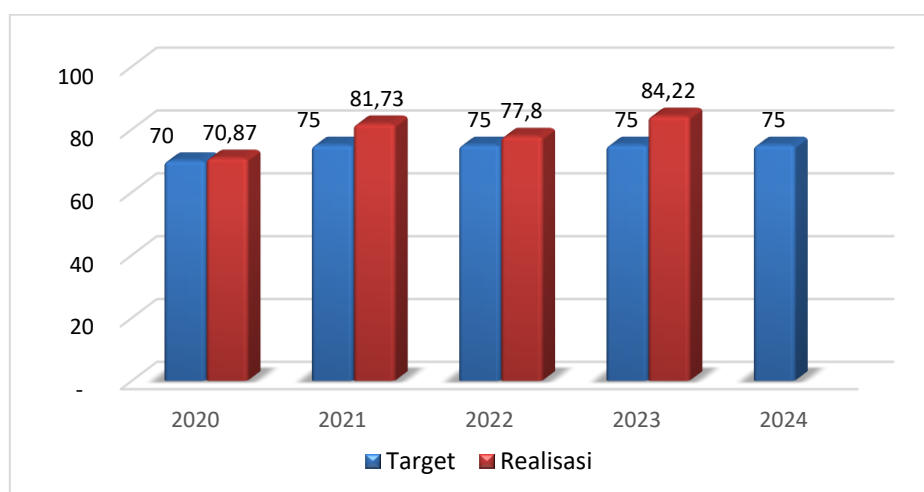


Grafik 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d 2023

Dari grafik 25 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2023 terdapat peningkatan atau perubahan manajemen menuju satker WBK, meskipun belum terpenuhinya syarat sebagai satker WBK karena terdapat 1 Pokja dengan nilai dibawah standar minimal 60 dan masih memerlukan perbaikan dalam implementasi berbagai kriteria pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan.

7) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun keempat dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 84,22 atau 112,29% dari target sebesar 75.



Grafik 26. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker dengan Target RAK

Dari grafik 26 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023, berdasarkan hasil penilaian Tim Internal Kemenkes rata-rata tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 75, yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, yang semestinya dapat dinyatakan sebagai Satker WBK Tingkat Kemenkes dengan hasil penilaian rata-rata telah melebihi batas minimal *Self Assessment* sebesar 75, namun karena adanya 1 pokja yang belum memenuhi nilai standar minimal 60% yaitu Manajemen Perubahan 56,78% dan adanya pengaduan masyarakat yang sedang ditangani Tim Itjen Kemenkes mengakibatkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin belum bisa meraih Predikat WBK Kemenkes Tahun 2023. Meskipun begitu upaya membangun dan mengimplementasikan WBK tetap dilakukan melalui berbagai upaya perubahan dalam hal pengelolaan manajemen satker dan persepsi korupsi, sehingga proyeksi target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024.

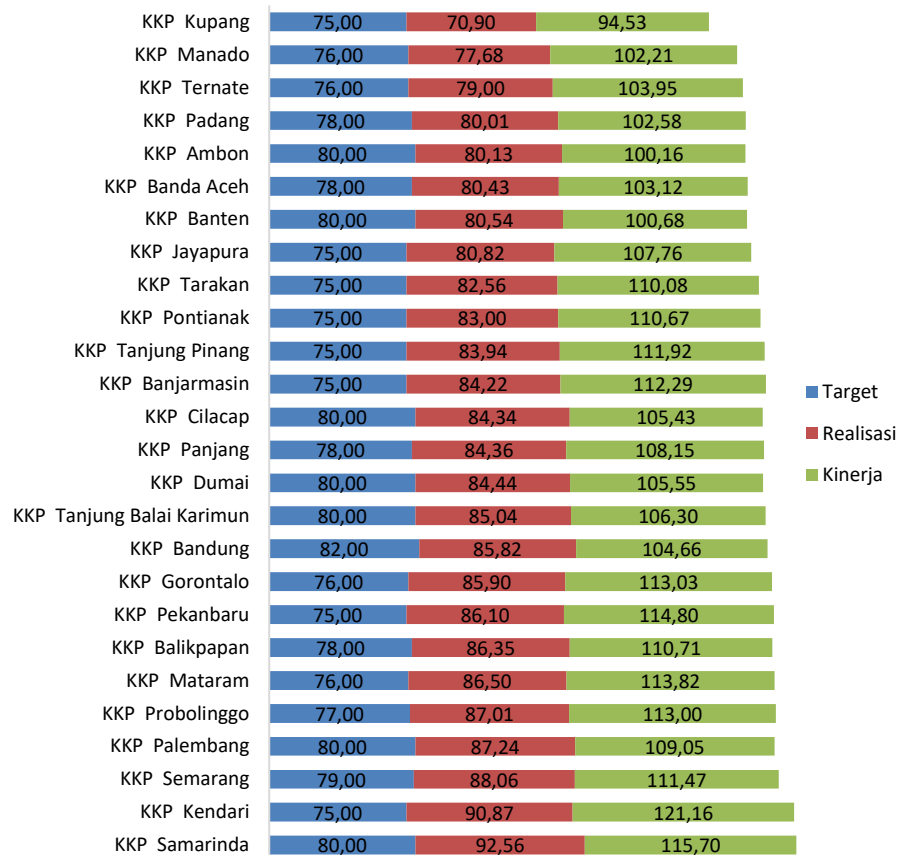
3) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Adanya perbedaan level ini mengakibatkan adanya perbedaan numenklatur indikator kinerja level eselon 1 yang mengacu pada renstra kementerian kesehatan, sedangkan indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sesuai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat nasional dengan satuan kerja Tahun 2023. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan capaian Ditjen P2P Tahun 2023 :

Indikator Ditjen P2P / RAP	Target	Realisasi	Indikator RAK	Target	Realisasi
Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	85	83,21	Kinerja Implementasi WBK Satker	75	84,22

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja satker lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata target dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi indikator Ditjen P2P / RAP, yang berarti masih terdapatnya nilai komponen pengungkit satker yang belum optimal dan memenuhi standar. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi

E-Performance Kemenkes dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :



Grafik 27. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis
Kinerja Implementasi WBK Satker

Dari grafik 27 menunjukkan bahwa capaian Kinerja Implementasi WBK Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan kelimabelas untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia dan termasuk Satker Ditjen P2P yang belum meraih WBK Kemenkes. Hal ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik, namun karena adanya salah satu unsur nilai komponen pengungkit yang dibawah standar nilai minimal, sehingga belum dapat ditetapkan sebagai Satker Berpredikat WBK Tingkat Kemenkes.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian kinerja implementasi WBK satker yang tercapai 84,22 atau 112,29% dipengaruhi oleh :

- 1) Komitmen bersama seluruh level organisasi dari pimpinan hingga staf untuk implementasi WBK secara konsisten dan bertanggungjawab.

- 2) Belum optimalnya dokumen pelaksanaan manajemen perubahan yang dilaksanakan internal satker.
- 3) Adanya pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Belum semua difahami item atau unsur penilaian kinerja WBK dan pemenuhan kelengkapan dokumen dengan sistem yang baru.
- 2) Penilaian WBK dilakukan secara *daring*, sehingga adanya keterbatasan dalam penjelasan dokumen yang disampaikan dan hasil penilaian.
- 3) Belum adanya matriks tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kemenkes.

Pemecahan Masalah :

- 1) Adanya pendampingan dan penguatan kinerja implementasi WBK dari Hukormas P2P.
- 2) Adanya waktu yang cukup memadai untuk satker memberikan penjelasan dan menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Melakukan koordinasi terkait penerbitan matriks tindak lanjut hasil pengawasan dengan Tim Itjen Kemenkes.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
 CK_i : % Capaian Keluaran i
 RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$11,10 = \frac{((Rp350.562.000 \times 112,29\%) - Rp. 349.945.989)}{Rp. 350,562,000} \times 100\%$$

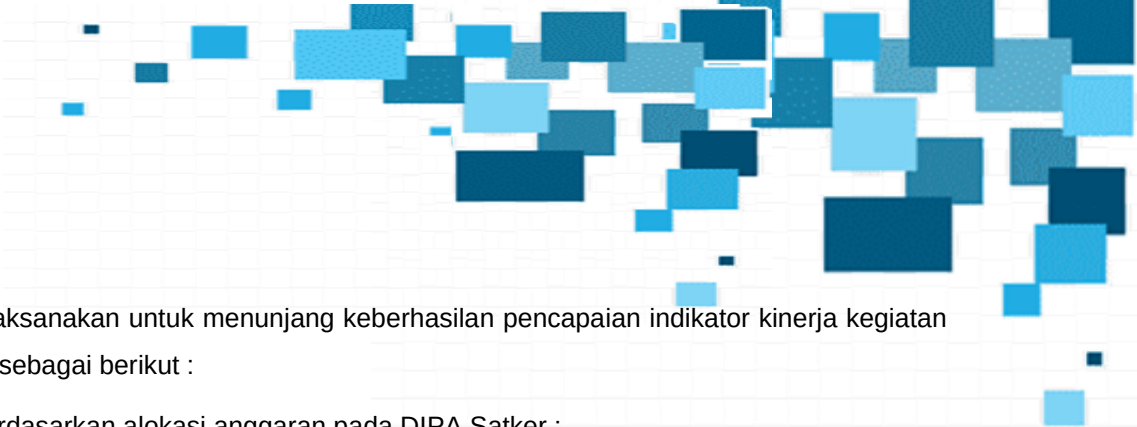
$$78\% = 50 \% \frac{11,10}{20} \times 50$$

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan kinerja implementasi WBK Satker dapat tercapai sebesar 84,22 dengan capaian kinerja sebesar 112,29% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp349.945.989,00 atau 99,82% dari pagu anggaran sebesar Rp.350,562,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,10 dengan nilai efisiensi sebesar 78% untuk capaian kinerja sebesar 112,29%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta reviu atau desk penilaian satker WBK dapat dilaksanakan secara *daring* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis *online* dan penyampaian data melalui *google drive*, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya komitmen bersama dan sinergi dari seluruh pegawai baik ASN maupun Non ASN, serta kerja sama dari semua anggota kelompok kerja dalam pelaksanaan implementasi WBK dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, upaya yang



dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker :

1) Layanan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan satker dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui upaya penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*, dan pengelolaan UPG, serta penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Ditjen P2P sebanyak 3 layanan.

2) Layanan Hubungan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan humas dan protokoler melalui kegiatan implementasi keterbukaan informasi publik, desiminasi / promosi informasi kegiatan melalui media cetak / bulletin SiGAR, dan implementasi budaya pelayanan prima sebanyak 2 layanan.

3) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan organisasi dan reformasi birokrasi Ditjen P2P melalui kegiatan reviu data klasifikasi UPT, penyusunan dan reviu analisis beban kerja, peta dan informasi jabatan, penyusunan / monev SOP AP UPT, serta pembangunan zona integritas menuju Satker WBK, penguatan dan pendampingan *assessment* penilaian Satker WBK/WBMM, yang hingga Tahun 2023 telah dilakukan pendampingan oleh Tim Hukormas Ditjen P2P dan *pre assessment* oleh Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes sebanyak 4 layanan.

4) Layanan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan umum dan perlengkapan berupa layanan aplikasi *meeting* berbayar, pengelolaan kantor BERHIAS, penyusunan Rencana Umum Pengadaan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta sewa kendaraan operasional dan pemeriksaan kesehatan ASN sebanyak 8 layanan.

5) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan dalam penataan persuratan dan kearsipan serta penyusutan arsip sesuai dengan dengan tata kelola arsip dan persuratan yang baik sebanyak 2 dokumen.

Berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Melakukan *sharing* informasi dengan satker lain yang telah meraih WBK Kemenkes.
- 2) Mengikuti pendampingan dan penguatan kinerja implementasi WBK dari Hukormas P2P.
- 3) Mengikuti pendampingan dan bimbingan implementasi WBK dari Tim Itjen Kemenkes.
- 4) Melakukan upaya penguatan zona integritas dan seluruh implementasi kelompok kerja WBK.
- 5) Meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan kontak pengaduan masyarakat, informasi melalui media cetak dan media sosial secara berkala.

Indikator Ketujuh :

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

a. Pengertian

Adalah persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, pertemuan sosialisasi/seminar, *worskhop*, magang dan kegiatan peningkatan SDM lainnya dengan jumlah jam yang diikuti sebanyak 20 JPL selama 1 Tahun.

b. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) Tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL minimal sebanyak 80% jumlah ASN.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya

B = Jumlah ASN 80 % yang ditargetkan untuk ditingkatkan kompetensinya

% C = Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

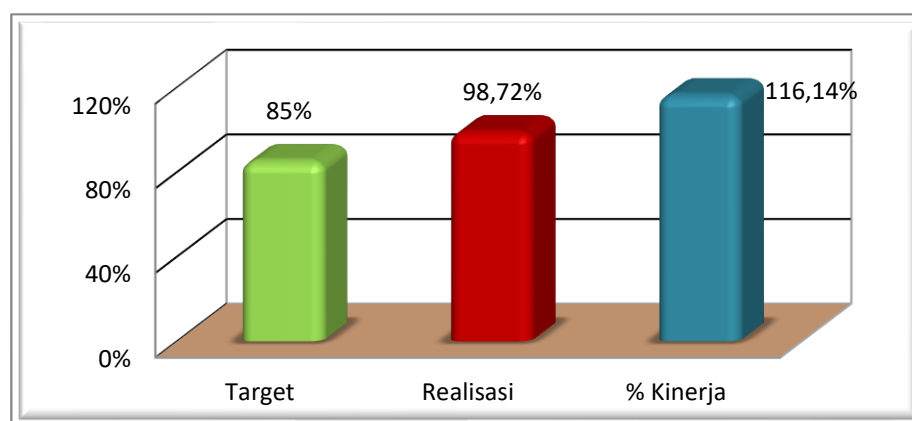
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya selama Tahun 2023 sebanyak 77 orang dari jumlah pegawai 78 orang atau sebesar 98,72% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{98,72}{85} \times 100\% = 116,14\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



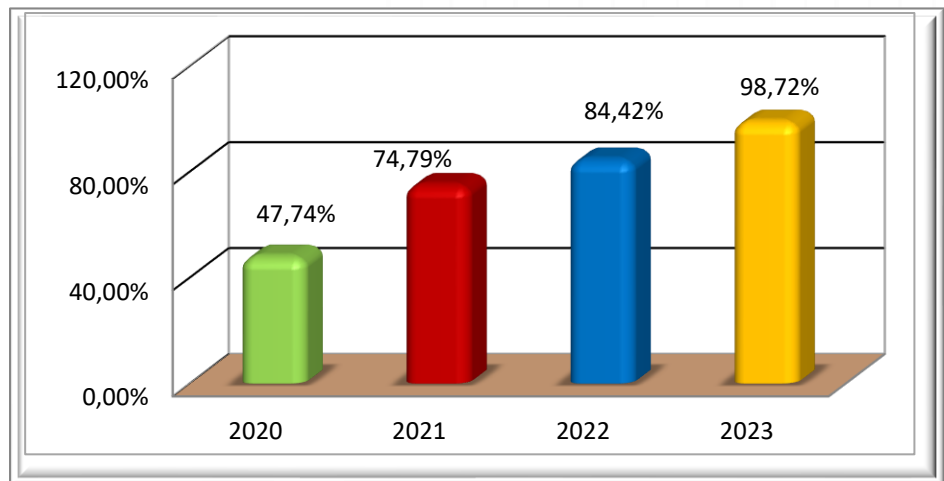
Grafik 28. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Dari grafik 28 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 116,14%. Hal ini karena peningkatan kompetensi ASN memang sangat dibutuhkan dan kegiatan dapat dipenuhi melalui *daring* dan *luring* dengan pembiayaan satker atau ditanggung dari pihak penyelenggara pelatihan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2023 merupakan tahap keempat pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 203 terdapat

perbedaan dengan Tahun 2020 s.d 2023, namun dari sisi target masih sama dengan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

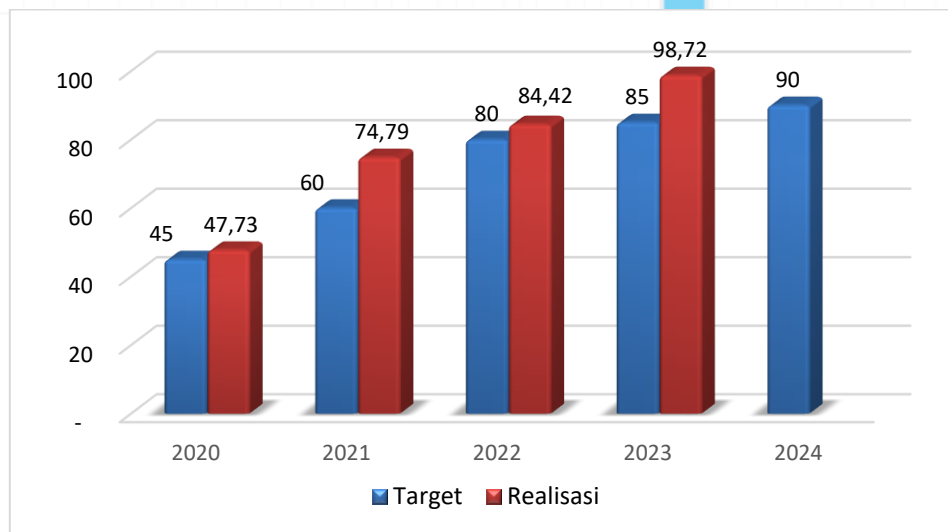


Grafik 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d 2023

Dari grafik 29 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2023 terdapat peningkatan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena Tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan revisi target karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi dimana penyelenggaraan peningkatan SDM masih terbatas, namun setelah pandemi berakhir, terjadi peningkatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi ASN baik melalui *daring* maupun *luring* sehingga ASN memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun keempat dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 98,72% dengan capaian kinerja 116,14 % dari target sebesar 85%.



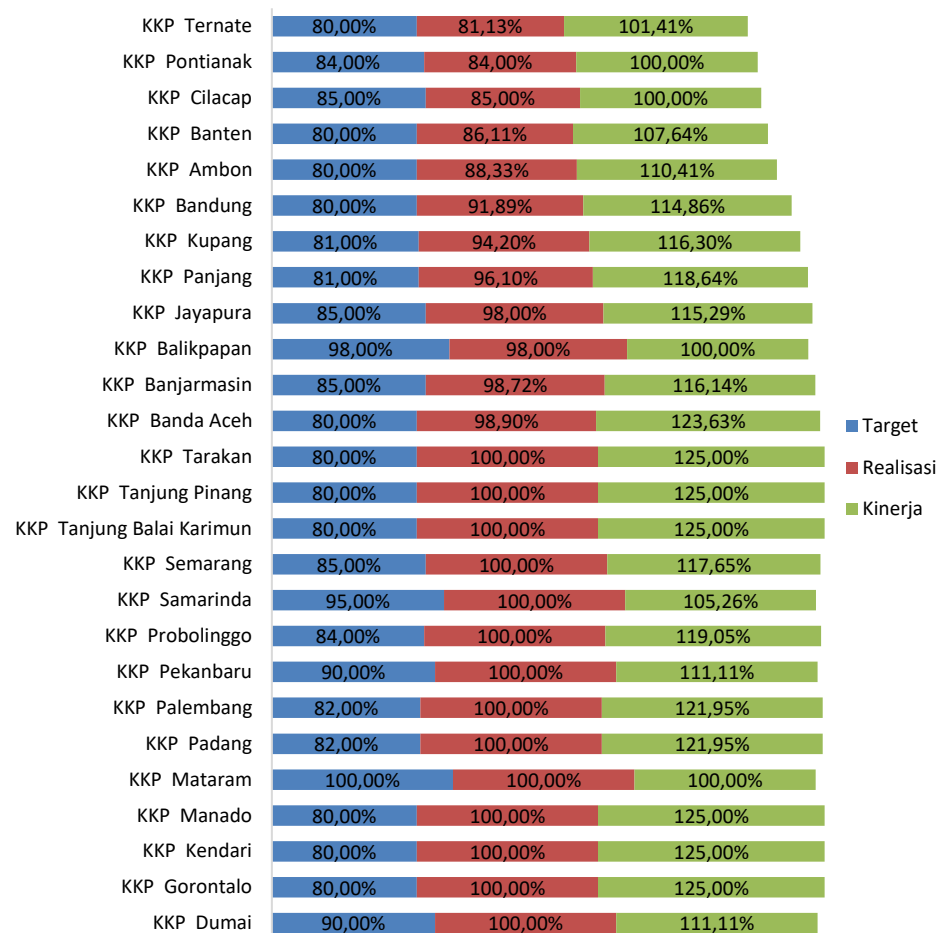
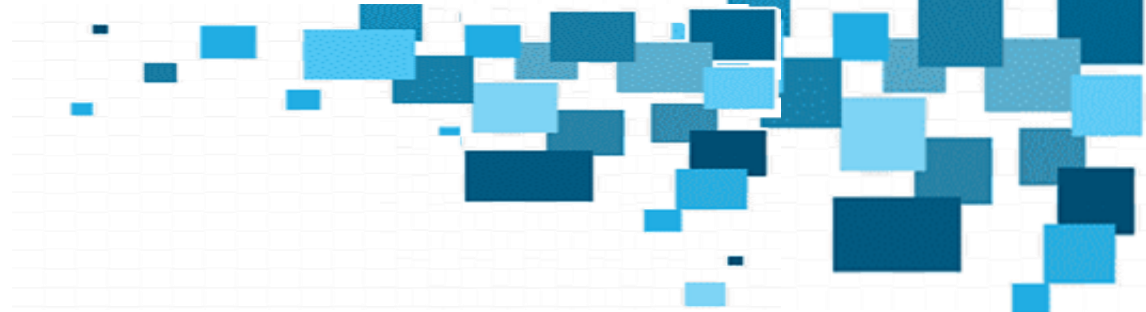
Grafik 30. Perbandingan Realisasi Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan Target RAK

Dari grafik 30 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023 terjadi peningkatan capaian kinerja, meskipun masih dibawah target jangka menengah hingga 2024 sebesar 90% yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, sehingga proyeksi target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasca pandemi yang mulai pulih, semakin membuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan berbagai metode dan jumlah jam pelajaran yang lebih mudah terpenuhi sebanyak 20 JPL.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Namun, untuk indikator ini tidak bisa dibandingkan karena baik dalam dokume RAP maupun PK Ditjen P2P tidak terdapat indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini. Meskipun begitu, satuan kerja telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Ditjen P2P dalam peningkatan kompetensi ASN sebesar 76 orang (98,72%).

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebagian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia, berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance* Kemenkes dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :



Grafik 31. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis
Persentase ASN Yang ditingkatkan Kompetensinya

Dari grafik 31 menunjukkan bahwa capaian Persentase ASN Yang ditingkatkan Kompetensinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan keenambelas untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia, karena sebagian satker telah mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi dari sikap proaktif dari masing-masing ASN untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM baik melalui *luring* maupun *daring* sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas sesuai jabatannya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yang tercapai 98,72 atau 116,14% dipengaruhi oleh :

- 1) Adanya penyelenggaraan pelatihan secara *online* atau *daring* yang menerbitkan sertifikat.
- 2) Tersedianya kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang penyelenggaraannya dan pembiayaannya difasilitasi oleh Ditjen P2P.
- 3) Tingginya kesadaran dari para ASN untuk meningkatkan kapasitas diri untuk agar dapat bekerja lebih profesional

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Tidak semua ASN dapat mengikuti semua pelatihan yang diselenggarakan karena keterbatasan kuota peserta.
- 2) Adanya keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN karena tingginya biaya pelatihan.

Pemecahan Masalah :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara terkait jadwal penyelenggaraan pelatihan sejenis selanjutnya.
- 2) Melaksanakan *transfer of knowledge* bagi ASN yang telah mengikuti pelatihan kepada ASN yang tidak mengikuti pelatihan.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

CK_i : % Capaian Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$13,94 = \frac{((Rp154.720.000 \times 116,14\%) - Rp154.635.376)}{Rp154.720.000} \times 100\%$$

$$85\% = 50\% \frac{13,94}{20} \times 50$$

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dapat tercapai sebesar 98,72% atau 116,14% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp154.635.376,00 atau 99,95% dari pagu anggaran sebesar Rp154.720.000,00 yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,94 dengan nilai efisiensi sebesar 85% untuk capaian kinerja sebesar 116,14%.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan peningkatan SDM dilaksanakan secara *e-learning* dan *blended learning* yang dibiaya pusat, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti kegiatan konsultasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis dapat diikuti secara *daring* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis *online* atau secara *hybrid*, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker :

1) Layanan Manajemen SDM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan analisa kebutuhan dan perencanaan pegawai, peningkatan kompetensi pegawai untuk menduduki jabatan fungsional tertentu, layanan mutasi pegawai dan pembinaan pegawai dengan target sasaran sebanyak 78 orang.

2) Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan ini dilaksanakan bagi para calon ASN untuk keikutsertaan dalam pelatihan/workshop/seminar kerasipan, pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan *public speaking*, pelatihan/bimtek pengadaan barang jasa, pelatihan manajemen risiko, kursus pembina Pramuka Saka Bhakti Husada sebanyak 47 orang.

Berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala capaian peningkatan kompetensi ASN melalui media *google spreadsheet* yang dapat diakses seluruh ASN.
- 2) Melakukan pengusulan pelatihan sesuai kompetensi masing-masing jabatan fungsional/pelaksana sesuai *Training Need Analysis*.
- 3) Melakukan optimalisasi anggaran untuk mengalokasikan anggaran tambahan baru untuk biaya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan ASN.

Indikator Kedelapan : Persentase Realisasi Anggaran

a. Pengertian

Adalah penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

b. Definisi Operasional

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

Adanya penambahan indikator kinerja kegiatan yang baru sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor : PR.03.02/C.I/1142/2023 Tanggal 02 Februari 2023 perihal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan indikator direktif dari Menteri Kesehatan yaitu Persentase Realisasi

Anggaran 95% yang diharapkan untuk lebih memudahkan dalam monitoring evaluasi atas realisasi anggaran di tahun berjalan.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Jumlah anggaran yang diserap

B = Jumlah pagu anggaran

% C = Persentase realisasi anggaran

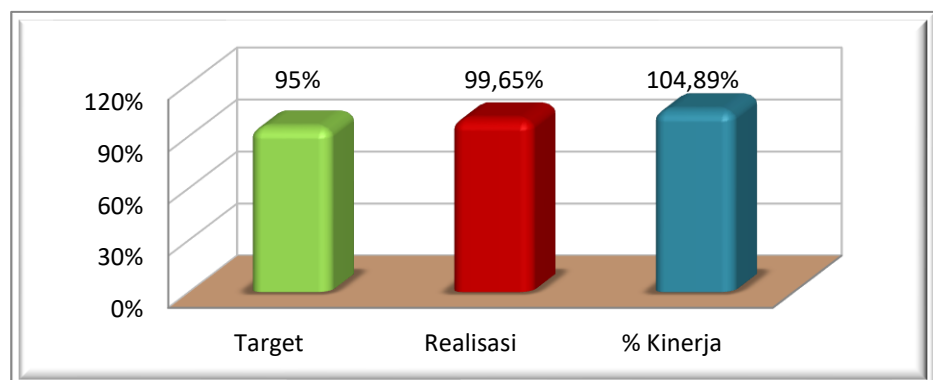
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase realisasi anggaran selama Tahun 2023 sebesar 99,67% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp}21.963.488.803,00}{\text{Rp}22.040.147.000,00} \times 100\% = 99,65\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

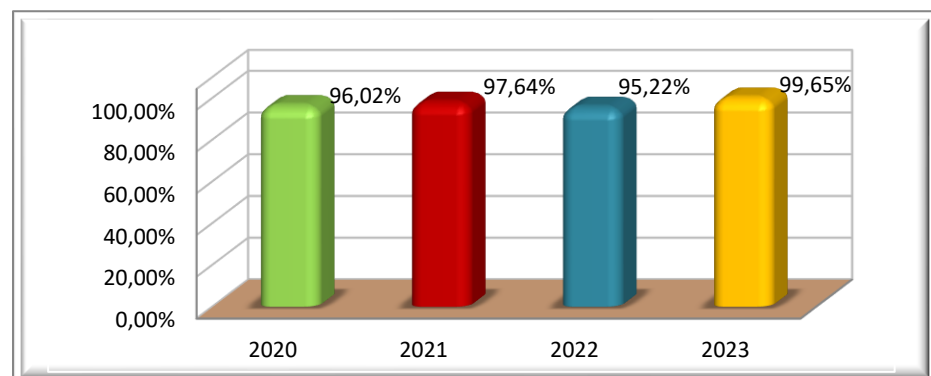


Grafik 32. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran

Dari grafik 32 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja persentase realisasi anggaran dapat tercapai 99,65% yaitu sebesar 104,89%. Hal ini karena penyusunan anggaran telah diupayakan berbasis kinerja dan adanya optimalisasi sisa anggaran untuk peningkatan capaian output atau manfaat kegiatan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator kinerja persentase realisasi anggaran ini merupakan indikator tambahan pada Tahun 2023, yang merupakan indikator direktif pimpinan untuk memudahkan dalam melakukan monitoring dan memegang komitmen Satker dalam realisasi anggaran tahun berjalan. Meskipun baru berlaku sejak Februari 2023, namun apabila dilihat dari data realisasi anggaran per tahun meskipun belum menjadi indikator kinerja kegiatan dapat dilakukan perbandingan antara Tahun 2020 s.d 2023. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

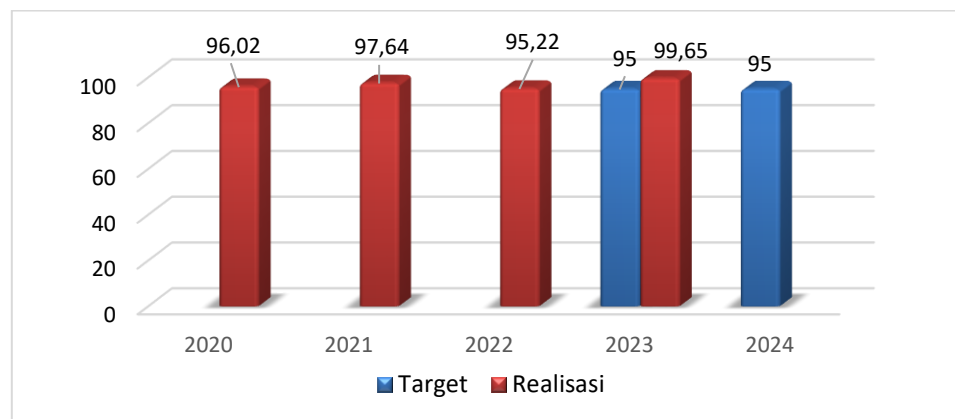


Grafik 33. Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d 2023

Dari grafik 33 menunjukkan bahwa perbandingan Tahun 2020 s.d 2023 capaian kinerja mengalami fluktuatif sesuai kebijakan penganggaran pada setiap tahunnya, dimana Tahun 2020 dan 2021 masa pandemi covid-19 sehingga terdapat penurunan penggunaan anggaran karena adanya pembatasan kegiatan, sedangkan Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya karena adanya kebijakan yang berdampak pada belanja pegawai, dan Tahun 2023 masa setelah pandemi dicabut atau berakhir, pelaksanaan kegiatan daring dan luring berjalan secara seimbang, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan normal kembali, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga mengalami peningkatan realisasi anggaran yang signifikan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator Persentase realisasi anggaran Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan tahun pertama karena merupakan indikator kinerja tambahan pada Tahun 2023. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 99,65% dengan capaian kinerja 104,89 % dari target sebesar 95%.



Grafik 34. Perbandingan Realisasi Persentase realisasi anggaran dengan Target RAK

Dari grafik 34 menunjukkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023, dimana penambahan indikator kinerja ini ditetapkan pada tahun 2023, sehingga tahun sebelumnya tidak memiliki target kinerja. Meskipun begitu, persentase realisasi anggaran dalam kurun 4 tahun telah melampaui target jangka menengah hingga 2024 sebesar 95% yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, sehingga proyeksi target jangka menengah akan tercapai hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasca pandemi yang mulai pulih, semakin membuka kesempatan pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal baik kegiatan pengawasan / pengendalian maupun kegiatan pertemuan yang bersifat tatap muka telah dapat dilaksanakan.

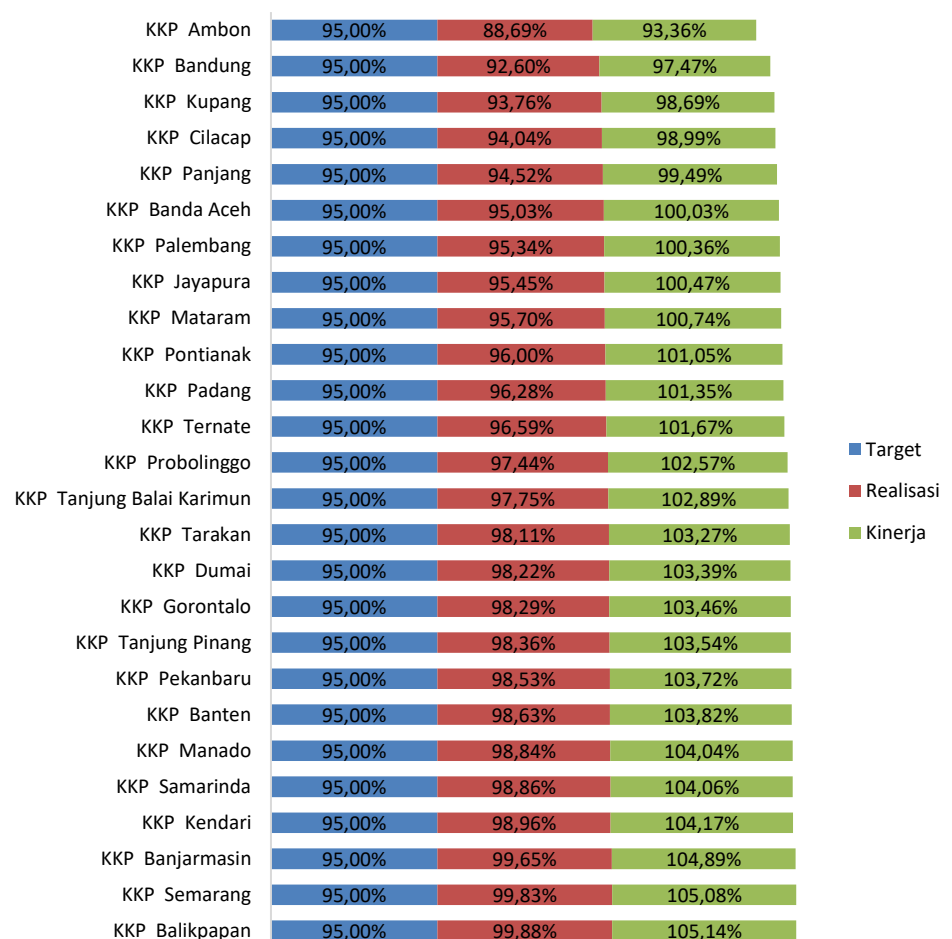
4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat nasional dengan satuan kerja Tahun 2023.

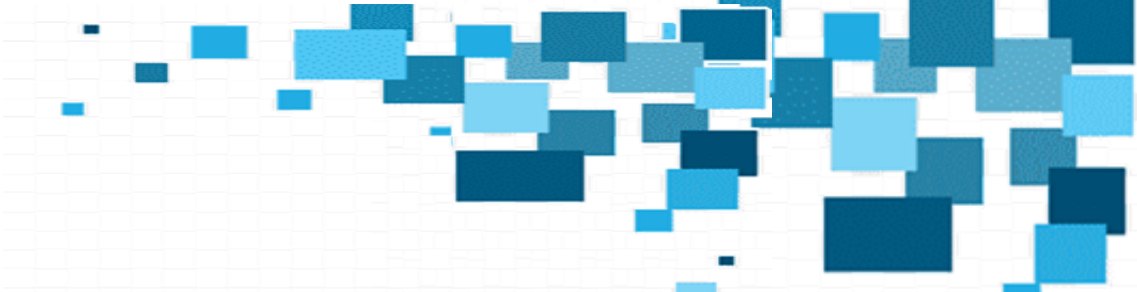
Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan capaian Ditjen P2P Tahun 2023 :

Indikator Ditjen P2P / RAP	Target	Realisasi	Indikator RAK	Target	Realisasi
Persentase Realisasi Anggaran Ditjen P2P	95%	96,41	Persentase Realisasi Anggaran	95%	99,65%

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja satker lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi indikator Ditjen P2P, yang berarti masih terdapat sebagian satker Ditjen P2P penyerapan anggarannya belum optimal. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia berdasarkan hasil data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :



Grafik 35. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional / Satker Sejenis
Persentase Realisasi Anggaran



Dari grafik 35 menunjukkan bahwa capaian Persentase Realisasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin berada di urutan ketiga dengan realisasi kinerja tertinggi untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Se-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran telah berbasis kinerja, adanya optimalisasi kegiatan untuk peningkatan capaian output dan peningkatan sarana prasana dukungan layanan internal.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja persentase realisasi anggaran yang tercapai 99,65% atau 104,89% dipengaruhi oleh :

- 1) Penyusunan anggaran telah berbasis kinerja.
- 2) Optimalisasi sisa anggaran kontraktual dan kegiatan.
- 3) Komitmen pengelola program dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- 1) Adanya kekurangan belanja pegawai akibat kebijakan *automatic adjustment* dan efisiensi anggaran.
- 2) Sering terjadi gangguan aplikasi SAKTI.
- 3) Adanya pekerjaan kontraktual yang belum selesai hingga akhir tahun.

Pemecahan Masalah :

- 1) Mengajukan usulan penambahan belanja pegawai sesuai kebutuhan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPPN terkait proses pencairan, pelaporan dan pendaftaran *supplier* / kontrak.
- 3) Memberikan kesempatan penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi hingga mencapai 100%, meskipun melewati tahun anggaran.
- 4) Mengajukan SPM Rekening Penampungan Akhrit Tahun (RPATA) untuk pekerjaan kontraktual yang melewati batas akhir tahun.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
CK_i : % Capaian Keluaran i
RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50 \% \frac{E}{20} \times 50$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

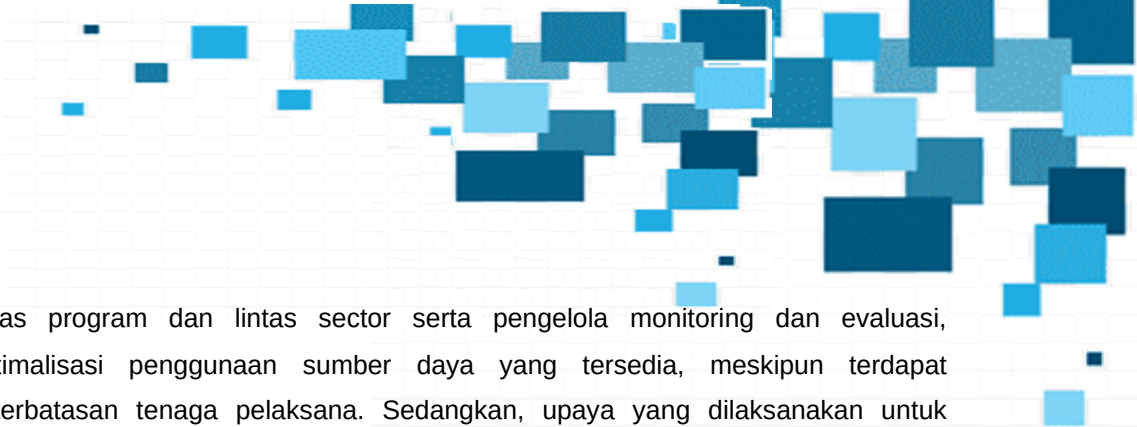
$$4,66 = \frac{((Rp64.080.000 \times 104,89\%) - Rp64.080.000))}{Rp64.080.000} \times 100\%$$

$$62\% = 50 \% \frac{4,66}{20} \times 50$$

Untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan persentase realisasi anggaran dapat tercapai sebesar 99,65% atau 104,89% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp64.080.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp64.080.000,00 yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,66 dengan nilai efisiensi sebesar 62% untuk capaian kinerja sebesar 104,89%.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan



lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Satker melalui Layanan Manajemen Keuangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester II TA. 2022, penyusunan laporan keuangan komprehensif (triwulan III TA. 2023), dan penyusunan laporan keuangan semester I TA. 2023, serta pencairan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (LS, UP dan TUP) sebanyak 6 dokumen.

Berdasarkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- 1) Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran setiap 1 minggu sekali atau sesuai kebutuhan dalam upaya percepatan realisasi anggaran.
- 2) Melakukan revisi anggaran untuk optimalisasi sisa anggaran kontraktual atau belanja barang operasional yang berpotensi tidak dapat digunakan lagi untuk alokasi anggaran yang lebih prioritas.
- 3) Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal pelaksanaan.
- 4) Melakukan himbauan ke semua pengelola program untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan tepat waktu.
- 5) Menyelesaikan proses pertanggungjawaban belanja melalui penerbitan SPP dan SPM secara tepat waktu.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator program maupun indikator kinerja kegiatan diperlukan dukungan sumber daya yang memadai yang terdiri atas Inovasi Layanan, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Adapun sumber daya yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Anggaran

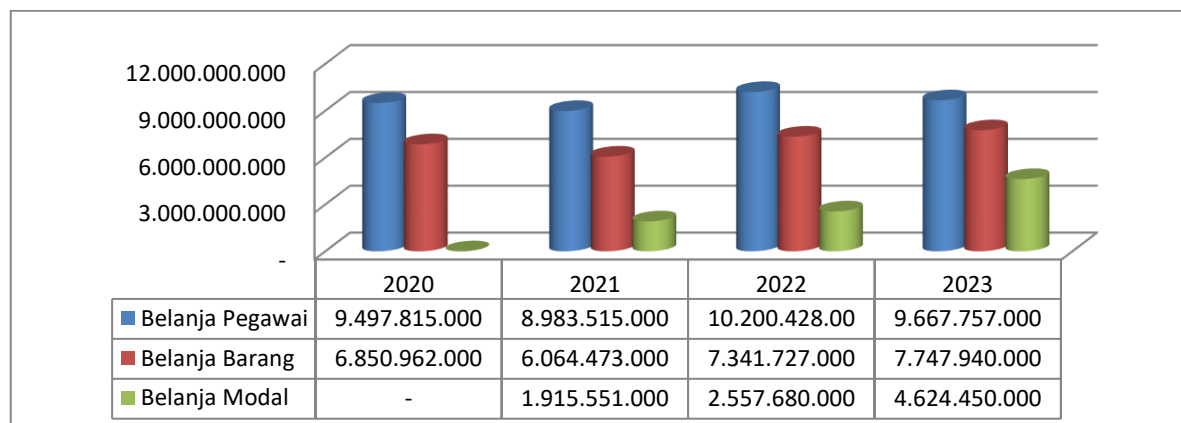
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2023 pada awal tahun memiliki total pagu anggaran awal sebesar Rp23.530.669.000,00 yang telah ditetapkan pada Tanggal 30 November 2022, namun adanya berbagai kebijakan terkait *automatic adjustment* sehingga mengalami efisiensi menjadi sebesar Rp22.040.147.000,00 dan apabila dibandingkan Tahun 2020 s.d 2022, terdapat kenaikan bersumber RM, sedangkan PNPB

mengalami penurunan karena adanya penurunan target PNBP akibat kebijakan terkait pelayanan vaksinasi meningitis yang berpengaruh besar pada pendapatan PNBP. Adapun alokasi anggaran berdasarkan sumber pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020 s.d 2023

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran TA 2020	Alokasi Anggaran TA 2021	Alokasi Anggaran TA 2022	Alokasi Anggaran TA 2023
1	Rupiah Murni (RM)	12.883.176.000	13.989.676.000	17.599.611.000	18.104.669.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.465.570.000	2.973.863.000	4.212.484.000	3.935.478.000
	Jumlah	16.348.746.000	16.963.539.000	21.812.095.000	22.040.147.000

Selain itu, alokasi anggara berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 36 Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2023

Dari grafik 36 menunjukan bahwa terdapat peningkatan alokasi belanja Tahun 2023, secara umum mengalami peningkatan, namun karena adanya kebijakan *automatic adjusment* belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 5.2%. Sedangkan belanja barang mengalami peningkatan sebesar 105.53%, dan belanja modal mengalami peningkatan sebesar 180.81% dari tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan gedung Kantor Wilayah Kerja Batulicin.

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat dari perbandingan indikator kinerja kegiatan dengan alokasi anggaran kegiatan dukungan pelayanan kekarantinaaan di pintu masuk dan dukungan manajemen, dimana pada Tahun 2023 terdapat revisi anggaran antar kegiatan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai.

Tabel 10. Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran	
				Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0,96	4.085.478.000	3.996.451.000
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%		
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	1		
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	88	17.954.669.000	18.043.696.000
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93		
		Kinerja implementasi WBK satker	75		
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%		
		Persentase Realisasi Anggaran	95%		

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan Barang Milik Negara sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Barang Milik Negara yang telah diperoleh dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN yaitu; fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu informasi sesuai dengan ketentuan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2023 ini adalah per tanggal 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Negara pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.514.918.133,00 yang mencakup seluruh transaksi Barang Milik Negara yang telah diinput dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin,

Tabel 11. Laporan Posisi Barang Milik Negara Neraca Per 31 Desember 2023

Akun Neraca	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	917.120.015
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	12.257.356
117114	Suku Cadang	10.195.825

Akun Neraca	Uraian	Jumlah
117199	Persediaan Lainnya	58.868.406
131111	Tanah	44.116.090.430
132111	Peralatan dan Mesin	26.486.481.765
133111	Gedung dan Bangunan	14.015.059.746
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.776.772.767
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(21.584.898.557)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.393.029.620)
162151	Software	141.020.000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(141.020.000)
	Jumlah	64.514.918.133

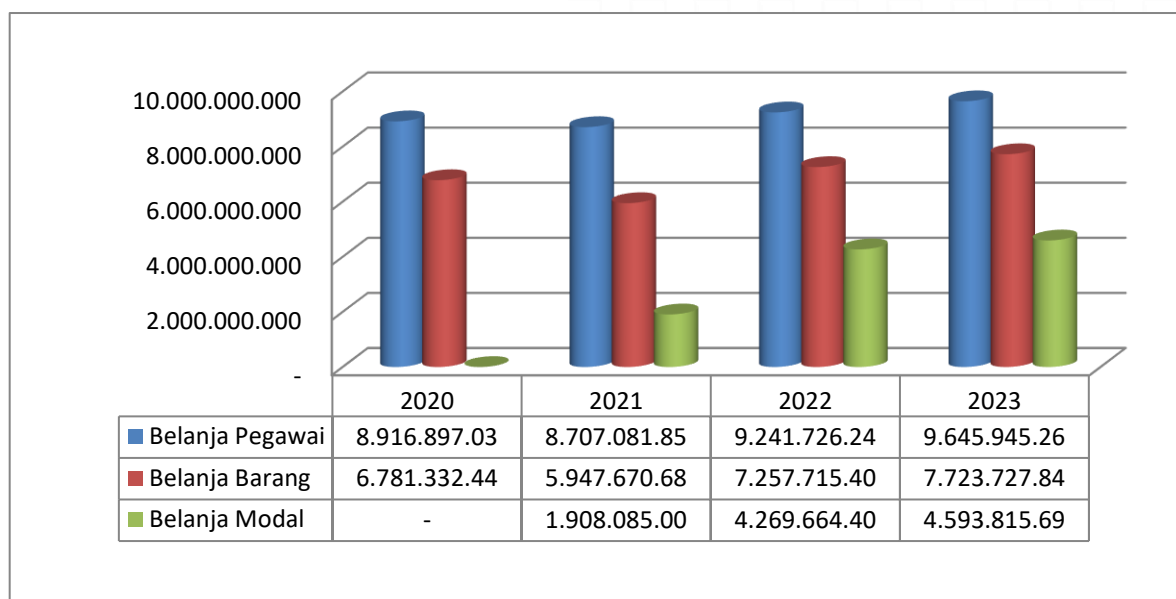
B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Adapun alokasi dan realisasi anggaran program pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	9.667.757.000	9.645.945.260	99,77
2	Belanja Barang	7.747.940.000	7.723.727.846	99,69
3	Belanja Modal	4.624.450.000	4.593.815.697	99,34
	Jumlah	22.040.147.000	21.963.488.803	99,65

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per jenis belanja apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk belanja pegawai terdapat peningkatan realisasi sebesar 4,37%, karena adanya kebijakan *automatic adjustment* dan efisiensi anggaran. Belanja barang terdapat peningkatan realisasi sebesar 6,42% karena adanya optimalisasi kegiatan, sedangkan belanja modal terdapat peningkatan realisasi sebesar 7,59% karena adanya optimalisasi sisa belanja kontraktual. Untuk lebih jelas perbandingan dapat dilihat pada grafik 37 berikut ini :



Grafik 37. Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2023

Selain itu, untuk melihat capaian kinerja dapat dilihat juga berdasarkan realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, Untuk perbandingan realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Capaian KRO dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output Kegiatan

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	4249.PEA	Koordinasi	72,930,000	72.609.054	99,56	11	23	209,09
	001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	72.930.000	72.609.054	99,56	11	23	209,09
2	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	886.035.000	885.900.045	99,58	23.500	25.713	109,42
	011	Pelayanan Kesehatan Haji	677.545.000	677.521.490	99,95	3.500	5.713	163,23
	012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	208.490.000	208.378.555	100	20.000	20.000	100,00
3	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	944.703.000	925.073.263	97,92	871	894	102,64
	016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	103.738.000	101.892.830	98,22	9	10	111,11
	017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	38.880.000	38.880.000	100,00	30	41	136,67

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	204.000.000	204.000.000	100,00	255	255	100,00
	U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	174.600.000	174.020.000	99,67	120	120	100,00
	U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	42.712.000	41.018.030	96,03	38	38	100,00
	U08	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pes	162.855.000	162.401.110	99,72	63	63	100,00
	U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	31.608.000	30.813.248	97,49	72	72	100,00
	U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	32.640.000	32.640.000	100,00	102	102	100,00
	U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	18.240.000	16.139.000	88,48	12	12	100,00
	U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	38.400.000	38.400.000	100,00	120	120	100,00
	U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	25.480.000	24.412.250	95,81	20	27	135,00
	U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	54.150.000	53.736.000	99,24	10	14	140,00
	U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	17.400.000	6.720.795	38,63	20	20	100,00
4	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.727.603.000	1.726.832.727	99,96	4	6	150
	001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	1,727,603,000	1.726.832.727	99,96	4	6	150
5	4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	365.180.000	364.973.092	99,94	24	68	283,33
	001	Pelatihan Kesehatan	365.180.000	364.973.092	99,94	24	68	283,33
Sub Jumlah			3.996.451.000	2.975.388.181	99,47	24.410	26.704	109,40
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P						
1	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.286.776.000	13.264.698.271	99,83	31	34	109,68
	956	Layanan BMN	51.810.000	50.153.730	96,80	4	5	125,00
	957	Layanan Hukum	12.838.000	12.833.095	99,96	3	3	100,00
	958	Layanan Hubungan Masyarakat	37.642.000	37.642.000	100,00	2	2	100,00
	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	9.895.000	9.895.000	100,00	4	4	100,00
	962	Layanan Umum	260.597.000	259.987.194	99,77	6	8	133,33
	994	Layanan Perkantoran	12.913.994.000	12.890.665.581	99,82	12	12	100,00
2	4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.057.150.000	4.027.255.697	99,26	3	4	133,33
	951	Layanan Sarana Internal	386.289.000	386.215.030	99,98	2	3	150,00
	971	Layanan Prasarana Internal	3.670.861.000	3.641.040.667	99,19	1	1	100,00

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	154.720.000	154.635.376.000	99,95	78	125	160,26
	954	Layanan Manajemen SDM	54.400.000	54.400.000	100,00	70	78	111,43
	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	100.320.000	100.235.376	99,92	8	47	587,50
4	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	545.050.000	545.032.949	99,99	31	35	112,90
	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	106.140.000	106.138.000	100,00	6	7	116,67
	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	345.240.000	345.226.249	100,00	19	20	105,26
	955	Layanan Manajemen Keuangan	64.080.000	64.080.000	100,00	4	6	150,00
	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	29.590.000	29.588.700	100,00	2	2	100,00
Sub Jumlah			18.043.696.000	17.991.622.293	99,71	143	198	138,46
Total			22.040.147.000	21.963.488.803	99,65	24,553	26,902	109,57

Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran sebesar 99,65% dan realisasi rincian output seluruhnya sebesar 109,57%, Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya efisiensi anggaran dan optimalisasi kegiatan meningkatkan capaian output kegiatan secara maksimal.

Selain itu, realisasi anggaran dapat dilihat dari perbandingan dengan capaian indikator kinerja kegiatan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	0,96	0,99	103,13	3.074.613.000	3.058.670.981	99,48
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100	556.658.000	551.744.108	99,12
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	1	1	100	365.180.000	364.973.092	99,94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	88	95	107,95	451.380.000	451.364.249	99,99
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	93	96,30	103,55	17.022.954.000	16.968.075.008	99,68
		6. Kinerja implementasi WBK satker	75	84,22	112,29	350.562.000	349.945.989	99,82
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	98,72	116,14	154.720.000	154.635.376	99,65
		8. Persentase Realisasi Anggaran	95%	99,65%	104,89	64.080.000	64.080.000	100

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tertinggi yaitu indikator kinerja kegiatan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 116,14% dengan realisasi anggaran sebesar 99,65% dan terendah pada inidikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,12% dan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN lingkungan sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,94%.

Hasil pencapaian ini dipengaruhi peningkatan pengawasan di pintu masuk, koordinasi dan peningkatan jejaring kerja dengan lintas sektor, sinergitas dari semua pengelola program dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih optimal, Selain itu, menunjukkan bahwa kinerja dapat dilaksanakan dengan baik melebihi dari target yang ditetapkan dan dapat dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk capaian kinerja rata-rata lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

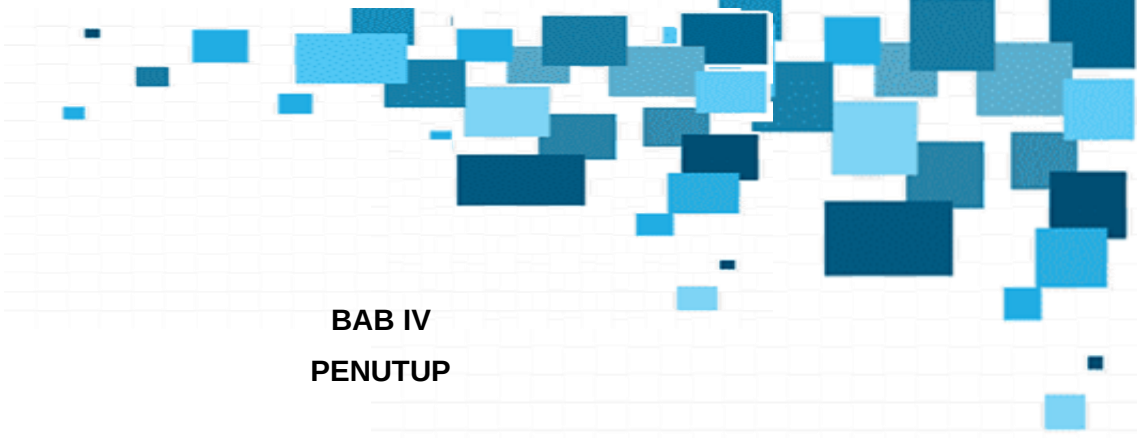
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB IV PENUTUP



KKP Kelas II Banjarmasin

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin



BAB IV PENUTUP

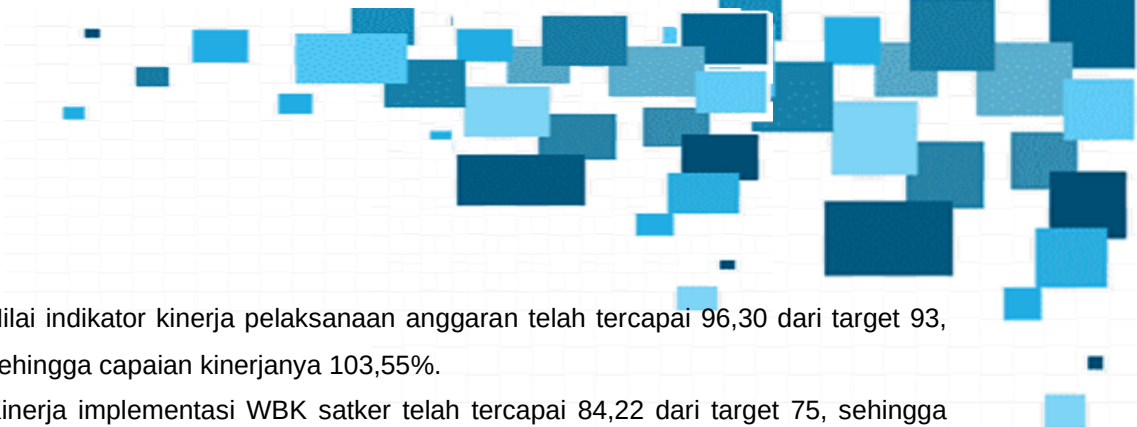
A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selama Tahun 2023.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja anggaran dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk mendukung dan meningkatkan pencapaian kinerja, telah dilakukan penyesuaian dan penambahan indikator kinerja kegiatan, sehingga target kinerja kegiatan rata-rata dapat tercapai lebih dari 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp21.963.488.803,00 atau 99,65% dari pagu anggaran sebesar Rp22.040.147.000,00 yang meningkat sesuai alokasi anggaran dan realisasi sebesar 4,43% dari Tahun 2022 yaitu sebesar 95,22% dari pagu anggaran sebesar Rp21.812.095.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran telah berbasis kinerja dan kebutuhan operasional, sarana dan prasarana pendukung kegiatan, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran belanja pegawai dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui realokasi anggaran antar kegiatan untuk peningkatan capaian output kegiatan.

Sedangkan capaian indikator kinerja kegiatan selama Tahun 2023 berdasarkan masing-masing sasaran strategis meliputi :

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan / Bandara / PLBDN telah tercapai 0,99 dari target 0,96, sehingga capaian kinerjanya 103,13%.
 - b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah tercapai 100% sesuai target, sehingga capaian kinerja 100%.
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara telah tercapai 1 sesuai target, sehingga capaian kinerjanya 100%.
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja anggaran telah tercapai 95 dari target 88, sehingga capaian kinerjanya 107,95%.

- 
- b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran telah tercapai 96,30 dari target 93, sehingga capaian kinerjanya 103,55%.
 - c. Kinerja implementasi WBK satker telah tercapai 84,22 dari target 75, sehingga capaian kinerjanya 112,29%.
 - d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah tercapai 98,72% dari target 85%, sehingga capaian kinerjanya 116,14%.

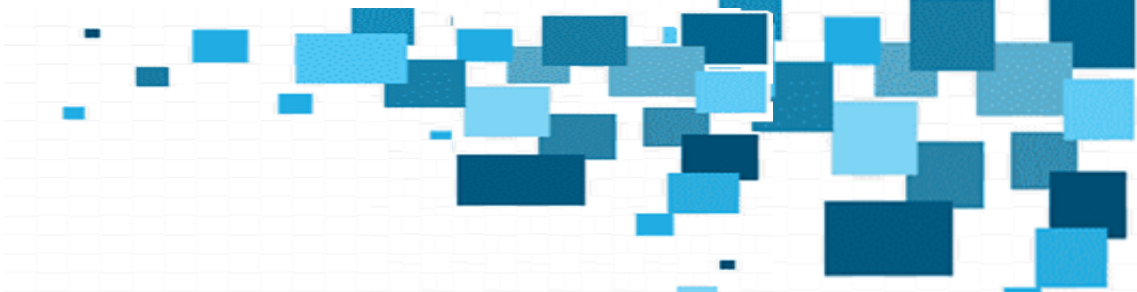
Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja kegiatan antara lain adalah komitmen para pengelola program dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program kegiatan telah dilaksanakan hampir di semua wilayah kerja dan adanya peningkatan serta perluasan target cakupan kegiatan di wilayah kerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan optimal.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024, maka untuk meningkatkan capaian kinerja dan program yang sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P 2020 – 2024 perlu melakukan berbagai upaya dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penguatan dan pemenuhan kebutuhan SDM Kekarantinaan Kesehatan agar sesuai standar dan analisis beban kerja.
2. Peningkatan peran ototitas pelabuhan dan bandara dalam pengawasan pengendalian faktor risiko lingkungan.
3. Peningkatan komitmen untuk pencapaian optimal nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan anggaran.
4. Peningkatan komitmen organisasi terhadap perbaikan manajemen perubahan dalam pembangunan zona integritas WBK yang dilaksanakan di internal satker.
5. Penyelarasan pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas ASN baik terhadap jabatan maupun hasil *assessment* ASN.
6. Penyelesaian pekerjaan kontraktual yang belum diselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2023.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut secara simultan meliputi :

- 
1. Mengajukan usulan CASN dan CPPK serta pengaturan penempatan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kekarantina kesehatan.
 2. Mendorong pembentukan forum pelabuhan / bandara sehat dan re-evaluasi terhadap forum yang telah terbentuk.
 3. Meningkatkan komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan optimalisasi pencapaian volume rincian output.
 4. Melakukan penguatan Reformasi Birokrasi Internal melalui perbaikan seluruh aspek upaya manajemen perubahan.
 5. Melakukan pengusulan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM (*Training Need Analysis*) meliputi kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan kompetensi teknis.
 6. Memberikan kesempatan penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi hingga mencapai 100%, meskipun melewati tahun anggaran dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhrit Tahun (RPATA).

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dalam mencapai target sasaran kegiatan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, namun terus berusaha meningkatkan kinerja secara internal dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, sedangkan secara eksternal dengan meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN



KKP Kelas II Banjarmasin

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Priyanto, SKM, M.Epid.

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar **Rp. 23.530.669.000**, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, Desember 2022

Pihak Kedua,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0.96
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	0,81
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	84
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	4.085.478.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	19.445.191.000
TOTAL		Rp.	23.530.669.000

Banjarmasin, Desember 2022

Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Priyanto, SKM, M.Epid.

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar **Rp. 22.040.147.000**, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, November 2023

Pihak Kedua,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	0,96
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	1
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	88
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
		8	Persentase Realisasi Anggaran	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 3,996,451,000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 18,043,696,000
TOTAL		Rp. 22.040.147.000

Banjarmasin, November 2023

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP 196709171990031001



KERTAS KERJA PERHITUNGAN KINERJA



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

A. INDIKATOR 1
INDEKS DETEKSI FAKTOR RISIKO DI PELABUHAN/ BANDARA/PLBDN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Parameter Perhitungan	Capaian								
		Januari			Februari			Maret		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar	241.279	261.876	109%	482.768	565.657	117%	724.046	877.127	121%
2	Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar	5.228	5.784	111%	10.457	11.199	107%	15.685	17.242	110%
3	Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar	20	29	142%	41	58	142%	61	83	136%
4	Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar	98	119	121%	197	241	123%	295	380	129%
Total		246.626	267.808	109%	493.462	577.155	117%	740.088	894.832	121%
Nilai Indeks				0,94			0,94			0,95

No	Parameter Perhitungan	Capaian								
		April			Mei			Juni		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar	965.335	1.197.265	124%	1.206.614	1.622.805	134%	1.448.133	1.941.990	134%
2	Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar	20.713	22.716	110%	25.992	29.181	112%	31.275	35.295	113%
3	Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar	82	107	131%	102	139	136%	123	173	141%
4	Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar	393	559	142%	492	717	146%	590	857	145%
Total			986.523	1.220.647	124%	1.233.199	1.652.842	134%	1.480.120	1.978.315
Nilai Indeks				0,95			0,95			0,95

No	Parameter Perhitungan	Capaian								
		April			Mei			Juni		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar	2.309.959	136%	1.934.375	2.618.521	135%	2.175.764	2.941.469	135%	2.309.959
2	Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar	41.305	113%	41.837	47.326	113%	46.915	52.781	113%	41.305
3	Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar	192	134%	163	218	133%	184	242	132%	192
4	Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar	1.002	146%	787	1.130	144%	885	1.285	145%	1.002
Total			2.352.458	136%	1.977.162	2.667.195	135%	2.223.748	2.995.777	135%
Nilai Indeks				0,98			0,98			0,98

No	Parameter Perhitungan	Capaian								
		Oktober			November			Desember		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Orang Yang Diperiksa Sesuai Standar	2.417.063	3.291.151	136%	2.658.501	3.648.668	137%	2.900.000	3.984.233	137%
2	Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar	52.193	59.471	114%	57.472	66.077	115%	62.750	72.171	115%
3	Persentase Barang Yang Diperiksa Sesuai Standar	204	273	134%	225	297	132%	245	317	129%
4	Persentase Lingkungan Yang Diperiksa Sesuai Standar	983	1.409	143%	1.082	1.549	143%	1.180	1.668	141%
Total			2.470.443	3.352.304	136%	2.717.279	3.716.591	137%	2.964.175	4.058.389
Nilai Indeks					0,99			0,99		

2. Perhitungan Nilai Indeks Kinerja

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120	600	100	120	600	
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	115	115	575	100	120	600	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120	360	100	120	360	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	120	120	600	100	120	600	
	TOTAL				2.135			2.160	

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

Nilai Indeks = 0,988425925925926

Banjarmasin, Januari 2024
Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

B. INDIKATOR 2**PERSENTASE FAKTOR RISIKO YANG DIKENDALIKAN PADA ORANG, ALAT ANGKUT, BARANG, DAN LINGKUNGAN****1. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang**

No	Pemeriksaan Orang	Jumlah Faktor Risiko Ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko							Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			Rujukan	Laik Terbang	Ijin Angkut Orang Sakit	Vaksinasi Meningitis	Vaksinasi Yellow Fever	Tolak Berangkat di Bandara/ Pelabuhan	Rekomendasi Perjalanan		
1	Suhu tinggi > 37,5	6	-	5	-	-	-	1	-	6	100,00%
2	Karantina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	Covid Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
4	Sakit (non suhu)	3.103	39	2.897	126	-	-	34	7	3.103	100,00%
5	Saturasi <95	28	1	8	-	-	-	16	3	28	100,00%
6	Hamil >32 minggu	27	2	-	1	-	-	21	3	27	100,00%
7	Hb <8.5	13	11	-	-	-	-	2	-	13	100,00%
8	Haji : hamil <14 minggu dan > 26 minggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
9	Penyakit menular yang menimbulkan wabah	9	-	2	1	-	-	5	1	9	100,00%
10	Belum vaksin meningitis	358	-	-	-	358	-	-	-	358	100,00%
11	Belum vaksin yellow fever	50	-	-	-	-	50	-	-	50	100,00%
12	ICV palsu/exp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
13	Positif HIV	1	1	-	-	-	-	-	-	1	100,00%
14	Positif TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
15	Positif Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
Total		3.594	53	2.912	128	358	50	79	14	3.594	100,00%

2. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Alat Angkut

No	Pemeriksaan Alat Angkut	Jumlah Faktor Risiko Ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko				Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi)	Tindakan Karantina	Desinseksi/ Desinfeksi pesawat	One Month Extention		
1	Ditemukan vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk alat angkut kapal	18	17	-	-	1	18	100,00%
2	Alat Angkut kapal yang penumpangnya positif	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	Ditemukan vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk alat angkut pesawat	-	-	-	-	-	-	100,00%
4	Alat Angkut pesawat yang penumpangnya positif	-	-	-	-	-	-	100,00%
Total		18	17	-	-	1	18	100,00%

3. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Barang

No	Pemeriksaan Barang	Jumlah Faktor Risiko Ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko		Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			Tidak Berangkat/ Tunda Berangkat Sampai Dokumen Lengkap	Berangkat dengan Status Bebas Faktor Risiko		
1	Jenazah penyakit menular dan potensial wabah	-	-	-	-	100%
Total		-	-	-	-	100,00%

4. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Lingkungan

No	Pemeriksaan Lingkungan	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko						Total dikendalikan	% Pengendalian Faktor Risiko
			Spraying	Abatisasi	Fogging	Perangkap	Rekomendasi Perbaikan Kualitas Air Bersih TMS	Rekomendasi Perbaikan Kualitas Makanan & Alat TMS		
1	TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan)	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
2	TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak)	2	-	-	-	-	-	2	2	100,00%
3	Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
4	Vektor dilingkungan buffer dan perimeter bandara/ pelabuhan	90	58	-	32	-	-	-	53	100,00%
Total		92	58	-	32	-	-	-	-	100,00%



Banjarmasin, Januari 2024
Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

C. INDIKATOR 3
INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DI PINTU MASUK NEGARA

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Parameter	Target 2023	Jan			Feb			Mar			Apr		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	0	1	0	1	1	100	1	2	200	1	2	200
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	7	7	100	12	12	100	19	19	100	24	26	108
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	84	6	1	17	12	3	25	18	7	39	24	13	54
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	49	10	10	100	20	20	100	30	30	100	40	40	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	50	6	6	100	11	11	100	16	16	100	21	21	100
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	40	4	4	100	8	8	100	12	12	100	16	16	100
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	30	33	110	64	66	103	98	100	102	123	126	102
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	312	22	25	114	48	51	106	75	78	104	144	147	102
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	17	19	112	35	39	111	54	59	109	74	80	108
Total		1067	103	106	103	213	211	99	326	323	99	471	471	100
Nilai Indeks					0,74			0,86			0,88			0,89

No	Parameter	Target 2023	Mei			Juni			Juli			Agustus		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	1	2	200	1	2	200	1	3	300	1	3	300
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	31	32	103	36	37	103	41	41	100	47	47	100
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	5	0	0	6	2	33	7	6	86	8	6	75
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	84	30	18	60	36	24	67	42	30	71	48	37	77
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	49	50	50	100	60	60	100	70	70	100	80	80	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	50	26	26	100	31	31	100	36	36	100	42	42	100
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	40	20	20	100	24	24	100	27	27	100	29	29	100
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	149	152	102	175	178	102	201	203	101	226	229	101
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	312	193	196	102	226	229	101	274	277	101	306	309	101
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	95	101	106	115	122	106	136	143	105	151	162	107
Total		1067	600	597	100	710	709	100	835	836	100	938	944	101
Nilai Indeks					0,90			0,92			0,96			0,96

No	Parameter	Target 2023	Sep			Okt			Nov			Des		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	1	1	4	400	1	4	400	1	4	400	1	4	400
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	63	53	53	100	58	58	100	63	63	100	63	63	100
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	12	9	12	133	11	12	109	12	12	100	12	12	100
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	84	54	45	83	60	54	90	66	63	95	72	72	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	49	90	90	100	100	100	100	110	110	100	120	120	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	50	48	48	100	54	54	100	60	60	100	66	66	100
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	40	31	31	100	33	33	100	35	35	100	36	36	100
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	288	242	255	105	258	267	103	273	278	102	288	288	100
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	312	338	341	101	356	359	101	374	376	101	392	392	100
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	168	156	166	106	162	168	104	165	168	102	168	168	100
Total		1067	1022	1045	102	1093	1109	101	1159	1169	101	1218	1221	100
Nilai Indeks					0,98			0,99			1			1

2. Perhitungan Nilai Indeks Kinerja

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Cov Min	Score Min
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11	12=3*11
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500	100	100	500			
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400	100	100	400			
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300	100	100	300			
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400	100	100	400			
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400	100	100	400			
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	100	100	500	100	100	500			
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500	100	100	500			
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	100	100	400	100	100	400			
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500			
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500	100	100	500			
	Total		1000		4400			4400			0

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

$((6/(9+11))-0$

Nilai Indeks = 1,00000

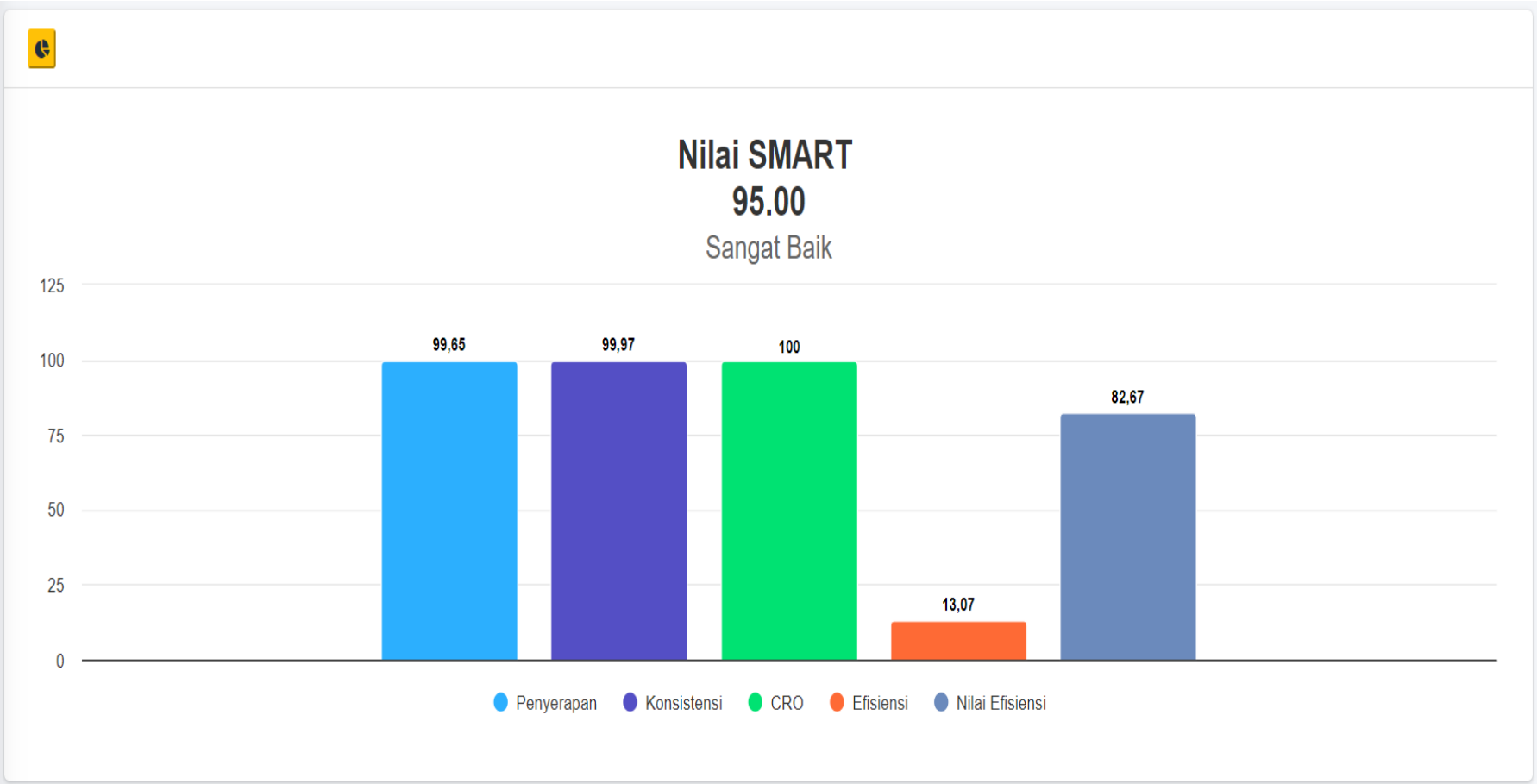


Banjarmasin, Januari 2023
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Banjarmasin

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

D. INDIKATOR 4
NILAI KINERJA ANGGARAN

1. Capaian Kinerja Tahun 2023



2. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan Anggaran	Konsistensi RPD Awal	Konsistensi RPD Akhir	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2020	87,87	96,02	88,02	98,40	100,00	3,98	-
2	2021	87,86	97,64	-	98,27	100,00	3,79	59,47
3	2022	88,34	98,30	-	98,30	100,00	4,78	61,95
4	2023	95,00	99,65	-	99,97	100,00	13,07	82,67



Banjarmasin, Januari 2024
Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

E. INDIKATOR 5
NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

1. Capaian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	045	024	415981	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN	Nilai	100.00	79.14	97.90	93.25	100.00	94.82	100.00	100.00	96.30	100%	96.30
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.91	19.58	9.33	10.00	9.48	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	89.57		97.19					100.00			

2. Capaian IKPA Tahun 2020 dan 2021 (13 parameter)

Tahun	IKPA	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM
2020	92,50	100,00	85,18	100,00	100,00	89,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00
2021	98,25	100,00	89,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,36	100,00	100,00	100,00	0,00	85,00

3. Capaian IKPA Tahun 2022 dan 2023 (8 parameter)

Tahun	IKPA	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2022	93,59	100,00	65,53	89,01	93,00	100,00	99,37	100,00	100,00
2023	96,30	100,00	79,14	97,90	93,25	100,00	94,82	100,00	100,00



Banjarmasin, Januari 2024
Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

F. INDIKATOR 6
KINERJA IMPLEMENTASI WBK SATKER

Komponen Penilaian	Syarat Minimal	Hasil Penilaian
Total Nilai (Komponen Pengungkit + Komponen Hasil)	75	84,22
A. Komponen Pengungkit (60%)		
1. Nilai Minimal Komponen Pengungkit	40	48,10
2. Bobot Nilai Minimal Per Area Pengungkit		
a. Manajemen Perubahan	60%	56,78%
b. Penataan Tatalaksana	60%	81,36%
c. Penataan Sistem Manajemen SDM	60%	61,00%
d. Penguatan Akuntabilitas	60%	85,78%
e. Penguatan Pengawasan	60%	90,80%
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60%	95,70%
C. Nilai Komponen Hasil		
1. Nilai Komponen Hasil "Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel"	18,25	19,98
a. Nilai Sub Komponen Survei Persepsi Anti Korupsi	15,75	16,23
b. Nilai Sub Komponen "Kinerja Lebih Baik"	2,50	3,75
2. Nilai Komponen Hasil "Pelayanan Publik Yang Prima"	14,00	16,13



Banjarmasin, Januari 2024
Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001

G. INDIKATOR 7
PERSENTASE ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

**DAFTAR INVENTARISASI SATUAN KERJA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN PENINGKATAN KOMPETENSI ASN SEBANYAK 20 JPL
(MINIMAL 85% ASN) TAHUN 2023**

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun		
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja
1	BAMBANG PRIYANTO, S.KM, M.EPID.																									0	Tidak Terpenuhi
2	BASUKI RAHMAT, SKM, MM					40			2		12															54	Terpenuhi
3	ABDUL SAMAD, SKM, MM				25				24	2	12			2												65	Terpenuhi
4	BAJU NOOR INDRIANTO, SKM, M.S								23	2	12			9												46	Terpenuhi
5	dr. MUHAMMAD KHAIDIR					20			4	2																26	Terpenuhi
6	AKHMAD YANIE, SKM								22	4				2												28	Terpenuhi
7	MURIYATI								20	2				4												26	Terpenuhi
8	RETNALISA								20																	20	Terpenuhi
9	RR. RIDHA KIRANA SULISTYA NINGTYAS, SKM								52	66	12		18	4												152	Terpenuhi
10	KHANSA RAF RAF, SKM						48		62	24			2	10												146	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun			
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja	magang / praktik kerja
11	SYAIPUL RAHMAN, SKM								52	4																	56	Terpenuhi
12	FATHIAH HERAWATI, SKM							73	63	6	12			4													158	Terpenuhi
13	NORJANAH, SKM					50			24	8				2													84	Terpenuhi
14	YENI SUSANTI MASSANG, SKM								33																		33	Terpenuhi
15	SAFRUDIN								20					2													22	Terpenuhi
16	HASANUDDIN								42	8				2													52	Terpenuhi
17	ANDI SYARIF, SKM								39	9	12			16													76	Terpenuhi
18	ZULFAIZAH, SKM., ME.								8	16			6	12			64										106	Terpenuhi
19	INDAH INDRIAWATI, SH., MH.								14	12				28													54	Terpenuhi
20	AFIAT NAFARIN, SKM					50			14					4													68	Terpenuhi
21	EKA NYUNITA SARI, SKM								40	2	12			4													58	Terpenuhi
22	NOR ISNANIAH, AMK					42			54	2																	98	Terpenuhi
23	NURUL HUDA LISNA					40			18		12																70	Terpenuhi
24	MUHAMMAD IHSAN					32			34		12			2													80	Terpenuhi
25	dr. SHINTA KUMALA AYU					5			24	16	12																57	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun		
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja
26	dr. EFNOVA BERTIANI					8			42																	50	Terpenuhi
27	dr. SANDRA REINNY PARENGKUAN					20			15	2	12															49	Terpenuhi
28	YULKHAIDIR, S.AP									6	12					9										27	Terpenuhi
29	ARY ARYATI								60	8	12			6												86	Terpenuhi
30	ACEP YUWIASNA, S.KM.					32			42	5	12		3	6												100	Terpenuhi
31	MUHAMMAD RAVI ABDULLAH, SKM								22	8				6												36	Terpenuhi
32	DEDDY SORANTO								38	16				4												58	Terpenuhi
33	RIZAIN SYAMSU								22																	22	Terpenuhi
34	CHAIRIYANTI, SKM				32				40																	72	Terpenuhi
35	RAHADIYAN NOOR								26	4																30	Terpenuhi
36	ISWATIN									12	12															24	Terpenuhi
37	ANITA FAIRIDAH, SKM								40	14	12															66	Terpenuhi
38	ISRANUDIN, SKM								51					4												55	Terpenuhi
39	PRAYITNO				25				19	2																46	Terpenuhi
40	MUHAMMAD IHRAMSYAH NUR, SKM					32			20					2												54	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun			
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja	magang / praktik kerja
41	FATIMAH, SE				24				9								90										123	Terpenuhi
42	ERMA YUNIAR					40			18	6																	64	Terpenuhi
43	ELFIA NAJMI NORMAYANTI, SKM					50			24	26	12			8													120	Terpenuhi
44	SANDRA VERAWATI, Amd.KL					50			42	7	12		10	4													125	Terpenuhi
45	EKA HERMALIYANIE, SKM								34		12			6													52	Terpenuhi
46	BAHRIANSYAH					60			16				117	2													195	Terpenuhi
47	RUSLINA								38					6													44	Terpenuhi
48	FAUZI RAHMAN PASA					32			56					2													90	Terpenuhi
49	AGUS SYAIFUDINNOR								16	8				12													36	Terpenuhi
50	ERWAN TAUFIK IKHTIAR	20						15	9	6																	50	Terpenuhi
51	RIZAL ARIYADI, A.Md								70					4													74	Terpenuhi
52	AMELIA YUNI LESTARI, Amd								26					2													28	Terpenuhi
53	MUHAMMAD AL HUSARI					40			4																		44	Terpenuhi
54	KHAIRUL IKHWAN								8		12		16				14										50	Terpenuhi
55	AQSO AMPRI HARAHAHAP, SKM								44	18	12			2													76	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun			
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outband)	Patok Banding (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja	magang / praktik kerja
56	ERIS TAJUDINNOOR, AMKL					50			16	11																	77	Terpenuhi
57	LAILY ARYANI	20						70		6																	96	Terpenuhi
58	RAHMI MADINA								62	14			3	4													83	Terpenuhi
59	MAHYUNI								26	2																	28	Terpenuhi
60	FAHRIZAL FERMANA FUTERA								43	3				2													48	Terpenuhi
61	CHAIRUNNISA PERMATA SARI, A.Md.Kep								20		12														26	58	Terpenuhi	
62	FATIMAH						30		4																		34	Terpenuhi
63	ADI DARMAWAN								33					4													37	Terpenuhi
64	AHMAD FAISAL, SKM					15			43	11	12			4													85	Terpenuhi
65	DR. LAELY KODRYATI								37																		37	Terpenuhi
66	NUR RAHMAWATI						33 6		4	14				14													368	Terpenuhi
67	ISMAIL SALEH					60	56	73	17			11 7	2														325	Terpenuhi
68	MAKMUN							15		6												2					23	Terpenuhi

No	Nama	Pendidikan		Pelatihan Klasikal										Pelatihan Non Klasikal										JUMLAH JP DALAM SATU TAHUN	Pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun			
		Tugas Belajar	Izin Belajar	Pelatihan Struktural/ Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar /Konferensi	Workshop / Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	e-learning	Pelatihan Jarak Jauh	datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)	Patok Bandoing (benchmarking)	pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta	belajar mandiri			komunitas belajar	bimbingan di tempat kerja	magang / praktik kerja
69	dr. M.AZIZUR RAHIM					147			12		12						20										191	Terpenuhi
70	dr. HENDY NUGRAHA								24	14	12						20										70	Terpenuhi
71	REDY CAHYA NUGRAHA, S.KOM				24	72			8																		104	Terpenuhi
72	NOFALIA KHOLIFATUL ANGGRAENI, S.KM.								60	18			6														84	Terpenuhi
73	NOVYANI AD'HARI								50				2														52	Terpenuhi
74	WILLY PRASETYO AGUNG WICAKSONO					40			27	14			5														86	Terpenuhi
75	KHAIRINA NUR NAJMI				24		26		12							15											77	Terpenuhi
76	SANDY KURNIAWAN, S.KM.								10	2	12		2	2													28	Terpenuhi
77	TIWI YULIANI					52			19	2			2														75	Terpenuhi
78	SRI HASTUTI								24				6														30	Terpenuhi

Banjarmasin, Januari 2024
Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 19670917199003100



H. INDIKATOR 8
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	9,667,757,000	4,379,762,000	4,057,150,000	0	0	0	0	0	0	18,104,669,000
		REALISASI	9,645,945,260 (99.77%)	4,375,848,465 (99.91%)	4,027,255,697 (99.26%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18,049,049,422 (99.69%)
		SISA	21,811,740	3,913,535	29,894,303	0	0	0	0	0	0	55,619,578
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	3,368,178,000	567,300,000	0	0	0	0	0	0	3,935,478,000
		REALISASI	0.00%	3,347,879,381 (99.40%)	566,560,000 (99.87%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,914,439,381 (99.47%)
		SISA	0	20,298,619	740,000	0	0	0	0	0	0	21,038,619
GRAND TOTAL		PAGU	9,667,757,000	7,747,940,000	4,624,450,000	0	0	0	0	0	0	22,040,147,000
		REALISASI	9,645,945,260 (99.77%)	7,723,727,846 (99.69%)	4,593,815,697 (99.34%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	21,963,488,803 (99.65%)
		SISA	21,811,740	24,212,154	30,634,303	0	0	0	0	0	0	76,658,197

2. Perbandingan Kinerja Bulanan Tahun 2023

No	Bulan	Pagu	Realisasi	Persentase	Rencana Penarikan Dana	Persentase
1	Januari	Rp 23.530.669.000	Rp 412.902.846	1,75%	Rp 412.902.979	100,00%
2	Februari	Rp 23.530.669.000	Rp 1.916.889.124	8,15%	Rp 1.916.888.953	100,00%
3	Maret	Rp 23.530.669.000	Rp 3.759.721.349	15,98%	Rp 3.759.720.642	100,00%
4	April	Rp 23.530.669.000	Rp 5.452.266.641	23,17%	Rp 5.452.265.904	100,00%
5	Mei	Rp 23.530.669.000	Rp 6.755.354.716	28,71%	Rp 6.755.353.569	100,00%
6	Juni	Rp 23.530.669.000	Rp 9.784.546.513	41,58%	Rp 9.784.544.750	100,00%
7	Juli	Rp 20.986.730.000	Rp 11.073.502.747	52,76%	Rp 11.073.500.959	100,00%
8	Agustus	Rp 21.469.920.000	Rp 12.293.548.241	57,26%	Rp 12.293.546.443	100,00%
9	September	Rp 21.469.920.000	Rp 13.877.359.323	64,64%	Rp 13.877.357.493	100,00%
10	Oktober	Rp 22.040.147.000	Rp 15.897.362.572	72,13%	Rp 15.897.360.528	100,00%
11	Nopember	Rp 22.040.147.000	Rp 18.649.549.535	84,62%	Rp 18.649.547.464	100,00%
12	Desember	Rp 22.040.147.000	Rp 21.963.488.803	99,65%	Rp 22.040.147.000	99,65%

Banjarmasin, Januari 2024
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Banjarmasin,



Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
NIP. 196709171990031001



ANALISA SMART

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

ANALISA SMART INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai indeks faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN - Indikator untuk menentukan status kinerja deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	- Indikator diukur berdasarkan persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar - Indikator dihitung dari perkalian bobot dan cakupan (coverage) dibagi perkalian bobot dan cakupan maksimal (<i>coverage max</i>) dikurang cakupan minimal (<i>coverage min</i>) - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana, prasarana dan anggaran	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan / pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar di pelabuhan / bandara / PLBDN - Capaian kinerja indikator sesuai parameter pengukuran telah dapat tercapai sebesar 100 % sesuai target yang telah ditetapkan - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan - Indikator untuk menentukan faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	- Indikator diukur berdasarkan jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100% - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana, prasarana dan anggaran	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan faktor risiko terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di pintu masuk - Capaian kinerja indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan. - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantina Kesehatan	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Bound	
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara - Indikator untuk menentukan status faktor risiko di pintumasuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	- Indikator diukur berdasarkan persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%, persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal = 1, persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1), persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2, persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2, persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0, persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1, persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan, persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan, dan persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis - Indikator dihitung dari perkalian bobot dan cakupan (coverage) dibagi perkalian bobot dan cakupan maksimal (coverage max) dikurang cakupan minimal (coverage min) - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana, prasarana dan anggaran	- Adanya terus menerus melakukan upaya untuk melaksanakan penilaian terhadap status pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. - Capaian kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan. - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
4	Nilai Kinerja Anggaran	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja anggaran - Indikator untuk menentukan besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	- Indikator diukur berdasarkan Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana, prasarana dan anggaran	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran baik melalui penyerapan anggaran dan pemenuhan target capain output - Capaian indikator nilai kinerja anggaran telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan. - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per Semester selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) - Indikator untuk menentukan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada aplikasi OMSPAN	- Indikator diukur berdasarkan Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana, prasarana dan anggaran	- Adanya terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan anggaran dan belanja baik kontraktual maupun non kontraktual dan UP/GUP maupun LS, pengelolaan berkas pertanggungjawaban dan capaian output. - Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan. - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga. - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
6	Kinerja implementasi WBK satker	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja implementasi WBK Satker - Indikator untuk menentukan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (<i>self Assesment</i>) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK / WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Kemenkes	- Indikator diukur berdasarkan Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana, prasarana dan anggaran	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja implementasi WBK Satker melalui sosialisasi implementasi ZI ke seluruh pegawai dan masyarakat yang dilayani - Capaian indikator kinerja implementasi WBK Satker telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Perpes nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sesuai hasil penilaian selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achieveable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya - Indikator untuk menentukan jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	- Indikator diukur berdasarkan Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikalikan 100%. - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana, prasarana dan anggaran	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui dukungan anggaran, fasilitas yang memadai untuk peningkatan kompetensi pegawai. - Capaian indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
8	Persentase Realisasi Anggaran	- Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur persentase realisasi anggaran - Indikator untuk menentukan kesesuaian jenis belanja yang direncanakan dan direalisasikan	- Indikator diukur berdasarkan hasil perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran - Indikator ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya baik SDM, sarana dan prasarana	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja indikator persentase realisasi anggaran melalui dukungan komitmen semua pengelola program dan pengelola keuangan, serta fasilitas yang memadai - Kinerja dapat dicapai karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang dimiliki	- Indikator ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas KKP melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi KKP	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART


 Banjarmasin, Februari 2023
 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
 Banjarmasin,

Bambang Priyanto, S.KM., M.Epid.
 NIP. 196709171990031001